

ANALISIS KEMISKINAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2020



Kerjasama
**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



Dengan
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



ANALISIS KEMISKINAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2020



Kerjasama

**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Dengan

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta

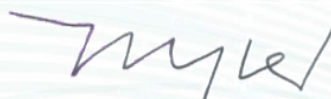
KATA PENGANTAR

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Upaya penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan diantaranya penyediaan data kemiskinan yang akurat.

Tingginya angka kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masih menjadi salah satu isu strategis daerah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY Tahun 2017 – 2022. Tingkat kemiskinan di DIY cenderung mengalami penurunan, meskipun belum seperti yang telah ditargetkan. Publikasi ini menyajikan data dan analisis kemiskinan yang memuat dinamika dan variasi kemiskinan yang terjadi, identifikasi penyebab kemiskinan, dan potret distribusi jaminan sosial serta pemberdayaan masyarakat.

Terima kasih kami sampaikan kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah membantu serta bekerja sama dalam penyusunan publikasi ini. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan pihak terkait. Kami berharap publikasi ini dapat sebagai basis data dalam melakukan monitoring, evaluasi dan perencanaan program pembangunan yang berkaitan dengan kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bantul, Oktober 2020
Badan Pusat Statistik
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala,



Dr. Heru Margono, M.Sc.

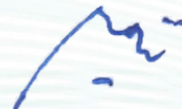


KATA SAMBUTAN

Kemiskinan merupakan masalah kompleks dan multidimensi, dimana banyak faktor yang mempengaruhinya mulai dari pengangguran, pengupahan, laju pertumbuhan ekonomi, kualitas sumber daya manusia, akses ke pelayanan dasar dan lain-lain di daerah. Faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan dan lambatnya penurunan kemiskinan memerlukan kajian lebih lanjut. Meskipun kajian tersebut belum langsung menyeluruh tetapi kajian dari berbagai sudut pandang sangat diperlukan. Hasil analisis dapat memberikan masukan terkait upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada, sehingga penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan penduduk terwujud.

Pada kesempatan ini pula kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta beserta jajarannya atas segala usaha yang telah dilakukan untuk menyelesaikan publikasi ini. Mudah-mudahan kerja sama antara Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta dan BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta akan selalu menghasilkan dokumen yang bermanfaat untuk evaluasi dan rumusan perencanaan pembangunan. Hasil analisis ini diharapkan juga bermanfaat dapat menunjang upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yogyakarta, Oktober 2020
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala,



Drs. Beny Suharsono, M.Si



DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar.....	iii
Kata Sambutan.....	v
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar.....	xii
Ringkasan Eksekutif	xiii
Bab I: Pendahuluan	3
1.1.LatarBelakang.....	3
1.2.Tujuan.....	8
1.3.Referensi Hukum.....	8
Bab II: Landasan Teori dan Metodologi.....	11
2.1 Konsep dan Definisi Kemiskinan.....	13
2.2 Ukuran dan Indikator Kemiskinan	18
2.3 Karakteristik Kemiskinan.....	21
2.4 Penyebab Kemiskinan.....	24
2.5 Sumber Data.....	25
Bab III: Dinamika dan Variasi Kemiskinan	27
3.1 Klasifikasi penduduk berdasarkan desil/kuantil/persentil pengeluaran per kapita.....	30
3.2 Perkembangan Tingkat Kemiskinan.....	34
3.3 Variasi kemiskinan menurut wilayah perkotaan/perdesaan.....	40
3.4 Variasi kemiskinan menurut kab/kota.....	44
Bab IV: Profil Kemiskinan.....	49
4.1 Karakteristik Wilayah dan Fasilitas Dasar.....	51
4.2. Karakteristik Penduduk Miskin.....	56
4.2.1 Demografi.....	56
4.2.2 Pendidikan.....	59
4.2.3 Kesehatan dan Perumahan.....	62
4.2.4 Ekonomi.....	74
4.2.5 Akses terhadap makanan.....	77
Bab V : Penyebab Kemiskinan.....	81
5.1 Keterisolasian: Dampak dari Kondisi Topografi dan Aksesibilitas.....	83
5.2 Kerentanan: Sulitnya Akses Layanan Dasar.....	85
5.3 Ketidakberdayaan: Kondisi Perekonomian dan Ketenagakerjaan..	86
5.3.1 Kondisi Perekonomian.....	86
5.3.2 Kondisi Ketenagakerjaan.....	91
5.4 Kelemahan Fisik: Kualitas SDM Rendah.....	95
5.5 Kelemahan Materi: Rendahnya Investasi.....	105
5.6 Dampak Bencana dan Perubahan Iklim terhadap Kemiskinan.....	107

Lanjutan Daftar Isi

Bab VI: Program Perlindungan Sosial.....	111
6.1 Distribusi Bantuan Perlindungan Sosial (BPNT, PKH).....	113
6.2 Distribusi Kepemilikan Kartu Jamsos.....	120
6.3 Distribusi Bantuan kredit dan Bantuan Pemda.....	124
Bab VII Identifikasi Kondisi Kemiskinan terdampak Covid-19.....	129
7.1 Perkembangan Kemiskinan DIY Pada Awal Covid-19.....	131
7.2 Perkembangan Ketenagakerjaan Pada Masa Pandemi Covid-19	134
Bab VIII Penutup.....	137
8.1 Kesimpulan.....	139
8.2 Rekomendasi.....	140
Daftar Pustaka.....	143

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1.1 Target Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin dalam RPJMD 2017 – 2022.....	7
Tabel 3.1.1 Distribusi Pengeluaran Penduduk Menurut Daerah dan Kreteria Bank Dunia, 2015-2019.....	31
Tabel 3.1.2 Persentase Pembagian Pengeluaran Menurut Kelas Quintil dan Daerah, 2018-2019.....	33
Tabel 3.1.1 Target Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin dalam RPJMD di DIY 2018 – 2022.....	36
Tabel 3.2.2 Garis Kemiskinan DIY, Tahun 2015-2019.....	38
Tabel 3.2.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) DIY, Tahun 2016-2020.....	39
Tabel 3.3.1. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Tipe Daerah di DIY, 2018 – 2020.....	42
Tabel 3.4.1. Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2018 – 2019.....	46
Tabel 3.4.2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2018 – 2019.....	47
Tabel 4.1.1 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Topografi Wilayah di DIY, Tahun 2019.....	51
Tabel 4.1.2 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Lokasi Desa Terhadap Laut di DIY, Tahun 2019.....	52
Tabel 4.1.3 Jumlah dan Persentase Desa menurut Keberadaan Fasilitas Pendidikan dan Kabupaten/Kota di DIY, Tahun 2019.....	54
Tabel 4.1.4 Jumlah Desa menurut Keberadaan Fasilitas Pendidikan dan Kabupaten/Kota di DIY, Tahun 2019.....	55
Tabel 4.1.5 Jumlah Desa menurut Keberadaan Fasilitas Kesehatan Lainnya dan Kabupaten/Kota di DIY, Tahun 2019.....	56
Tabel 4.2.1: Karakteristik Sosial Demografi Rumah Tangga Miskin dan Rumah Tangga Tidak Miskin di DIY, 2019.....	57
Tabel 4.2.2: Karakteristik Sosial Demografi Rumah Tangga Miskin menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2019.....	58
Tabel 4.2.2.1 Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Pendidikan yang Ditamatkan, Tahun 2019.....	59
Tabel 4.2.2.2 Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota dan Pendidikan yang Ditamatkan Kepala Rumah Tangga, Tahun 2019.....	61
Tabel 4.2.2.3 Persentase Penduduk Miskin Menurut Tingkat Pendidikan Kepala Rumah Tangga dan Tipe Daerah di DIY, Tahun 2019.....	61

Lanjutan Daftar Tabel

Tabel 4.2.3.1 Persentase Penduduk Miskin yang Mengalami Keluhan Kesehatan menurut Tipe Wilayah Tempat Tingal dan Kabupaten/Kota, 2019.....	63
Tabel 4.2.3.2 Persentase Penduduk Miskin yang Mengalami Keluhan Kesehatan Dan Berobat Jalan menurut Tipe Wilayah Tempat Tingal dan Kabupaten/Kota,2019.....	64
Tabel 4.2.3.3 Persentase Penduduk Miskin yang Mengalami Keluhan Kesehatan Dan Rawat Inap menurut Tipe Wilayah Tempat Tingal dan Kabupaten/Kota, 2019.....	66
Tabel 4.2.3.4 Persentase Penduduk Miskin Menurut Kepemilikan Jaminan Kesehatan, Tipe Wilayah Tempat Tingal dan Kabupaten/Kota, 2019.....	68
Tabel 4.2.3.5 Persentase Rumah Tangga Miskin Menurut Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal, Tipe Wilayah Tempat Tingal dan Kabupaten/Kota, 2019.....	70
Tabel 4.2.3.6 Persentase Penduduk Miskin Menurut Rumah layak huni, Tipe Wilayah Tempat Tingal dan Kabupaten/Kota, 2019.....	74
Tabel 4.2.4.1 Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Status Bekerja di DIY, Tahun 2019.....	75
Tabel 4.2.4.2. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Sektor Bekerja di DIY, Tahun 2019.....	76
Tabel 4.2.5.1 Persentase Rumah Tangga Miskin yang Merasa Mengalami Permasalahan Akses Konsumsi Pangan Setahun Terakhir, Maret 2019.....	78
Tabel 5.4.1 Indikator Ketahanan Pangan dengan Menggunakan Klasifikasi Silang Kecukupan Energi dan Pangsa Pengeluaran Pangan.....	98
Tabel 5.4.2 Persentase Rumah Tangga Miskin Menurut Rumah layak huni, Tipe Wilayah Tempat Tingal dan Kabupaten/Kota, 2019.....	96
Tabel 5.4.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Derajat Ketahanan Pangan dan Desil Pengeluaran, 2019.....	98
Tabel 5.4.4 Proporsi Rumah Tangga Rawan Pangan Menurut Desil Pengeluaran dan Kabupaten/Kota, 2019.....	100
Tabel 5.4.5 Skor PPH Menurut Tipe Wilayah,2019.....	101
Tabel 5.4.6 Skor PPH Menurut Kabupaten/kota,2019.....	102
Tabel 5.4.7 Skor PPH Menurut Desil Pengeluaran perkapita/bulan,2019	104
Tabel 5.5.1 Struktur Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) di D. I Yogyakarta, 2015-2019.....	105
Tabel 5.6.1 Banyaknya Desa Menurut Jenis Bencana Alam pada Tahun 2019.....	108
Tabel 5.6.2 Banyaknya Desa Menurut Upaya Antisipasi/Mitigasi Bencana Alam pada Tahun 2019	110

Tabel 6.1.1 Persentase Rumah Tangga Penerima BPNT Menurut Desil Pengeluaran Perkapita dan Tipe Daerah di DIY, Tahun 2019.....	115
Tabel 6.1.2 Persentase Rumah Tangga Penerima BPNT Menurut Desil Pengeluaran Perkapita dan Kabupaten/Kota di DIY, Tahun 2019.....	116
Tabel 6.1.3 Persentase Rumah Tangga Penerima PKH Menurut Desil Pengeluaran Perkapita dan Tipe Daerah di DIY, Tahun 2019.....	118
Tabel 6.1.4 Persentase Rumah Tangga Penerima PKH Menurut Desil Pengeluaran Perkapita dan Kabupaten/Kota di DIY, Tahun 2019.....	119
Tabel 6.2.1 Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Atau Menerima Jaminan Pensiun/Veteran Menurut Desil Pengeluaran Dan Kabupaten/Kota, 2019.....	121
Tabel 6.2.2 Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki/Menerima Asuransi Kecelakaan Menurut Desil Pengeluaran Dan Kabupaten/Kota, 2019.....	122
Tabel 6.2.3 Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Atau Menerima Asuransi Kecelakaan Menurut Desil Pengeluaran Dan Kabupaten/Kota, 2019.....	123
Tabel 6.3.1 Distribusi Rumah Tangga Penerima Kredit Menurut Desil Pengeluaran dan Tipe Daerah di DIY, 2019 (persen)	125
Tabel 6.3.2 Distribusi Rumah Tangga Penerima Kredit Menurut Desil Pengeluaran dan Kabupaten/Kota di DIY, 2019 (persen).....	126
Tabel 6.3.3 Distribusi Rumah Tangga Penerima Bantuan Pemerintah Daerah (Pemda) Menurut Kuantil Pengeluaran dan Kabupaten/Kota di DIY, 2019.....	128

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1.1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan DIY dan Indonesia per Maret Tahun 2015 – 2019(dalam persen).....	5
Gambar 1.1.2. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin DIY per Maret Tahun 2015 – 2019 (dalam ribu orang)	6
Gambar 2.1.1. Perangkap Kemiskinan.....	14
Gambar 2.1.2. Lingkaran Kemiskinan.....	18
Gambar 2.3.1. Perbandingan Kondisi Kemiskinan Kelompok Negara Berpendapatan Menengah Ke Atas (<i>Upper Middle Income Countries</i>)	23
Gambar 3.1 Informasi GIC di DIY.....	29
Gambar 3.1.1 Distribusi Pengeluaran Penduduk 40 Persen Terendah Menurut Daerah dan Kreteria Bank Dunia, Maret 2018-Maret 2019.....	32
Gambar 3.1.2 Rasio Pengeluaran Penduduk pada kelompok 20 persen tertinggi di dibandingkan Kelompok 20 persen terendah, 2018-2019.....	33
Gambar 3.2.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin DIY, Maret 2016-2020.....	34
Gambar 3.2.2 Perkembangan Tingkat Kemiskinan DIY dan Indonesia per Maret Tahun 2016 – 2020 (dalam persen).....	37
Gambar 3.3.1 Jumlah Penduduk Miskin di Perkotaan dan Perdesaan DIY (2018 – 2020)	41
Gambar 3.3.2. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Perkotaan dan Perdesaan DIY, Tahun 2018 – 2020.....	41
Gambar 3.4.1. Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di DIY, Tahun 2018 – 2019 (Ribu)	45
Gambar 4.3.2.1 Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Akses Kelayakan Air Minum, Tipe Wilayah dan Kab/Kota.....	71
Gambar 4.3.2.2 Persentase Rumah Tangga Miskin Menurut Penggunaan Jamban Sendiri/Bersama Menurut Kabupaten/Kota,2019	72
Gambar 5.3.2.1 Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten/kota dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2019.....	92
Gambar 5.3.2.2 Persentase Desa/Kelurahan yang Sumber Penghasilan Utama Penduduk dari Pertanian atau yang Tidak Memiliki Produk Unggulan, Podes 2018.....	93
Gambar 5.3.2.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Kabupaten/kota, Agustus 2019.....	94
Gambar 6.3.1 Distribusi Rumah Tangga Penerima Kredit Menurut Desil.....	124
Gambar 6.3.2: Distribusi Rumah Tangga Penerima Bantuan Pemerintah Daerah (Pemda) Menurut Kuantil Pengeluaran dan Tipe Daerah di DIY, 2019.....	127
Gambar 7.2.1. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Terdampak Covid-19 di DIY, 2020.....	135

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Kemiskinan berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan dan penghidupan manusia, baik aspek ekonomi, politik, sosial budaya, psikologi, teknologi, dan lainnya, yang saling terkait secara erat satu dengan lainnya (Yunus, 2007). Oleh karenanya, upaya pengentasan kemiskinan membutuhkan waktu, strategi, dan sumber daya yang perlu disinergikan untuk menyelesaikannya. Salah satu dasarnya adalah tersedianya data yang baik. Kebijakan pengentasan kemiskinan yang disusun saat ini tidak lagi bersifat seragam namun perlu memperhatikan kondisi setiap dimensi penyebab kemiskinan suatu wilayah. Dengan sumber daya yang terbatas, penyelesaian dimensi kemiskinan perlu berfokus dan menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Tujuan Penyusunan Analisis Kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah mendapatkan informasi profil kemiskinan dan mengidentifikasi determinan kemiskinan serta program perlindungan sosial terkait di Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun tujuan khusus dari Analisis Kemiskinan DIY adalah:

1. Menyusun klasifikasi penduduk menurut tingkat kesejahteraan yang dilihat dari pengeluaran per kapita penduduk, seperti menurut desil, kuantil dan persentil, garis kemiskinan.
2. Menyusun profil rumah tangga dan penduduk yang termasuk kategori miskin di DIY diantaranya aspek demografi, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.
3. Menganalisis variasi kemiskinan menurut wilayah perkotaan dan perdesaan.
4. Menganalisis variasi kemiskinan menurut kabupaten/kota.
5. Mendapatkan determinan atau faktor penyebab kemiskinan yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan memperhitungkan dampak COVID-19 di DIY.
6. Melakukan analisis makro terhadap distribusi program penanggulangan kemiskinan menurut desil, kuantil dan persentil.

Penurunan tingkat kemiskinan di DIY secara umum telah menunjukkan tren yang positif, meskipun dengan adanya pandemi Covid-19, ada kecenderungan meningkat kembali. Beberapa wilayah, penurunan kemiskinan masih menghadapi kendala. Berdasarkan analisis yang dilakukan, penting sekali melakukan identifikasi faktor-faktor penyebab kemiskinan secara spesifik di setiap daerah dan disertai dengan penyusunan dan pelaksanaan strategi serta kebijakan yang tepat dan efisien.

1. Pada wilayah dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi terdapat kondisi dan faktor khusus yang menyebabkan terperangkap dan sulit keluar dari kondisi kemiskinan. Wilayah tersebut dihadapkan pada kondisi keterisolasian akibat kondisi topografi yang menyulitkan aksesibilitas dan kondisi kerentanan yang memicu terhambatnya ruang gerak penduduk. Pembangunan layanan akan menyebabkan lambatnya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Ketidakberdayaan wilayah dalam memaksimalkan potensi sehingga munculnya ketergantungan pada wilayah lain. Keberadaan kondisi kelemahan

fisik diindikasikan dengan rendahnya kualitas SDM. Kemiskinan materi berpengaruh langsung pada penanggulangan kemiskinan.

2. Strategi dan program penanggulangan kemiskinan di daerah telah dilaksanakan oleh pemerintah pusat ataupun daerah. Kondisi kemiskinan yang tinggi disertai dengan kuatnya faktor penyebab kemiskinan semakin mempersulit keluar dari kemiskinan. Inovasi program penanggulangan di daerah merupakan sebuah terobosan yang mencakup strategi dan kebijakan pembangunan afirmatif. Program-program inovasi dapat direplikasi dan diadaptasi oleh daerah lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Strategi kebijakan yang *pro poor growth* dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dengan memberikan perlakuan khusus pada wilayah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Meningkatkan keterlibatan dari masyarakat dalam perumusan strategi dan kebijakan implementatif di lapangan mutlak dilakukan agar akselerasi penurunan kemiskinan dapat diwujudkan.

TUJUAN KHUSUS ANALISIS KEMISKINAN DIY



1

Menyusun klasifikasi penduduk menurut tingkat kesejahteraan yang dilihat dari pengeluaran per kapita penduduk, seperti menurut desil, kuantil dan persentil, garis kemiskinan.

2

Menyusun profil rumah tangga dan penduduk yang termasuk kategori miskin di DIY, seperti aspek demografi, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

3

Menganalisis variasi kemiskinan menurut wilayah perkotaan dan perdesaan.ekonomi.

4

Menganalisis variasi kemiskinan menurut kabupaten/kota.

5

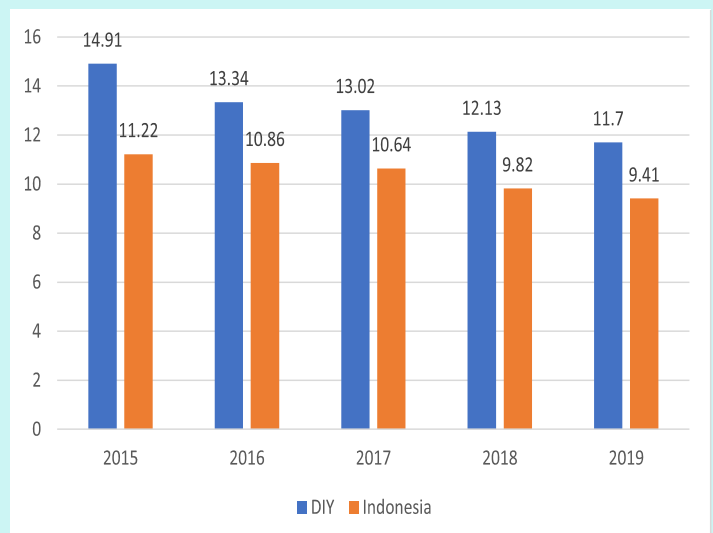
Mendapatkan determinan atau faktor penyebab kemiskinan yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan memperhitungkan dampak COVID-19 di DIY.

6

Melakukan analisis makro terhadap distribusi program penanggulangan kemiskinan menurut desil, kuantil dan persentil.



**Tingkat Kemiskinan DIY dan Indonesia
per Maret Tahun 2015 – 2019
(dalam persen)**





BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah harus menempatkan manusia sebagai pusat perhatian dan pada proses implementasinya harus menguntungkan semua pihak. Pembangunan adalah suatu proses perubahan menuju ke arah yang lebih baik dan terus menerus untuk mencapai tujuan yakni mewujudkan masyarakat yang berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera. Faktanya pembangunan yang dilakukan terdistorsi oleh kemiskinan. Kemiskinan juga dianggap sebagai bentuk permasalahan pembangunan yang diakibatkan adanya dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang sehingga memperlebar kesenjangan pendapatan antar masyarakat maupun kesenjangan pendapatan antar daerah (*inter region income gap*) (Harahap, 2006).

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata penduduk di suatu wilayah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun tempat tinggal. Kemampuan pendapatan yang rendah juga berdampak pada berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan. Oleh karena itu kemiskinan perlu mendapat perhatian utama dan penanganan yang serius dari semua pihak karena dampaknya bisa berubah menjadi kerawanan wilayah apalagi dengan disertai dengan tingkat kesenjangan yang tinggi.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sangat perhatian terhadap permasalahan kemiskinan yang terjadi. Fakta yang tidak bisa dipungkiri bahwa tingkat kemiskinan DIY, angkanya masih di atas nasional dan tertinggi se-pulau Jawa. Kondisi ini diperparah dengan adanya pandemi covid-19 yang membawa dampak langsung pada semua sendi kehidupan mulai tata hubungan sosial, cara bekerja dan pola interaksi serta proses perekonomian wilayah. Ketidakpastian akhir pandemi ini juga berimbas pada penyesuaian strategi penanganan kemiskinan,

sehingga deferensasi informasi kemiskinan sangat dibutuhkan agar penanganan kemiskinan menjadi lebih realistis dan tepat guna.

Fenomena paradoks DIY memantik semua pihak terutama pemerintah daerah untuk memahami karakteristik kemiskinannya. Determinasi terus dilakukan dengan melibatkan semua pihak untuk mengetahui berbagai faktor penyebab kemiskinan dan karakteristik penduduk miskin itu sendiri. Upaya ini diharapkan bisa membedah kemiskinan DIY dan keunikan fenomena kemiskinan di tengah capaian pembangunan DIY yang fenomenal.

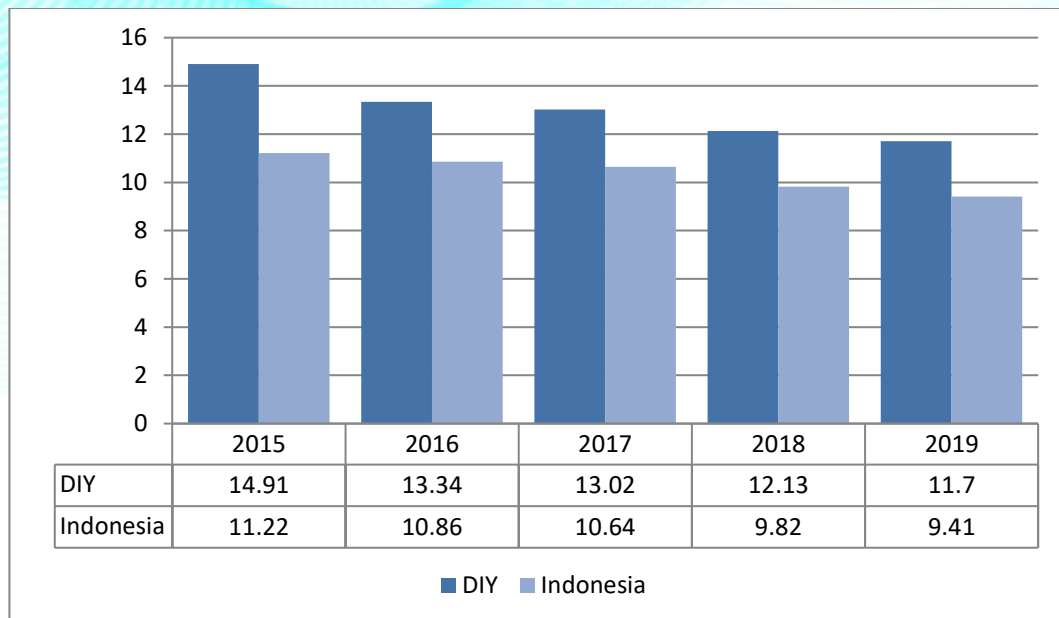
Penduduk miskin ini tergolong penduduk pada strata pengeluaran terbawah. Dinamika yang melingkupi penduduk miskin ini apabila dibandingkan dengan penduduk pada strata pengeluaran di atasnya akan memberikan informasi yang holistik terkait kecepatan dalam menikmati kue pembangunan. Perkembangan pengeluaran penduduk pada setiap level ini baik secara desil maupun kuantil apalagi dirinci menurut wilayah akan memberikan gambaran perkembangan tingkat kesejahteraan penduduk pada setiap levelnya, antar waktu maupun antar wilayah, sehingga skala prioritas maupun fokus penanganannya akan lebih mudah.

Menilik kompleksitas kemiskinan dan pemecahannya serta sifat multidimensinya ini memacu semua pihak untuk menyiapkan informasi kemiskinan yang terstruktur dan holistik serta berbasis wilayah. Upaya ini dapat dilakukan dengan melakukan analisis kemiskinan wilayah. Wilayah ini dalam lingkup DIY.

Tingginya angka kemiskinan DIY juga masih menjadi salah satu isu strategis daerah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY Tahun 2017 – 2022. Tingkat kemiskinan yang diukur dengan angka kemiskinan di DIY cenderung mengalami penurunan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1.1. Angka kemiskinan tersebut dihitung berdasarkan perhitungan kemiskinan makro yang merupakan persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dibandingkan keseluruhan jumlah penduduk. Garis kemiskinan adalah nilai pengeluaran minimum yang harus dikeluarkan seorang penduduk untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar minimumnya. Meskipun cenderung mengalami penurunan namun angka kemiskinan DIY selalu di atas tingkat nasional. Pada tahun 2015, angka kemiskinan DIY sebesar 14,91% sedangkan nasional mencapai 11,22%. Sementara pada tahun 2019 angka kemiskinan DIY sebesar 11,70% dan

nasional sebesar 9,41%. Penurunan drastis tingkat kemiskinan di DIY terjadi pada tahun 2016, yang angkanya turun sekitar 1,57 poin dari tahun sebelumnya.

Gambar 1.1.1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan DIY dan Indonesia per Maret Tahun 2015 – 2019(dalam persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik

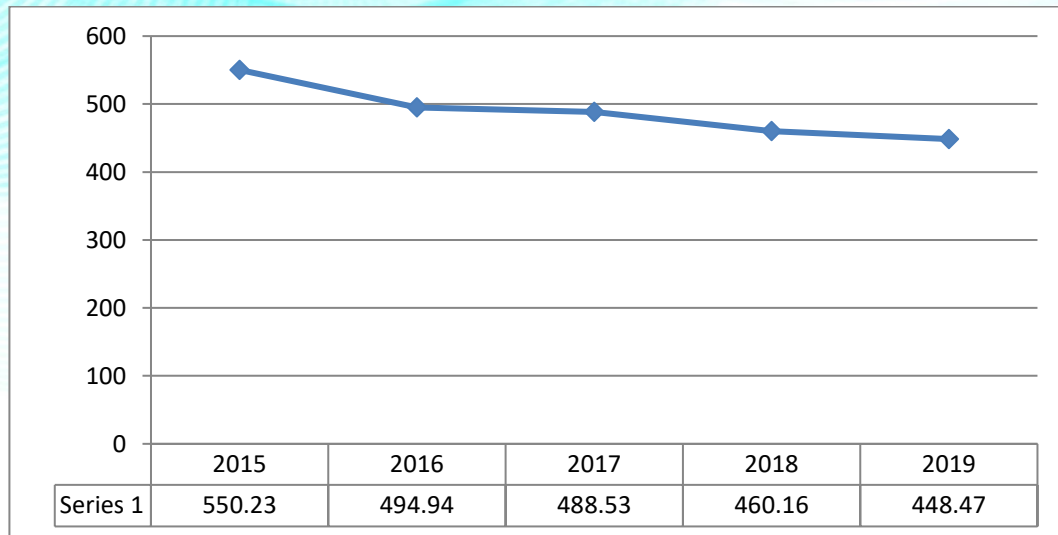
Gambar 1.1.2 menunjukkan bahwa jumlah warga miskin di DIY juga cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun (Gambar 1.2). Jumlah penduduk miskin di tahun 2015 adalah 550.230 orang sedangkan di tahun 2019 turun menjadi 448.470 orang. Penurunan jumlah penduduk miskin paling besar adalah tahun 2016 dengan penurunan sekitar 10,05% dari tahun 2015. Secara rata-rata, penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 3,47% selama tahun 2015 – 2019.

Tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin menurun tetapi capaian di tahun 2018 dan 2019 masih di bawah target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah DIY tahun 2017 – 2022. Adapun target yang diamanatkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah tersebut adalah seperti pada Tabel 1.1.1.

Pada akhir periode RPJMD, tingkat kemiskinan ditargetkan sebesar 7,0 persen dengan penurunan rata-rata sekitar 1 poin persen. Sementara itu target jumlah penduduk miskin di tahun 2022 adalah 278.509 orang dengan penurunan

rata-rata 12,76 persen. Perbandingan antara target dan capaian tingkat kemiskinan disajikan pada Tabel 1.1.1

Gambar 1.1.2. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin DIY per Maret Tahun 2015 – 2019 (dalam ribu orang)



Sumber: Badan Pusat Statistik

Prediksi kinerja penurunan tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin sampai akhir periode RPJMD diperkirakan target kedua indikator tersebut agak sulit tercapai. Tingkat kemiskinan harus tumbuh negatif sekitar 1,06 persen per tahun sedangkan tren penurunan selama lima tahun terakhir menunjukkan tingkat penurunan hanya sekitar 0,66 persen. Jumlah penduduk miskin harus tumbuh negatif sebesar 12,76 persen sedangkan tren penurunannya selama lima tahun terakhir hanya sekitar 3,74 persen.

Bila kita perhatikan jumlah penduduk miskin di DIY paling banyak berada di daerah perkotaan. Pada Maret 2019, jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan DIY tercatat sebanyak 304,66 ribu orang atau lebih dari dua kali lipat jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan yang banyaknya 143,81 ribu orang. Meskipun demikian, secara persentase jumlah penduduk miskin di perdesaan lebih banyak dibandingkan di perkotaan, dimana angkanya mencapai 13,89 persen. Sementara itu, pada saat yang sama, persentase penduduk miskin di perkotaan sebanyak 10,89 persen.

Tabel 1.1.1 Target Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin dalam RPJMD 2017 – 2022

Indikator	Target Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Target:					
Tingkat Kemiskinan (%)	11,23	10,19	9,11	8,07	7,0
Penduduk Miskin (Orang)	484.947	376.260	343.101	309.021	278.509
Capaian:					
Tingkat Kemiskinan (%)	12,13	11,70			
Penduduk Miskin (Orang)	460,16	448,47			

Pada periode setahun terakhir atau Maret 2018 - Maret 2019, jumlah dan persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan menunjukkan penurunan. Pada Maret 2018, jumlah penduduk miskin perkotaan tercatat sebanyak 305,24 ribu orang dan pada Maret 2019 meningkat menjadi 304,66 ribu orang. Secara persentase, tingkat kemiskinan di perkotaan juga menunjukkan pola yang sama dengan pergerakan jumlah penduduk miskin secara absolut. Pada Maret 2018, persentase penduduk miskin di perkotaan sekitar 11,03 persen dan mengalami penurunan menjadi 10,89 persen pada Maret 2019. Sementara itu, pada periode yang sama, jumlah dan persentase penduduk miskin di perdesaan juga menunjukkan tren penurunan. Selama satu tahun terakhir, jumlah penduduk miskin di perdesaan mengalami penurunan dari 154,86 ribu orang pada Maret 2018 menjadi 143,81 ribu orang pada Maret 2019. Selama satu tahun terakhir, persentase penduduk miskin perdesaan turun dari 15,12 persen menjadi 13,89 persen.

Variasi kemiskinan yang lain juga terjadi di DIY, seperti antar kabupaten/kota, antar tingkat pendidikan, kesehatan, dan determinan lain, termasuk jaminan sosial yang ada. Oleh karena itu menarik untuk dilaksanakan analisis kemiskinan di DIY berupa profil kemiskinan sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan DIY. Profil kemiskinan dari dimensi demografi, kesehatan, pendidikan serta dimensi ekonomi dari penduduk miskin. Dalam analisis ini juga dibahas variasi kesejahteraan (dilihat dari

pengeluaran per kapita) antar wilayah dan faktor determinan lain dari kemiskinan, termasuk perlindungan sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Analisis Kemiskinan DIY adalah mendapatkan informasi profil kemiskinan dan mengidentifikasi determinan kemiskinan serta program perlindungan sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan khusus dari Analisis Kemiskinan DIY adalah:

1. Menyusun klasifikasi penduduk menurut tingkat kesejahteraan yang dilihat dari pengeluaran per kapita penduduk, seperti menurut desil, kuantil dan persentil, garis kemiskinan
2. Menyusun profil rumah tangga dan penduduk yang termasuk kategori miskin di DIY, seperti aspek demografi, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.
3. Menganalisis variasi kemiskinan menurut wilayah perkotaan dan perdesaan.
4. Menganalisis variasi kemiskinan menurut kabupaten/kota.
5. Mendapatkan determinan atau faktor penyebab kemiskinan yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan memperhitungkan dampak COVID-19 di DIY.
6. Melakukan analisis makro terhadap distribusi program penanggulangan kemiskinan menurut desil, kuantil dan persentil.

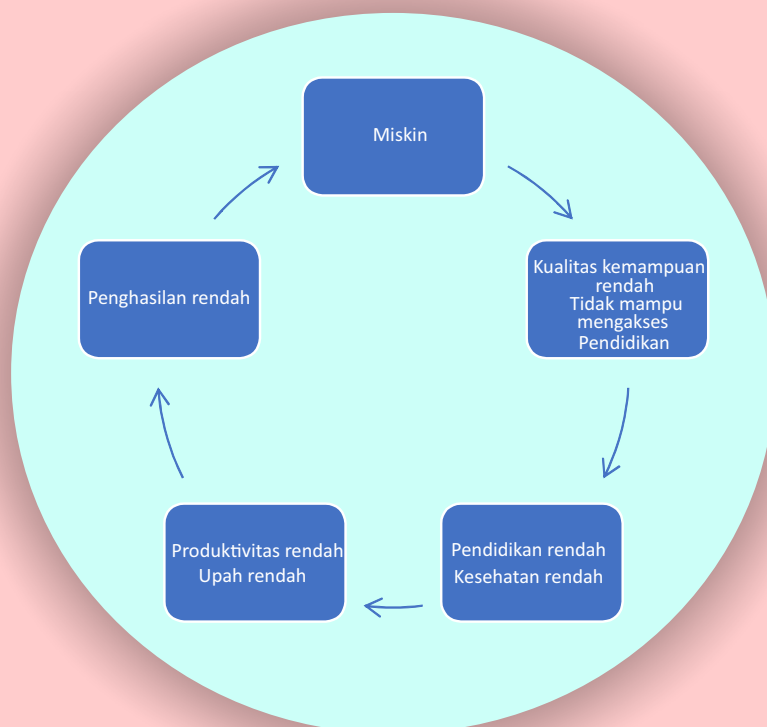
1.3.Referensi Hukum

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

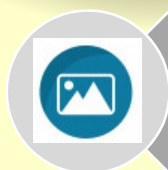
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 99 tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2019 tentang Standar Harga Barang dan Jasa tahun 2020.



LINGKARAN KEMISKINAN



PENYEBAB KEMISKINAN



Faktor kondisi alam dan lingkungan, seperti meningkatnya kerusakan lingkungan, distribusi sumber daya yang tidak merata, dan bencana alam yang sering terjadi.



Faktor penduduk, yaitu tingginya pertumbuhan penduduk sehingga menekan sumber daya alam dan adanya migrasi penduduk dari perdesaan ke perkotaan.



Faktor eksploitasi yang terjadi antarkelas, antarkelompok, antarwilayah, dan antarnegara, termasuk adanya hubungan ekonomi internasional yang tidak seimbang antara negara maju dan negara berkembang.



Faktor kelembagaan dan struktural seperti adanya berbagai kebijakan pemerintah yang tidak tepat dan cenderung mengabaikan daerah perdesaan.



Faktor teknologi yang merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam mendorong dan meningkatkan produktivitas usaha tani atau pertanian, yang juga merupakan mata pencaharian utama dari mayoritas penduduk perdesaan termasuk di dalamnya penduduk miskin di negara berkembang.



BAB II

LANDASAN TEORI DAN METODOLOGI

Acapkali kemiskinan dihubungkan dengan keterbelakangan dan ketertinggalan. Kemiskinan juga merupakan salah satu problem sosial yang serius. Oleh karena itu upaya mencari solusi yang relevan dalam pemecahan masalah kemiskinan dapat dimulai dari teori kemiskinan dan metodologi yang dipergunakan.

2.1 Konsep dan Definisi Kemiskinan

Kemiskinan memiliki banyak definisi, dan sebagian besar sering mengaitkan konsep kemiskinan dengan aspek ekonomi. Berbagai upaya untuk mendefinisikan kemiskinan dan mengidentifikasikan kemiskinan dapat dipandang dari sudut pengukuran yaitu kemiskinan absolut dan relatif. Salah satu syarat penting agar suatu kebijakan pengentasan kemiskinan dapat tercapai maka harus ada kejelasan mengenai kriteria tentang siapa atau kelompok penduduk mana yang masuk ke dalam kategori miskin dan menjadi sasaran program.

Pada dasarnya kemiskinan identik dengan dengan taraf hidup yang rendah, yang menggambarkan suatu keadaan di mana penghidupan penduduk ditandai oleh serba kekurangan akan kebutuhan pokok. Menurut Widodo (1997) menjelaskan bahwa konsep kebutuhan dasar selalu dikaitkan dengan kemiskinan karena masalah kemiskinan merupakan obsesi bangsa dan persoalan amat mendasar yang harus ditangani. Penduduk miskin umumnya tidak berpenghasilan cukup, bahkan tidak berpenghasilan sama sekali. Penduduk miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya pada kegiatan ekonomi sehingga tertinggal dari masyarakat lainnya.

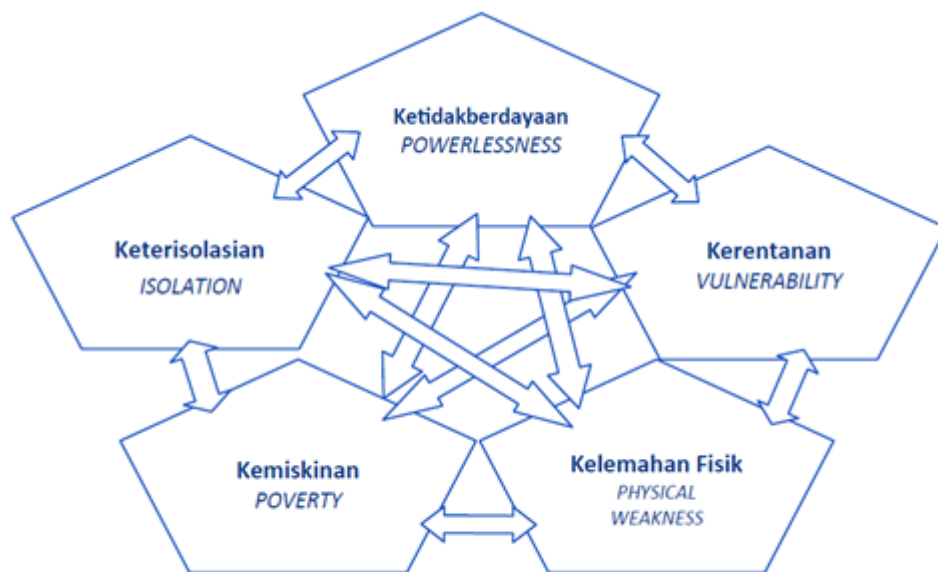
Lebih lanjut Emil Salim (dalam Supriatna, 1997) mengemukakan lima karakteristik penduduk miskin. Kelima karakteristik penduduk miskin tersebut yaitu:

- a. Tidak memiliki faktor produksi sendiri.
- b. Tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri.

- c. Tingkat pendidikan pada umumnya rendah,
- d. Banyak di antara mereka yang tidak mempunyai fasilitas, dan
- e. Di antara mereka berusia relatif muda dan tidak mempunyai keterampilan atau pendidikan yang memadai

Pemahaman tentang kemiskinan, termasuk didalamnya terkait bagaimana mengukur kemiskinan, terus mengalami perkembangan. Robert Chambers (1984) misalnya, mengemukakan pandangannya tentang kemiskinan khususnya di wilayah perdesaan. Menurutnya, kemiskinan merupakan klaster dari berbagai kondisi kurang menguntungkan yang saling berkaitan satu sama lain, dan menyebabkan seseorang terperangkap serta sulit keluar dari kondisi kemiskinan. Kondisi kurang menguntungkan tersebut meliputi kelemahan fisik, kerentanan terhadap guncangan, keterisolasian, ketidakberdayaan, dan kemiskinan itu sendiri.

Gambar 2.1.1. Perangkat Kemiskinan



Sumber: Robert Chambers (1984) *Rural Development: putting the last first*, p. 112.

Definisi kemiskinan yang dikemukakan oleh Chambers tersebut adalah definisi yang saat ini mendapatkan perhatian dalam setiap program pengentasan kemiskinan di berbagai negara-negara berkembang dan dunia ketiga. Pandangan yang dikemukakan dalam definisi kemiskinan dari Chambers menerangkan bahwa kemiskinan adalah suatu kesatuan konsep (*integrated concept*) yang memiliki lima dimensi, yaitu:

- a. Kemiskinan

Permasalahan kemiskinan seperti halnya pada pandangan semula adalah kondisi ketidakmampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhankebutuhan pokok. Konsep atau pandangan ini berlaku tidak hanya pada kelompok yang tidak memiliki pendapatan, akan tetapi dapat berlaku pula pada kelompok yang telah memiliki pendapatan.

b. Ketidakberdayaan

Pada umumnya, rendahnya kemampuan pendapatan akan berdampak pada kekuatan sosial (social power) dari seseorang atau sekelompok orang terutama dalam memperoleh keadilan ataupun persamaan hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

c. Kerentanan menghadapi situasi darurat

Seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tidak memiliki atau kemampuan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga di mana situasi ini membutuhkan alokasi pendapatan untuk menyelesaikannya. Misalnya, situasi rentan berupa bencana alam, kondisi kesehatan yang membutuhkan biaya pengobatan yang relatif mahal, dan situasi-situasi darurat lainnya yang membutuhkan kemampuan pendapatan yang dapat mencukupinya. Kondisi dalam kemiskinan dianggap tidak mampu untuk menghadapi situasi ini.

d. Ketergantungan

Keterbatasan kemampuan pendapatan ataupun kekuatan sosial dari seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tadi menyebabkan tingkat ketergantungan terhadap pihak lain adalah sangat tinggi. Mereka tidak memiliki kemampuan atau kekuatan untuk menciptakan solusi atau penyelesaian masalah terutama yang berkaitan dengan penciptaan pendapatan baru. Bantuan pihak lain sangat diperlukan untuk mengatasi persoalan-persoalan terutama yang berkaitan dengan kebutuhan akan sumber pendapatan.

e. Keterasingan

Dimensi keterasingan seperti yang dimaksudkan oleh Chambers adalah faktor lokasi yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Pada umumnya, masyarakat yang disebut miskin ini berada pada daerah yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan sebagian besar fasilitas kesejahteraan lebih banyak terkonsentrasi di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi seperti di perkotaan atau kota-kota besar. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh fasilitas-fasilitas kesejahteraan relatif memiliki taraf hidup yang rendah sehingga kondisi ini menjadi penyebab adanya kemiskinan.

Badan Pusat Statistik menerapkan konsep mengenai kemiskinan tersebut dengan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Penggunaan konsep tersebut pertama kali direkomendasikan di New York pada tahun 1936 setelah Seeborn Rowntree melakukan sejumlah penelitian yang berhubungan dengan pola konsumsi komunitas di New York. Rekomendasi tersebut juga mendapat persetujuan yang lebih kuat dari UN setelah pertemuan para ahli yang diinisiasi oleh FAO dan WHO di Roma, Italia, pada tahun 2001 dan 2005 (UNESCAP, 2017). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan

dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

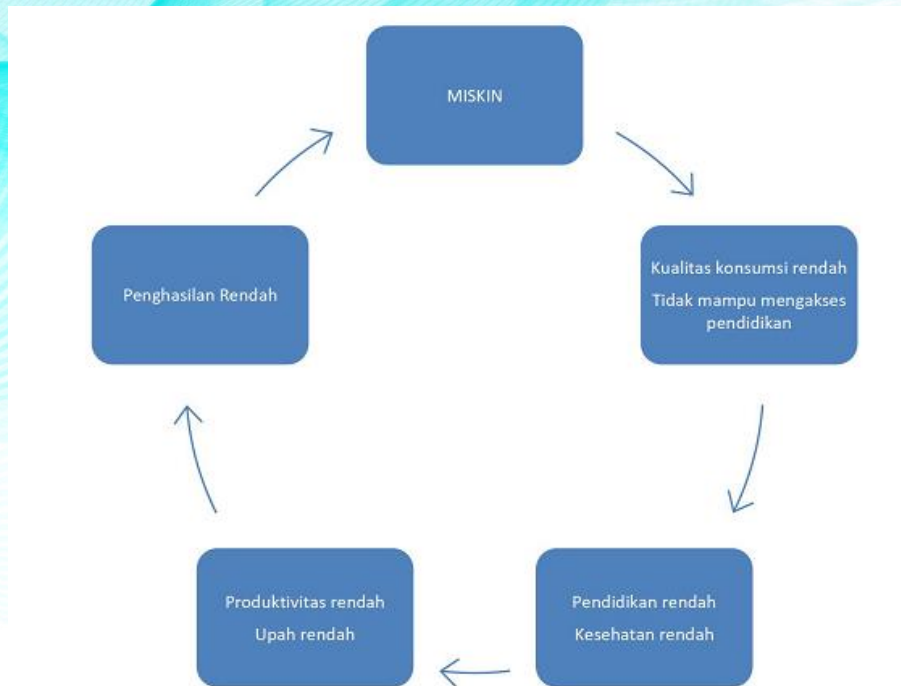
Tetapi sebenarnya kemiskinan ekonomi terkait dengan kondisi yang jauh lebih luas dari sekedar penurunan pendapatan dan aset sebagaimana Bank Dunia mendefinisikan sebagai berikut:

“Poverty is hunger. Poverty is lack of shelter. Poverty is being sick and not being able to go to school and not knowing to know how to read. Poverty is not having job, is fear for the future, living one day at a time. Poverty is losing a child to illness bring about by unclean water. Poverty is powerlessness, lack of representation and freedom”

“Kemiskinan berkaitan dengan ketiadaan tempat tinggal, rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan. Kemiskinan berkaitan dengan ketiadaan lapangan pekerjaan. Kemiskinan berkaitan dengan kehilangan anak karena penyakit yang disebabkan oleh ketiadaan akses terhadap air bersih. Kemiskinan adalah ketidakberdayaan, dan kurangnya keterwakilan atau representasi, dan kebebasan”.

Kemiskinan juga dapat dibedakan berdasarkan faktor penyebabnya yaitu: (1) kemiskinan alamiah; (2) kemiskinan struktural; dan 3) kemiskinan kultural. Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang terjadi karena faktor alam dan geografis yang tidak mendukung, misalnya karena kondisi alam yang gersang (kering dan tidak teratur), sumber daya alam yang terbatas, dan wilayah yang terisolasi. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang terjadi akibat kesalahan dalam kebijakan pemerintah. Sebagai contoh, kebijakan ‘*urban bias*’ yang didefinisikan oleh Michael Lipton (1977) sebagai penyebab dari tetap tingginya kemiskinan di daerah pedesaan. Sedangkan kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang terjadi akibat faktor sosial kultural di suatu masyarakat. Dengan adanya faktor-faktor sosial kultural tersebut, masyarakat semakin terperangkap di dalam kondisi kemiskinan dan seolah-olah telah menjadi budaya masyarakat. Oscar Lewis (1969) menyebutnya sebagai budaya kemiskinan.

Gambar 2.1.2. Lingkaran Kemiskinan



2.2 Ukuran dan Indikator Kemiskinan

2.2.1. Metodologi

Salah satu definisi mengenai kemiskinan difokuskan pada ketidakmampuan seseorang untuk mendapatkan sejumlah komoditi makanan dan kebutuhan dasar lainnya (UNSD, 2005). Meskipun dianggap menyempitkan makna dari kemiskinan itu sendiri, namun mengingat sisi kepraktisannya maka ukuran inilah yang sampai sekarang banyak digunakan. Selain itu, beberapa konsep kemiskinan lainnya sukar untuk diukur dan pada dasarnya masih sangat terkait dengan kemampuan keuangan dari seseorang.

Di Indonesia, konsep mengenai kemiskinan tersebut diadopsi dengan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach). Besaran nilai kebutuhan dasar minimum tersebut ditentukan dengan menggunakan Garis Kemiskinan (GK), yaitu batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi makanan dan bukan makanan. Adapun besaran GK yang selama ini digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) terdiri dua komponen, yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan bukan makanan (GKNM).

2.2.1.1. Garis Kemiskinan

Sejumlah studi mengungkapkan bahwa bahwa tingkat pengeluaran rumah tangga yang diukur dalam bentuk uang berkorelasi positif dengan variabel kunci kemiskinan yang sulit diukur seperti status sosial, kesenjangan sosial dan aneka ragam variannya, serta akses terhadap fasilitas sosial maupun ekonomi (UNESCAP, 2017). Sejalan dengan hal tersebut, salah satu definisi mengenai kemiskinan difokuskan pada ketidakmampuan seseorang untuk mendapatkan sejumlah komoditi makanan dan kebutuhan dasar lainnya (UNSD, 2005). Meskipun dianggap menyempitkan makna dari kemiskinan itu sendiri, namun mengingat sisi kepraktisannya maka ukuran inilah yang sampai sekarang banyak digunakan.

Untuk mendapatkan GK di tingkat provinsi, BPS terlebih dahulu menentukan kelompok acuan sebanyak 20 persen dari penduduk dengan nilai konsumsi yang berada di atas garis kemiskinan sementara (GKS). GKS adalah GK pada periode sebelumnya yang telah dikalikan dengan faktor inflasi. Dari kelompok acuan tersebut kemudian dilakukan penghitungan nilai konsumsi terhadap 52 komoditas makanan yang kemudian disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung rata-rata kalori dari ke-52 komoditas tersebut. Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh GKM. Selanjutnya GKM tersebut disetarakan dengan 2.100 kilokalori dengan mengalikan 2.100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah dari penduduk referensi.

Adapun GKNM merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Nilai kebutuhan minimum per komoditi/subkelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/subkelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Selanjutnya, penjumlahan dari GKM dan GKNM menghasilkan GK.

Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah GK dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Adapun penghitungan GK untuk masing-masing kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

a. Garis Kemiskinan Sementara (GKS) untuk tingkat Kabupaten/Kota dihitung dengan rumus:

$$GKS_{ij\ t} = GKS_{ij\ t-1} \times (1 + E_j \times I_{ij})$$

Dimana:

$GKS_{ij\ t}$ = Garis kemiskinan sementara kabupaten/kota ke-i di provinsi ke-j di tahun t

$GKS_{ij\ t-1}$ = Garis kemiskinan kabupaten/kota ke-i di provinsi ke-j di tahun t-1

E_j = Elastisitas provinsi ke-j (rasio antara pertumbuhan garis kemiskinan provinsi ke-j terhadap inflasi provinsi ke-j)

I_{ij} = Inflasi kabupaten/kota ke-i di provinsi ke-j

Catatan:

- Untuk mencari GKS pada tingkat Kabupaten ke-i digunakan elatisitas provinsi ke-j di level perdesaan.
 - Untuk mencari GKS pada tingkat Kota ke-i digunakan elatisitas provinsi ke-j di level perkotaan.
 - Untuk kabupaten/kota yang bukan kota inflasi, laju inflasinya diperoleh dari kabupaten/kota yang berdekatan (pendekatan sister city).
- b. Menentukan P0 sementara kabupaten/kota ke-i di provinsi ke-j yaitu dengan cara mengalikan pertumbuhan P0 provinsi ke-j periode t ke t-1 dengan P0 kabupaten ke-i pada tahun t-1.
- c. Menetapkan Garis Kemiskinan dengan cara mencari titik potong antara GKS dan P0 sementara.
- d. Menghitung indikator kemiskinan dengan menggunakan formulasi Foster Greer Thorbecke (FGT).
- e. Melakukan prorata jumlah penduduk miskin kab/kota agar sama dengan angka provinsi yang telah dirilis sebelumnya.

2.2.1.2. Indikator Kemiskinan P0, P1 dan P2

Indikator-indikator yang biasa digunakan terkait dengan kemiskinan antara lain adalah persentase penduduk miskin (P0), indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2). Persentase penduduk miskin memberikan informasi mengenai proporsi penduduk yang termasuk dalam kategori miskin, yaitu perbandingan antara penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan terhadap total penduduk di wilayah tersebut.

Adapun indeks kedalaman kemiskinan (P1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Sementara itu, indeks keparahan kemiskinan (P2) adalah Indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Ketiga ukuran kemiskinan tersebut diperoleh melalui penghitungan dengan menggunakan formulasi FGT. Adapun formula FGT adalah:

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left(\frac{Z - y_i}{Z} \right)^{\alpha}$$

Dimana

$\alpha = 0, 1, 2$

Z = garis kemiskinan

y_i = rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i \leq Z$

q = banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

n = jumlah penduduk

Jika $\alpha = 0$ maka diperoleh Head Count Index (P0);

Jika $\alpha = 1$ diperoleh Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index P1)

Jika $\alpha = 2$ adalah Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index P 2).

2.3 Karakteristik Kemiskinan

Masyarakat miskin sesuai karakteristiknya menurut Kartasasmita (1993), umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya pada kegiatan ekonomi, sehingga semakin tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi. Sementara itu Chamber (1983:109)

mengemukakan lima karakteristik sebagai ketidak beruntungan (disadvantages) yang melingkupi orang miskin atau keluarga miskin antara lain: (a) *poverty*, (b) *physical weakness*, (c) *isolation*, (d) *powerlessness*.

Moeljarto (1995:98) mengemukakan tentang *Poverty Profile* sebagaimana berikut: Masalah kemiskinan bukan saja masalah *welfare* akan tetapi mengandung enam buah alasan antara lain : (a) Masalah kemiskinan adalah masalah kerentanan. (b) Kemiskinan berarti tertutupnya akses kepada berbagai peluang kerja karena hubungan produksi dalam masyarakat tidak memberi peluang kepada mereka untuk berpartisipasi dalam proses produksi. (c) Masalah ketidakpercayaan, perasaan impotensi, emosional dan sosial dalam menghadapi elit desa dan para birokrat yang menentukan keputusan menyangkut dirinya tanpa memberi kesempatan untuk mengaktualisasikan diri, sehingga membuatnya tidak berdaya. (d) Kemiskinan juga berarti menghabiskan sebagian besar penghasilannya untuk konsumsi pangan dalam kualitas dan kuantitas terbatas. (e) Tingginya rasio ketergantungan, karena jumlah keluarga yang besar. (f) Adanya kemiskinan yang diwariskan secara terus menerus

Pemahaman terhadap karakteristik kemiskinan dimaksudkan agar dapat pula mengetahui strategi program yang bagaimana yang relevan dengan upaya penanggulangan kemiskinan tersebut.

Kemiskinan umumnya memiliki karakteristik spesifik di masing-masing wilayah. Pada tahun 2017, Indonesia memiliki *Gross National Income* (GNI) per kapita sebesar 11.900 US\$ (PPP) yang masuk ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah ke atas (*upper middle income countries/UMIC*). Suatu negara masuk ke dalam kelompok UMIC jika GNI per kapita berkisar antara 4.036 – 12.475 US\$. Namun demikian, jika dibandingkan dengan beberapa negara lain yang juga masuk ke dalam UMIC, masing-masing negara termasuk Indonesia, memiliki karakteristik yang berbeda terkait kondisi kemiskinan seperti terlihat dalam Gambar 2.3.1.

Gambar 2.3.1. Perbandingan Kondisi Kemiskinan Kelompok Negara Berpendapatan Menengah Ke Atas (*Upper Middle Income Countries*)



Berdasarkan Gambar 2.3.1. dapat disimpulkan bahwa tingkat perekonomian di suatu negara tidak selalu sejalan dengan kondisi kemiskinannya. Menurut Quibria (1998), penduduk miskin memiliki beberapa karakteristik. Karakteristik pertama adalah kondisi geografis, yang tingkat kemiskinan tertinggi umumnya berada di wilayah perdesaan. Penduduk miskin di daerah perdesaan cenderung memiliki pendapatan dan daya konsumsi yang rendah, menderita kekurangan gizi, buta huruf, tinggi resiko terhadap kematian bayi, dan standar perumahan yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah perkotaan.

Hal ini sejalan dengan kondisi DIY yaitu tingkat kemiskinan di daerah perdesaan jauh lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan. Hal ini disebabkan kurangnya fasilitas umum seperti kesehatan, pendidikan, dan layanan keuangan yang menjangkau daerah-daerah sulit wilayah perdesaan. Kedua adalah karakteristik demografis. Rumah tangga miskin cenderung memiliki ukuran keluarga yang besar dengan jumlah anak yang lebih banyak. Namun, dengan pendapatan anggota keluarga yang terbatas dan jumlah tanggungan yang tinggi menyebabkan mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi seluruh anggota keluarga. Selain itu, pada rumah tangga dengan kepala keluarga perempuan, kecenderungan untuk berada pada kondisi kemiskinan menjadi lebih besar bila dibandingkan dengan rumah tangga pada umumnya (Killick, 1981). Jumlah rumah tangga sangat miskin di Indonesia yang memiliki kepala rumah

tangga seorang lanjut usia mencapai 29,7 persen (Susenas 2018). Karakteristik ketiga adalah karakteristik aset. Pendapatan seseorang memiliki keterkaitan dengan aset yang dimiliki, seperti lahan dan juga kualitas sumber daya manusianya. Dalam perekonomian yang mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian seperti Indonesia, lahan merupakan salah satu aset penting yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi. Namun, rumah tangga miskin umumnya tidak memiliki lahan dan/atau tidak memiliki sumber daya manusia yang mampu mengelola lahan tersebut (Adelman, 1986).

2.4 Penyebab Kemiskinan

Dalam tataran konsep, terdapat beberapa kelompok pandangan yang mengidentifikasi penyebab kemiskinan terutama di wilayah perdesaan. Konsep ini akan memperkaya pembahasan evaluasi penyebab kemiskinan.

Pertama, adalah kelompok pandangan ekonomi politik. Kelompok ini berpendapat bahwa munculnya kemiskinan perdesaan merupakan hasil dari proses pengkonsentrasian kekayaan dan kekuasaan. Proses tersebut terjadi melalui tiga tingkatan, yaitu: a) tingkat global, munculnya kemiskinan merupakan akibat hubungan pertukaran yang eksploitatif dan tidak seimbang antara negara kaya dan negara miskin sehingga negara miskin akan tetap menjadi miskin, meskipun tetap memperoleh manfaat dari investasi modal; b) tingkat nasional, kemiskinan perdesaan muncul sebagai akibat dari ulah beberapa kelompok kepentingan terutama kelompok kepentingan perkotaan, seperti kelompok berpendapatan menengah di perkotaan yang berusaha memperoleh keuntungan dengan mengorbankan kepentingan penduduk desa; dan c) tingkat lokal, kemiskinan perdesaan muncul sebagai akibat dari ulah para elit lokal - yang terdiri dari tuan tanah, pedagang, pelepas uang (*money lenders*), dan birokrat - yang terus mengkonsolidasikan kekuasaan dan kekayaan mereka.

Kedua, adalah kelompok pandangan ekologi. Kelompok ini melihat kemiskinan di perdesaan sebagai akibat dari pertumbuhan dan tekanan penduduk yang tidak terkendali atas sumber daya dan lingkungan. Adanya tekanan penduduk menyebabkan usaha pertanian menjadi semakin sempit. Hal ini mengakibatkan upah riil turun dan jumlah pengangguran meningkat. Sebagian tenaga kerja

terpaksa harus bermigrasi ke daerah perkotaan dan lingkungan marginal. Selain itu, para ahli ekologi fisik juga melihat karakteristik fisik dari kelompok miskin seperti kurang gizi, kondisi lingkungan yang tidak sehat, perumahan yang kurang layak, lingkungan yang kurang nyaman, dan kondisi iklim yang tidak menentu menjadi penyebab kemiskinan di perdesaan (Chambers, 1983). Kemiskinan juga disebabkan oleh kekurangan modal dalam arti luas. Sachs (2005) dalam bukunya *The End of Poverty*, menyatakan bahwa mereka yang termiskin dari yang miskin (miskin ekstrem) umumnya tidak memiliki salah satu dari enam jenis modal (SDM, bisnis, infrastruktur, sumber daya alam, kelembagaan publik, dan pengetahuan) yang menyebabkan kelompok miskin tersebut terperangkap ke dalam perangkap kemiskinan.

Dari berbagai pendapat para ahli, berbagai faktor penyebab kemiskinan, dapat dikelompokkan ke dalam beberapa faktor yaitu:

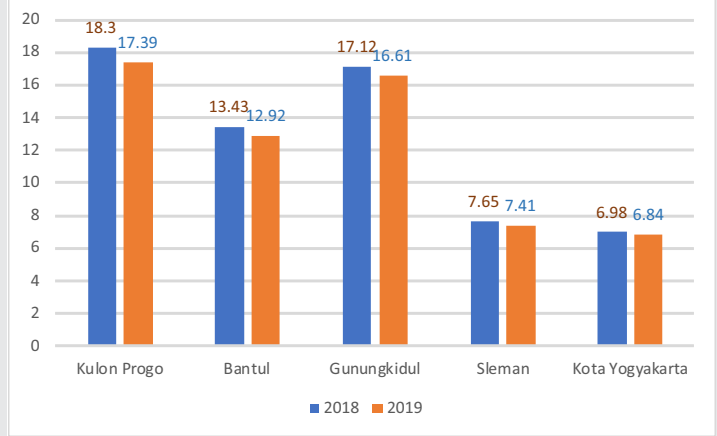
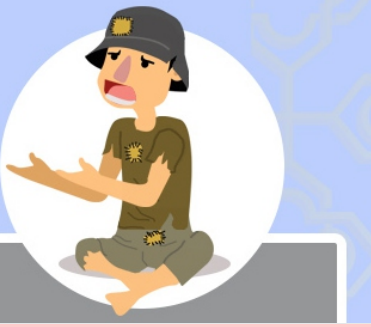
- ✓ Faktor kondisi alam dan lingkungan, seperti meningkatnya kerusakan lingkungan, distribusi sumber daya yang tidak merata, dan bencana alam yang sering terjadi.
- ✓ Faktor penduduk, yaitu tingginya pertumbuhan penduduk sehingga menekan sumber daya alam dan adanya migrasi penduduk dari perdesaan ke perkotaan.
- ✓ Faktor eksploitasi yang terjadi antarkelas, antarkelompok, antarwilayah, dan antarnegara, termasuk adanya hubungan ekonomi internasional yang tidak seimbang antara negara maju dan negara berkembang.
- ✓ Faktor kelembagaan dan struktural seperti adanya berbagai kebijakan pemerintah yang tidak tepat dan cenderung mengabaikan daerah perdesaan.
- ✓ Faktor teknologi yang merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam mendorong dan meningkatkan produktivitas usaha tani atau pertanian, yang juga merupakan mata pencaharian utama dari mayoritas penduduk perdesaan termasuk di dalamnya penduduk miskin di negara berkembang.

2.5. Sumber Data

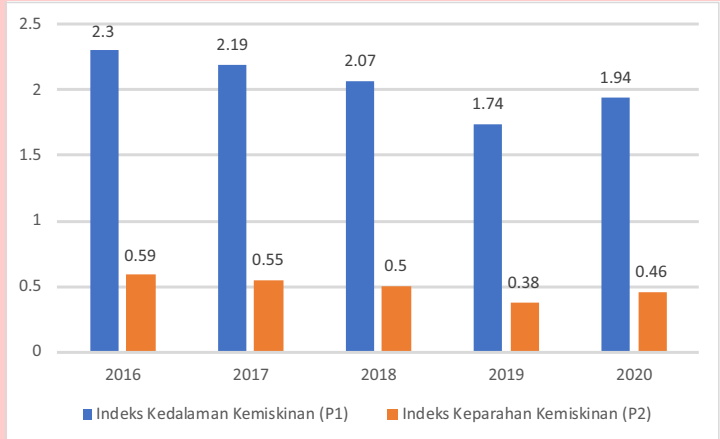
Analisis ini berdasarkan pengolahan lebih lanjut hasil Susenas 2017-2019, Sakernas 2019, Podes 2018, Updating Podes 2019, dilengkapi dengan data BPS lain yang relevan. Penyajian bersifat deskriptif berdasarkan tabel hasil pengolahan

lanjutan hasil survei BPS yang dikompilasi oleh tim penyusun. Program aplikasi pengolahan data yang digunakan berupa SPSS versi 20.

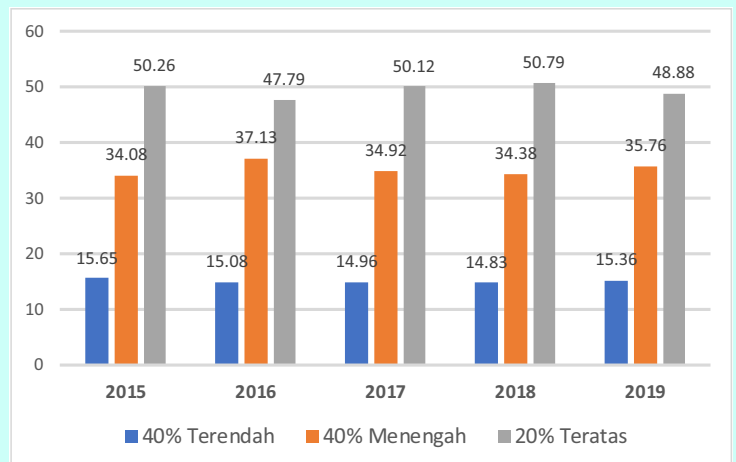
Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2018 – 2019



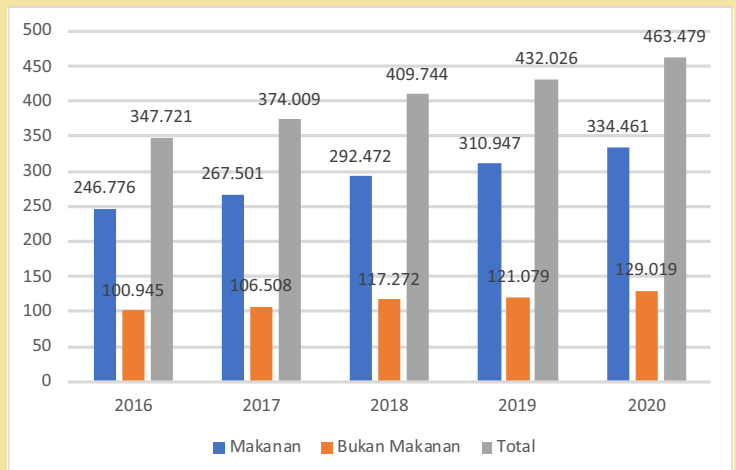
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di DIY, 2016 – 2020



Distribusi Pengeluaran Penduduk DIY Menurut Daerah dan Kreteria Bank Dunia



Garis Kemiskinan DIY, Tahun 2015-2019





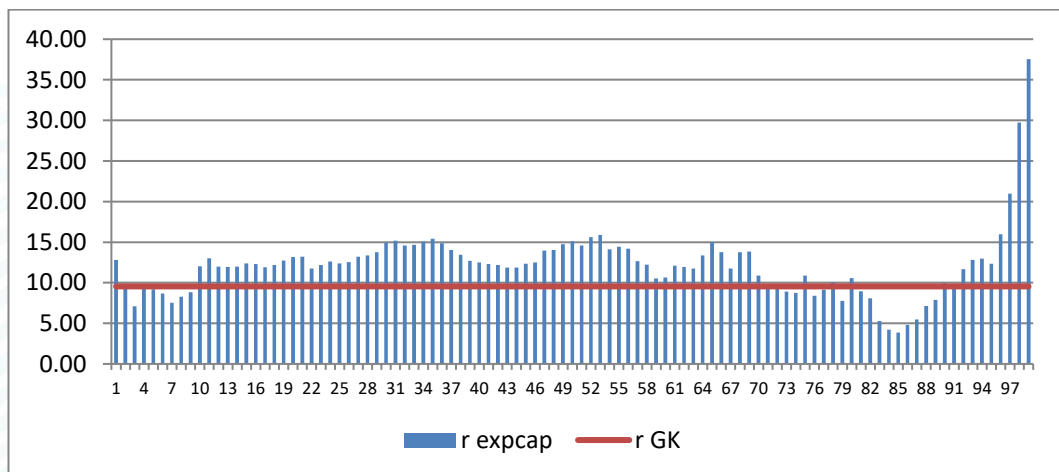
BAB III

DINAMIKA DAN VARIASI KEMISKINAN

Pendekatan kemiskinan yang diukur selama ini adalah kemiskinan moneter, dengan melihat ambang batas penentuan miskin atau tidak miskinnya penduduk berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan kebutuhan minimum yang diwakili oleh kemampuan konsumsi penduduk per kapita per bulan, baik konsumsi makanan maupun konsumsi non makanan. Apabila terjadi peningkatan kemiskinan, maka terdapat penambahan penduduk yang tidak bisa memenuhi kebutuhan minimum. Apabila pengeluaran per kapita-nya di bawah garis kemiskinan dan tidak bisa tumbuh melebihi perkembangan garis kemiskinan maka dia akan tetap terkategori miskin pada waktu berikutnya.

Terkait pola pertumbuhan konsumsi di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat melalui pertumbuhan konsumsi penduduk tiap persentil. Hal ini dikenal dengan *Growth Incidence Curve* (GIC). Kurva yang menunjukkan perkembangan pengeluaran konsumsi pada tiap persentil pengeluaran per kapita.

Gambar 3.1 Informasi GIC di DIY



GIC di DIY selama periode tahun 2017-2018 menunjukkan pertumbuhan pengeluaran konsumsi per kapita (r_{expcap}) kelompok 20 persen terbawah jauh lebih rendah dibandingkan dengan kelompok menengah ke atas, serta berada di bawah rata-rata pertumbuhan Garis Kemiskinan (r_{GK}). Bahkan, pada kelompok

persentil ke-2 sampai 10, GIC bernilai lebih kecil dari perkembangan garis kemiskinan, hal ini menunjukkan adanya penduduk yang tetap tertinggal dan miskin pada periode tersebut. Data tersebut juga menunjukkan bahwa penduduk pada persentil atas tampak mengalami pertumbuhan pengeluaran yang jauh lebih cepat di DIY. Meskipun demikian pada kelompok persentil 80-an juga tampak pertumbuhan pengeluarannya juga rendah, tetapi karena di kelompok ini relatif aman sehingga tidak tergolong ke dalam penduduk miskin.

3.1. Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Desil/Kuantil/Persentil Pengeluaran per Kapita

Ukuran kesejahteraan penduduk salah satunya dapat dilihat dari klasifikasi penduduk berdasarkan pengeluaran perkapita. Penduduk akan dikelompokkan berdasarkan pengeluaran perkapita. Desil bila penduduk dikelompok menjadi 10 bagian yakni 10 persen pengeluaran terbawah, 10 persen pengeluaran terbawah ke 2, terus meningkat hingga 10 persen pengeluaran teratas. Hal ini sebagai dasar untuk mengetahui ketimpangan sosial ekonomi yang ada pada setiap kelompok penduduk. Apakah seluruh kelompok penduduk sudah dapat mengakses infrastruktur, mempunyai kualitas SDM yang merata di seluruh kelompok atau kelompok tertentu jauh lebih tinggi dari kelompok penduduk terendah.

Bank dunia membagi kelompok penduduk menjadi tiga bagian besar yaitu 40 persen kelompok penduduk dengan pengeluaran perkapita terbawah, 40 persen menengah dan 20 persen teratas. Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk digambarkan berdasarkan porsi pengeluaran penduduk 40 persen terbawah terhadap seluruh pengeluaran penduduk. Ketimpangan pengeluaran tinggi jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terendah kurang dari 12 persen, ketimpangan sedang bila berada pada diantara 12 persen sampai dengan 17 persen dan ketimpangan pengeluaran rendah bila diatas 17 persen.

Perkembangannya, ketimpangan pengeluaran di DIY periode 2015-2019 cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2015-2018, porsi pengeluaran penduduk kelompok 40 persen terendah menunjukkan tren menurun setiap tahun. Akan tetapi pada tahun 2019, porsi pengeluaran kelompok 40 persen terbawah ini meningkat.

Di lain pihak, porsi pengeluaran penduduk kelompok 20 persen teratas juga berfluktuasi dan cenderung menurun setiap tahun (table 3.1.1).

Tabel 3.1.1 Distribusi Pengeluaran Penduduk Menurut Daerah dan Kreteria Bank Dunia, 2015-2019

Kelompok Penduduk	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40% Terendah	15.65	15.08	14.96	14.83	15.36
40% Menengah	34.08	37.13	34.92	34.38	35.76
20% Teratas	50.26	47.79	50.12	50.79	48.88

Sumber: BPS(Susenas 2015-2019)

Data Susenas Maret 2018-2019 menunjukkan bahwa pada tahun 2018-2019 ketimpangan pengeluaran menurut Bank Dunia tergolong ketimpangan sedang (*moderate inequality*). Namun demikian, pola berbeda bila dilihat menurut tipe wilayah. Ketimpangan pengeluaran di perdesaan masuk kategori rendah, sementara ketimpangan pengeluaran di perkotaan cenderung tinggi (gambar 3.1.1).

Variasi ketimpangan pengeluaran juga tampak pada ketimpangan pengeluaran menurut kabupaten/kota. Selama periode tahun 2018-2019, Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulonprogo masuk dalam kategori ketimpangan rendah. Pada tahun 2019 proporsi pengeluaran penduduk pada penduduk kelompok 40 persen terendah di Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulonprogo masing masing sebesar 20,63 persen dan 18,38 persen. Sementara itu, tiga kabupaten/kota lainnya tergolong ketimpangan sedang.

Gambar 3.1.1 Distribusi Pengeluaran Penduduk 40 Persen Terendah Menurut Daerah dan Kreteria Bank Dunia, Maret 2018- Maret 2019



Sumber: BPS(Susenas 2018-2019)

Distribusi pengeluaran antar kelompok penduduk secara umum juga dapat dilihat dari rasio pengeluaran kelompok 20 persen teratas(Q_5) dengan 20 persen terendah (Q_1). Semakin besar rasio (Q_5/Q_1), ketimpangan pendapatan/pengeluaran semakin tinggi). Tabel 3.1.2 menyajikan perkembangan ketimpangan pengeluaran menurut wilayah tempat tinggal periode tahun 2018-2019. Data menunjukkan bahwa, secara umum rasio pengeluaran kelompok 20 persen teratas terhadap 20 persen terendah relatif menurun. Hal ini terjadi juga baik di perkotaan maupun perdesaan. Artinya tingkat ketimpangan yang semakin rendah.

Pola yang sama juga ditunjukkan oleh perkembangan ketimpangan secara spasial. Seluruh kabupaten kota rasio pengeluaran kelompok 20 persen tertinggi terhadap 20 persen tertinggi pada periode 2018-2019 menunjukkan tren yang menurun. Penurunan tertinggi terjadi di Kota Yogyakarta dari 9,35 pada tahun 2018 menjadi 6,72 pada tahun 2019, sementara Kabupaten Kulonprogo tidak mengalami penurunan.

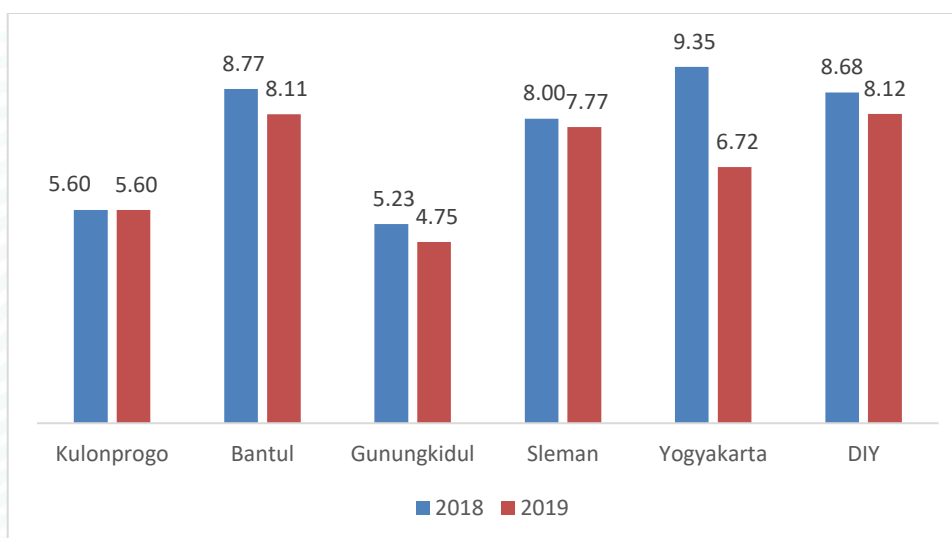
Tabel 3.1.2 Persentase Pembagian Pengeluaran Menurut Kelas Quintil dan Daerah, 2018-2019

Quintil	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+ Perdesaan	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)
Q ₁	4.44	4.22	12.54	14.68	5.85	6.02
Q ₂	7.02	7.68	18.30	17.27	8.98	9.34
Q ₃	11.33	12.43	22.58	20.29	13.29	13.79
Q ₄	19.64	18.83	27.97	37.01	21.09	21.97
Q ₅	57.58	56.83	18.61	10.75	50.79	48.88
Rasio(Q ₅ / Q ₁)	12.97	13.48	1.48	0.73	8.68	8.12

Sumber: BPS(Susenas 2018-2019)

Rasio antara pengeluaran kelompok 20 persen teratas terhadap 20 persen terbawah pada tahun 2019 tercatat rasio tertinggi adalah Kabupaten Bantul yakni 8,11 menggantikan posisi Kota Yogyakarta pada periode sebelumnya. Selanjutnya rasio terendah dalam 2 tahun terakhir adalah Kabupaten Gunungkidul yakni sebesar 4,75.

Gambar 3.1.2 Rasio Pengeluaran Penduduk pada kelompok 20 persen tertinggi di bandingkan Kelompok 20 persen terendah, 2018-2019



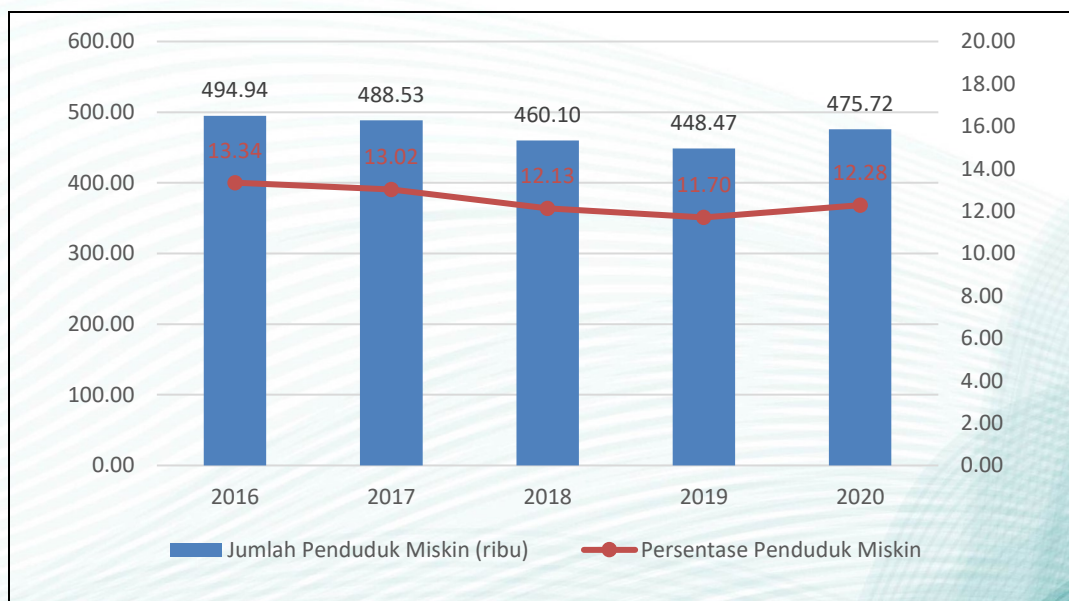
Sumber: BPS(Susenas 2018-2019)

3.2. Perkembangan Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional sehingga menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional. Berbagai program pembangunan yang dilaksanakan selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur.

Tingkat kemiskinan DIY pada periode Maret 2016 hingga Maret 2020 menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan yang semakin menurun baik dari sisi jumlah maupun persentase seperti disajikan pada Gambar 3.2.1. Tingkat kemiskinan Maret 2016 sebesar 13,34 persen, secara perlahan mengalami penurunan. Penurunan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2018 dimana persentase penduduk miskin turun dari 13,02 persen pada tahun 2017 menjadi 12,13 persen pada tahun 2018. Namun demikian, penurunan tingkat kemiskinan DIY tidak terjadi pada Maret 2020. Tingkat kemiskinan DIY pada Maret 2020 justru mengalami peningkatan menjadi 12,28 persen atau meningkat sebesar 0,58 persen poin dibandingkan Maret 2019.

Gambar 3.2.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin DIY, Maret 2016-2020



Sumber: Berita Resmi Statistik 2016-2020, BPS Provinsi DIY

Jumlah penduduk miskin di DIY pada Maret 2020 sebesar 475,72 ribu orang. Perkembangan jumlah penduduk miskin dari Maret 2016 hingga Maret 2020 dengan kecenderungan menurun kecuali pada kondisi Maret 2020 yang justru mengalami kenaikan. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2016 sebanyak 494,94 ribu orang, perlahan jumlahnya menurun hingga pada Maret 2019 menjadi 448,47 ribu orang. Pada Maret 2020, jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan sebesar 27,25 ribu orang atau sebesar 6,08 persen dibandingkan Maret 2019.

Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin di DIY pada Maret 2020 tersebut dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok dan terkait dengan pandemi covid-19 sehingga menyebabkan terjadinya perlambatan perekonomian DIY. Pada triwulan I tahun 2020, perekonomian di DIY mengalami kontraksi sebesar 5,48 persen (q to q) dan kontraksi sebesar 0,17 persen (y on y). Dari sisi lapangan usaha, kontraksi terjadi karena adanya penurunan kinerja pada sebelas kategori lapangan usaha. Penurunan tertinggi terjadi pada lapangan usaha konstruksi yaitu sebesar -9,75 persen. Selanjutnya untuk lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar -8,92 persen, Jasa Perusahaan sebesar -7,48 persen, dan Pertambangan dan Penggalan sebesar -6,91 persen.

Salah satu sektor unggulan DIY yang mengalami dampak pandemi covid-19 adalah sektor pariwisata. Sektor ini terkena imbasnya karena adanya pembatasan aktivitas masyarakat. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mengalami penurunan yaitu pada Januari 2020 sebesar 8.371 orang kemudian menurun menjadi 7.100 pada Februari 2020, dan turun drastis pada Maret 2020 sebesar 3.162 orang. Tekanan terhadap industri pariwisata juga dicerminkan dengan turunnya tingkat penghunian kamar hotel (TPK) yaitu sebesar 33,9 persen pada Maret 2020.

Perubahan iklim diduga juga turut memberikan andil pada kontraksi perekonomian di perdesaan sehingga mengakibatkan tingkat kemiskinan meningkat di wilayah tersebut. Musim kemarau yang panjang pada tahun 2019 mengakibatkan mundurnya musim tanam dan musim panen di wilayah perdesaan.

Upaya penanganan kemiskinan di DIY telah menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Hal ini terbukti dengan penurunan jumlah penduduk miskin secara berangsur-angsur dari tahun 2016 hingga 2019. Namun karena adanya pandemi Covid-19, jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 mengalami peningkatan. Hal

ini terkait dengan adanya pembatasan ruang gerak penduduk, penutupan di berbagai ruang publik atau tempat-tempat wisata, sehingga mengakibatkan tidak sedikit penduduk yang dirumahkan bahkan hilangnya pekerjaan. Hal ini berdampak pendapatan masyarakat yang berujung pada tingkat kemiskinan di DIY.

Tabel 3.1.1 Target Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin dalam RPJMD di DIY 2018 – 2022

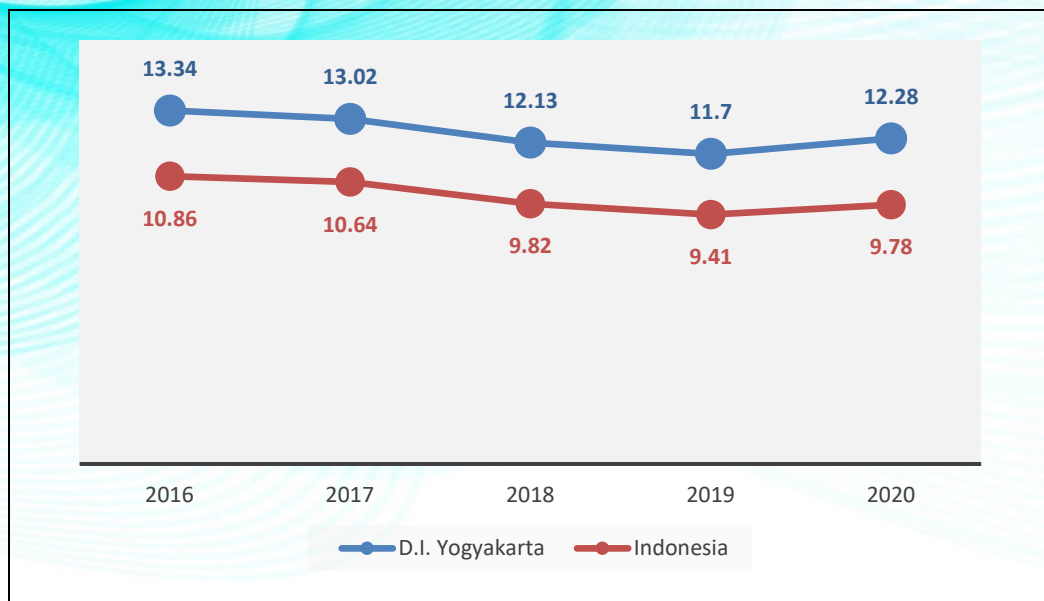
Indikator	Target Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tingkat Kemiskinan (%)	11,23	10,19	9,11	8,07	7,0
Penduduk Miskin (Orang)	484.947	376.260	343.101	309.021	278.509

Sumber: RPJMD DIY

Peningkatan tingkat kemiskinan DIY pada Maret 2020 ini semakin menjauh dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah DIY seperti tertuang dalam RPJMD DIY. Harapannya tingkat kemiskinan semakin turun, namun karena adanya pandemi Covid-19 menyebabkan tingkat kemiskinan pada Maret 2020 meningkat. Tingkat kemiskinan pada Maret 2020 (12,28 persen) masih jauh dari target yang telah ditetapkan sebesar 9,11 persen pada tahun 2020. Tingkat kemiskinan saat ini masih terpaut 3,17 persen dari target yang ditetapkan. Hal ini perlunya penanganan khusus terkait upaya-upaya yang harus dilakukan dalam penanganan kemiskinan di DIY.

Jika dibandingkan dengan angka nasional, tingkat kemiskinan DIY selalu berada di atas angka nasional. Gambar 3.2.2 menyajikan perkembangan tingkat kemiskinan DIY yang berada di atas angka nasional dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, tingkat kemiskinan Indonesia sebesar 9,78 persen sedangkan DIY sebesar 12,28 persen. Tingkat kemiskinan DIY tahun 2020 terpaut 2,5 persen di atas angka nasional. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama khususnya bagi pemerintah DIY dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Gambar 3.2.2 Perkembangan Tingkat Kemiskinan DIY dan Indonesia per Maret Tahun 2016 – 2020 (dalam persen)



Sumber: Berita Resmi Statistik 2016-2020, BPS

Tidak hanya DIY yang mengalami peningkatan pada Maret 2020, namun tingkat kemiskinan secara nasional juga mengalami kenaikan. Dibandingkan dengan tahun 2019, tingkat kemiskinan nasional tahun 2020 meningkat sebesar 0,37 persen poin. Kenaikan tersebut dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak dan adanya pandemi Covid-19 pada Maret 2020.

Dalam melakukan estimasi jumlah penduduk miskin, salah satu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Pendekatan tersebut digunakan oleh Badan Pusat Statistik mulai tahun 1984. Kemiskinan dengan pendekatan kebutuhan dasar dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (BPS, 2019). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Garis kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan nonmakanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan sebagai penduduk miskin. Tabel 3.2.2 menyajikan perkembangan garis kemiskinan DIY periode tahun 2016-2020 menurut komponen pembentuknya.

Tabel 3.2.2 Garis Kemiskinan DIY, Tahun 2015-2019

Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Makanan	246.776	267.501	292.472	310.947	334.461
Bukan Makanan	100.945	106.508	117.272	121.079	129.019
Total	347.721	374.009	409.744	432.026	463.479

Sumber: Berita Resmi Statistik 2016-2020, BPS Provinsi DIY

Garis kemiskinan DIY pada tahun 2016-2020 baik makanan maupun bukan makanan memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan total garis kemiskinan. Pada tahun 2020, garis kemiskinan makanan sebesar 334.461 rupiah per kapita per bulan atau memberikan sumbangan sebesar 72,16 persen terhadap total garis kemiskinan. Sedangkan garis kemiskinan bukan makanan sebesar 129.019 rupiah per kapita per bulan atau memberikan sumbangan sebesar 27,84 persen terhadap total garis kemiskinan.

Dalam kurun waktu lima tahun, garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan secara keseluruhan menunjukkan kontribusi yang meningkat. Garis kemiskinan makanan tahun 2016 – 2020 memberikan sumbangan secara rata-rata sebesar 71,60 persen. Sedangkan garis kemiskinan bukan makanan memberikan sumbangan secara rata-rata sebesar 28,40 persen.

Indikator lain yang perlu diperhatikan terkait kemiskinan adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) digunakan untuk mengukur kesenjangan antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin besar nilai P1 maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Dengan demikian, semakin besar nilai P1 maka semakin besar pula upaya yang diperlukan dalam mengentaskan penduduk miskin dari keterpurukannya. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat homogenitas pengeluaran di antara

penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks P2 menunjukkan ketimpangan yang semakin melebar di antara penduduk miskin itu sendiri.

Tabel 3.2.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) DIY, Tahun 2016-2020

Indeks	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kedalaman Kemiskinan (P1)	2,30	2,19	2,07	1,74	1,94
Keparahan Kemiskinan (P2)	0,59	0,55	0,50	0,38	0,46

Sumber: Berita Resmi Statistik 2016-2020, BPS DIY

Dalam kurun lima tahun terakhir, nilai indeks kedalaman kemiskinan (P1) DIY menunjukkan kecenderungan yang berfluktuasi. Pada tahun 2016 sebesar 2,30, kemudian secara berangsur-angsur turun hingga tahun 2019 sebesar 1,74. Selama kurun waktu 2016-2019 tersebut, penurunan indeks kedalaman kemiskinan memberikan gambaran semakin membaiknya situasi kemiskinan. Namun demikian, pada Maret 2020 Indeks kedalaman kemiskinan mengalami peningkatan menjadi 1,94. Peningkatan tersebut menunjukkan kondisi kemiskinan yang semakin memburuk. Peningkatan indeks kedalaman kemiskinan ini memberikan gambaran bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan.

Ditinjau dari tingkat kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin, kondisi ketimpangan antara penduduk miskin di DIY selama lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang positif. Secara rata-rata, indeks keparahan kemiskinan DIY selama kurun waktu lima tahun terakhir sebesar 0,5 per tahun. Indeks keparahan kemiskinan DIY selama lima tahun terakhir tertinggi pada tahun 2016 yaitu 0,59. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup tinggi di antara penduduk miskin dibanding tahun sesudahnya. Pada tahun 2017, indeks keparahan kemiskinan perlahan mengalami penurunan menjadi 0,55 dan turun kembali menjadi 0,50 pada tahun 2018. Pada tahun 2019, indeks keparahan

kemiskinan tercatat sebesar 0,38 dan merupakan indeks terkecil selama kurun waktu lima tahun terakhir. Namun, pada tahun 2020 kembali meningkat lagi dan tercatat sebesar 0,46. Meskipun demikian, tingkat kesenjangan antara penduduk miskin lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2016-2018.

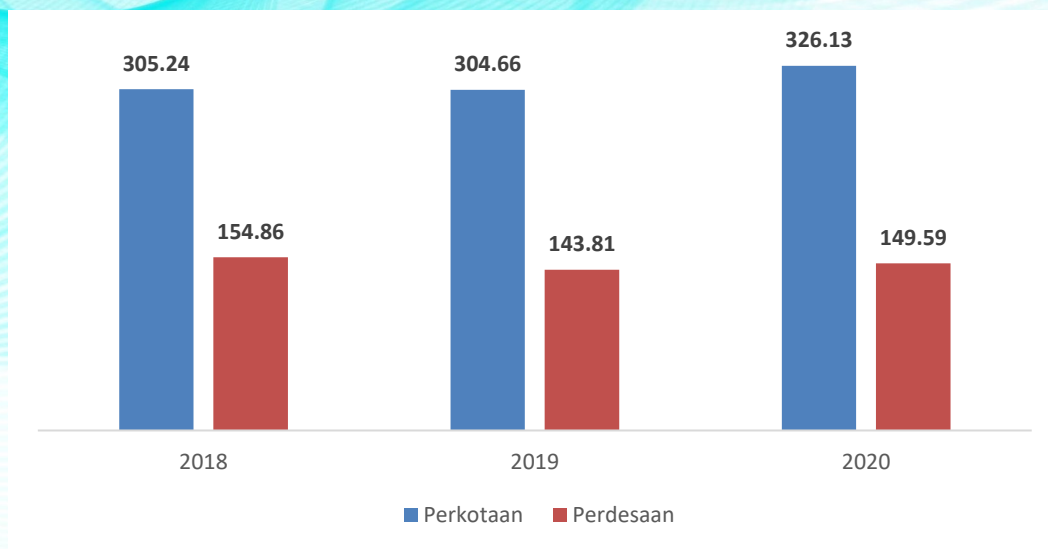
Secara umum, perkembangan kemiskinan pada periode tahun 2016-2020 menunjukkan penurunan. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Namun karena adanya pandemi Covid-19 pada Maret 2020 diduga mempengaruhi tren kemiskinan baik persentase penduduk miskin, tingkat kedalaman kemiskinan maupun tingkat keparahan kemiskinan di DIY. Harapannya dengan kondisi perekonomian yang semakin membaik mampu menurunkan tingkat kemiskinan di DIY.

3.3. Variasi Kemiskinan Menurut Wilayah Perkotaan/Perdesaan

Gambar 3.3.1 memberikan informasi mengenai perkembangan penduduk miskin menurut wilayah perdesaan dan perkotaan di DIY pada tahun 2018 – 2020. Terlihat bahwa jumlah penduduk miskin di DIY menunjukkan pola yang berfluktuasi baik di wilayah perdesaan dan perkotaan.

Pada tahun 2018, jumlah penduduk miskin di perkotaan tercatat sebanyak 305,24 ribu orang. Setahun kemudian, jumlah penduduk miskin di perkotaan turun sebanyak 0,19 persen menjadi 304,66 ribu orang. Namun pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin perkotaan DIY bertambah 7,04 persen menjadi 326,13 ribu orang. Perlambatan ekonomi sebagai dampak pandemi Covid19 diduga memberi pengaruh terhadap bertambahnya jumlah penduduk miskin di perkotaan DIY pada tahun 2020 tersebut.

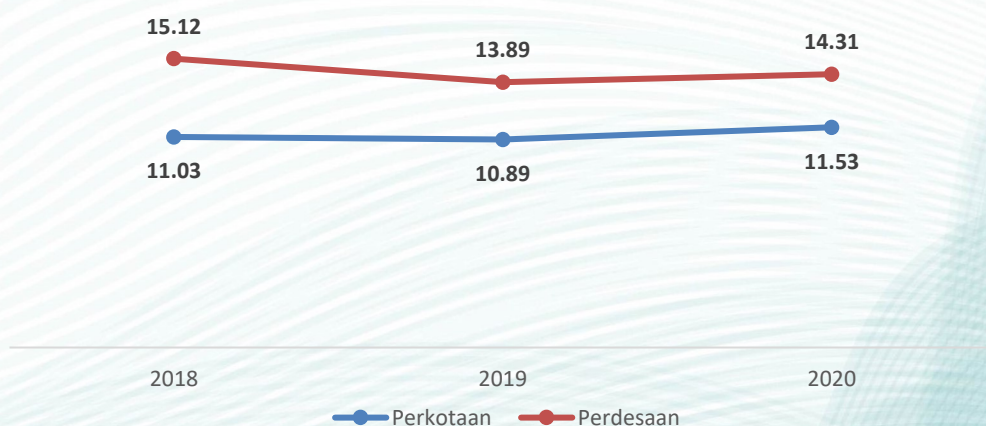
Gambar 3.3.1 Jumlah Penduduk Miskin di Perkotaan dan Perdesaan DIY (2018 – 2020)



Sumber : BPS DIY, Berita Resmi Statistik 2018, 2019, 2020

Tidak terlalu berbeda dengan pola perubahan penduduk miskin di perkotaan, pola perubahan penduduk miskin di perdesaan juga menunjukkan pola yang berfluktuasi. Penduduk miskin di daerah perdesaan pada tahun 2018, tercatat sebanyak 154,86 ribu jiwa. Selanjutnya, pada tahun 2019, jumlah penduduk miskin turun menjadi 143,81 ribu orang. Kemudian pada tahun 2019, jumlah penduduk miskin di perdesaan bertambah menjadi 149,59 ribu orang.

Gambar 3.3.2. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Perkotaan dan Perdesaan DIY, Tahun 2018 - 2020



Sumber : BPS DIY, Berita Resmi Statistik 2018, 2019, 2020

Meskipun jumlah penduduk miskin secara absolut lebih banyak berada di daerah perkotaan daripada di daerah perdesaan, namun untuk persentase penduduk miskin (P0) kondisinya menunjukkan perbedaan. Hasil Susenas 2018 – 2020 menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di wilayah perdesaan lebih tinggi dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di perkotaan (Gambar 3.3.2).

Untuk daerah perkotaan, persentase penduduk miskinnya terlihat lebih rendah daripada di perdesaan. Pada tahun 2018, persentase penduduk miskin di perkotaan tercatat 11,03 persen. Kemudian, pada tahun 2019, persentase penduduk miskin perkotaan turun sebesar 0,14 poin persen menjadi 10,89 persen. Pada tahun 2020, persentase penduduk miskin di perkotaan menunjukkan peningkatan menjadi 11,53 persen.

Pada tahun 2018, persentase penduduk miskin di perdesaan tercatat sebesar 15,12 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara rata-rata terdapat 15 orang miskin diantara 100 orang penduduk di perdesaan. Pada tahun 2019, persentase penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 1,23 poin persen atau menjadi 13,89 persen. Namun pada tahun 2020, persentase penduduk miskin di daerah perdesaan mengalami peningkatan menjadi 14,31 persen.

Tabel 3.3.1. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Tipe Daerah di DIY, 2018 – 2020

Tipe Daerah	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)			Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perkotaan	1,910	1,725	1,857	0,471	0,408	0,429
Perdesaan	2,484	1,783	2,160	0,593	0,317	0,526
DIY	2,065	1,741	1,939	0,504	0,384	0,456

Sumber : BPS Provinsi DIY, 2018, 2019, 2020

Pada kurun waktu 2018 - 2019, terlihat bahwa laju penurunan persentase penduduk miskin di daerah perdesaan lebih tinggi daripada perkotaan. Pada tahun 2018, terdapat selisih lebih dari 4 poin persen antara persentase penduduk miskin

perkotaan dan perdesaan. Pada tahun 2020, selisih antara persentase penduduk miskin di perdesaan dan perkotaan berkurang menjadi 2,78 poin persen.

Tabel 3.3.1 memberikan informasi mengenai indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan menurut perkotaan dan perdesaan di DIY tahun 2018 – 2020. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) merupakan indikator untuk mengukur kesenjangan antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Adapun indeks keparahan kemiskinan (P2) mengukur tingkat kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin.

Pada rentang waktu tahun 2018 - 2020, nilai indeks P1 di perkotaan DIY menunjukkan pola yang berfluktuasi dengan kecenderungan yang menurun. Pada tahun 2019, nilai indeks P1 di wilayah ini tercatat sebesar 1,857. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terlihat adanya peningkatan nilai indeks P1. Hal tersebut menunjukkan kondisi kemiskinan di perkotaan DIY yang memburuk. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan tahun 2018, kondisinya masih relatif lebih baik.

Sejalan dengan fluktuasi pada indeks P1 perkotaan, nilai indeks P1 di perdesaan juga menunjukkan pola yang sama. Pada tahun 2020, nilai indeks P1 perdesaan mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya menjadi 2,160. Adanya peningkatan nilai indeks P1 tersebut memberikan indikasi bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauh di bawah garis kemiskinan. Selain itu, terlihat bahwa nilai indeks P1 perdesaan lebih tinggi dibandingkan dengan P1 perkotaan. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa kondisi kemiskinan di perdesaan relatif lebih buruk dibandingkan dengan kondisi kemiskinan di perkotaan.

Sementara itu, indeks P2 untuk wilayah perdesaan dan perkotaan menunjukkan adanya peningkatan pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan kondisi setahun sebelumnya. Adanya peningkatan nilai indeks P2 ini memberikan gambaran bahwa terjadi peningkatan kesenjangan di antara penduduk miskin baik di perkotaan maupun perdesaan. Namun demikian, nilai indeks P2 di kedua wilayah tersebut pada tahun 2020 masih lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai pada tahun 2018.

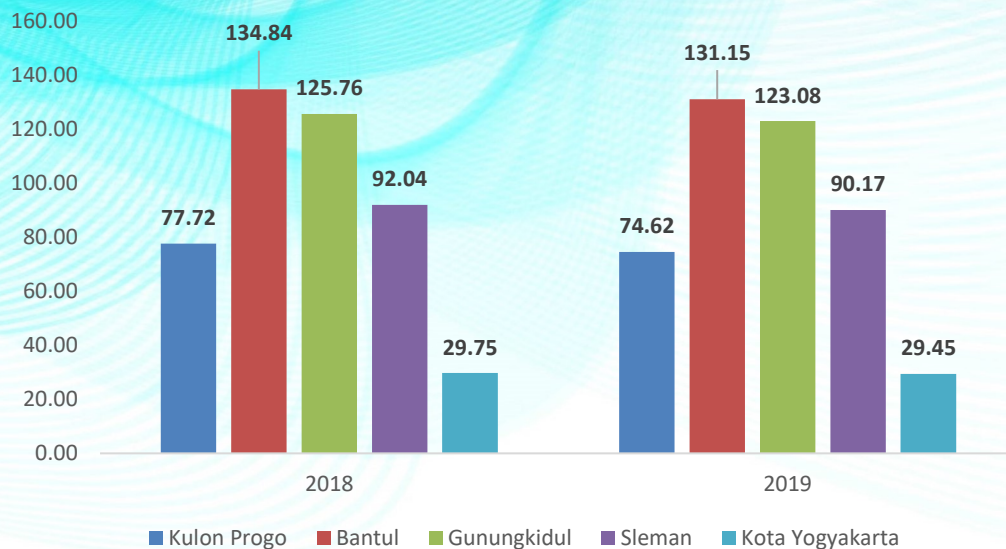
Adanya peningkatan indikator kemiskinan P0, P1, dan P2 pada tahun 2020 diduga terkait dengan kontraksi ekonomi sebagai dampak pandemi Covid19. Jika dilakukan perbandingan antara wilayah perdesaan dan perkotaan, terlihat bahwa nilai indikator P0, P1, dan P2 di perdesaan lebih tinggi daripada perkotaan. Hal ini memberikan gambaran bahwa kondisi kemiskinan di perdesaan lebih buruk dibandingkan di perkotaan. Relatif lebih buruknya kondisi kemiskinan di perdesaan dibandingkan dengan perkotaan diduga terkait dengan kondisi kemarau yang panjang di tahun 2019 sehingga berdampak pada mundurnya musim tanam tahun 2019 dan pada gilirannya berdampak pada mundurnya musim panen pada tahun 2020. Selain itu, kemarau yang panjang pada tahun 2019 diduga berakibat pada turunnya produktivitas beberapa komoditas pertanian di tahun 2020 (BPS DIY, 2020).

3.4. Variasi Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota

Gambar 3.4.1 menunjukkan gambaran mengenai jumlah penduduk miskin menurut kabupaten/kota di DIY selama tahun 2018 – 2019. Pada periode tersebut, Bantul merupakan kabupaten dengan tingkat penurunan jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi. Upaya pengentasan kemiskinan di Bantul selama periode 2018 – 2019 telah berhasil mengurangi penduduk miskin di wilayah tersebut sebanyak 3,69 ribu penduduk.

Kulon Progo juga tercatat sebagai kabupaten di DIY dengan tingkat kesuksesan yang tinggi dalam usaha menurunkan jumlah penduduk miskin di wilayahnya di tahun 2019. Pada tahun 2018, jumlah penduduk miskin Kulon Progo tercatat lebih dari 77,72 ribu orang. Pada tahun 2019, jumlah penduduk miskin di Kulon Progo tercatat sebanyak 74,62 ribu orang. Dengan demikian, dalam jangka waktu setahun jumlah penduduk miskin Kulon Progo telah berkurang sebanyak 3,1 ribu orang.

Gambar 3.4.1. Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di DIY, Tahun 2018 – 2019 (Ribu)



Sumber: BPS, 2018, 2019

Sementara itu, pada periode 2018 – 2019, Kota Yogyakarta merupakan wilayah dengan tingkat penurunan penduduk miskin yang terendah di DIY. Jumlah penduduk miskin yang berhasil dientaskan dari bawah garis kemiskinan tercatat lebih dari 300-an orang selama rentang waktu tersebut. Jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya di DIY, upaya pengurangan penduduk miskin secara absolut di Kota Yogyakarta membutuhkan sumberdaya yang besar karena diduga jumlah penduduk miskin yang ada mendekati *hardcore poverty*. Jumlah penduduk miskin secara tidak sebanyak penduduk miskin di wilayah lainnya, memberikan peluang kepada pemerintah Kota Yogyakarta dalam mempertajam program pengentasan kemiskinan.

Hasil Susenas 2018 – 2019 menunjukkan bahwa Kulon Progo tercatat sebagai kabupaten di DIY dengan persentase penduduk miskin yang tertinggi. Persentase penduduk miskin di Kulon Progo pada tahun 2019 adalah 17,39 persen. Adapun Kota Yogyakarta tercatat sebagai wilayah dengan tingkat kemiskinan yang terendah, dimana persentase penduduk miskin sebesar 6,84 persen (Tabel 3.4.1).

Tabel 3.4.1. Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2018 – 2019

Kabupaten/Kota	2018	2019
(1)	(2)	(3)
Kulon Progo	18,30	17,39
Bantul	13,43	12,92
Gunungkidul	17,12	16,61
Sleman	7,65	7,41
Kota Yogyakarta	6,98	6,84

Sumber : BPS, 2018, 2019

Meskipun Kulon Progo tercatat sebagai kabupaten dengan tingkat kemiskinan yang tertinggi di DIY, namun kabupaten ini juga mencatatkan pretasi yang cukup baik dalam hal pengentasan kemiskinan. Selama periode 2018 - 2019, terjadi pengurangan nilai P0 sebesar 0,81 poin persen. Pengurangan nilai P0 ini merupakan yang tertinggi di wilayah DIY pada periode tersebut. Kabupaten lain yang juga mencatatkan laju pengurangan P0 cukup tinggi di DIY adalah Kabupaten Bantul. Pada periode 2018 – 2019, persentase penduduk miskin di kabupaten ini berkurang sebesar 0,51 poin persen. Secara rata-rata laju pengurangan P0 di DIY untuk kurun waktu 2018 -2019 sebesar 0,14 poin persen.

Pada tahun 2019, kabupaten dengan nilai P1 yang tertinggi di DIY adalah Kulon Progo, yang nilainya sebesar 2,72. Setahun sebelumnya, posisi ini ditempati oleh Gunungkidul dengan nilai P1 sebesar 3,84 (Tabel 3.4.2). Semakin tinggi nilai P1 mengindikasikan rata-rata pengeluaran penduduk miskin di wilayah tersebut yang semakin jauh di bawah garis kemiskinan. Kondisi tersebut berimplikasi pada semakin besarnya usaha yang harus dilakukan untuk melakukan pengentasan kemiskinan.

Tabel 3.4.2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2018 – 2019

Kabupaten/Kota	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)		Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	
	2018	2019	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kulon Progo	2,47	2,72	0,56	0,61
Bantul	2,17	1,87	0,46	0,43
Gunungkidul	3,84	2,58	1,16	0,53
Sleman	0,98	1,13	0,20	0,23
Kota Yogyakarta	1,38	0,85	0,34	0,20
DIY	2,07	1,74	0,50	0,38

Sumber : BPS, 2018, 2019

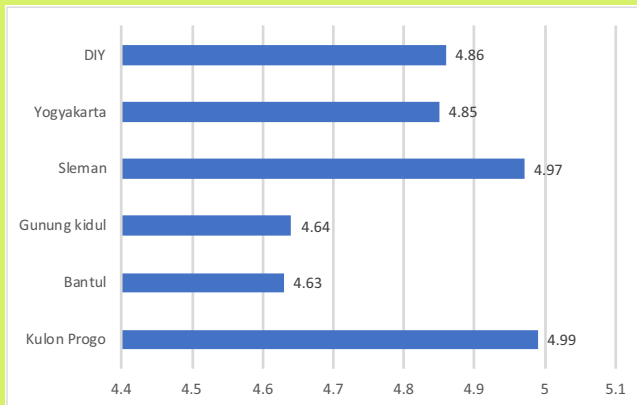
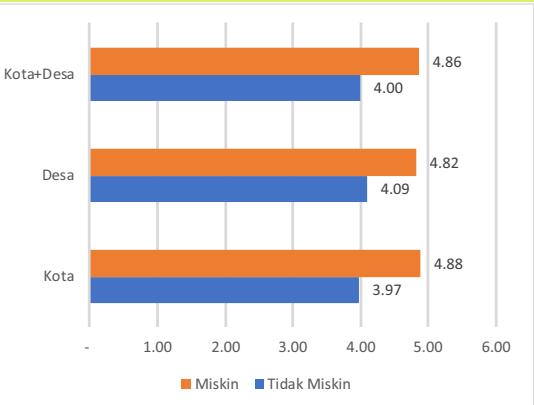
Tabel 3.4.2 juga memberikan informasi mengenai Indeks Keparahan Kemiskinan menurut kabupaten/kota di DIY pada tahun 2018 - 2019. Indeks ini memberikan gambaran mengenai kesenjangan di antara penduduk miskin di kabupaten/kota di DIY. Untuk DIY, pada tahun 2019 terlihat adanya penurunan nilai P2 jika dibandingkan dengan tahun 2018. Hal ini memberikan informasi bahwa tingkat kesenjangan diantara penduduk miskin di DIY semakin membaik. Namun demikian, nilai P2 ini cukup bervariasi antar kabupaten/kota. Pada tahun 2019, Kulon Progo dan Gunungkidul masih merupakan dua kabupaten dengan nilai P2 yang tertinggi di DIY, dengan masing-masing bernilai 0,61 dan 0,53.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, nampaknya upaya pengentasan kemiskinan di DIY perlu difokuskan pada kabupaten Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul. Pada satu sisi, ketiga daerah tersebut mempunyai angka indikator kemiskinan yang relatif tinggi. Namun pada sisi lain, laju pengurangan angka indikator kemiskinan di ketiga wilayah tersebut juga menunjukkan laju di atas rata-rata DIY. Hal tersebut mengindikasikan bahwa program penurunan kemiskinan di ketiga kabupaten tersebut sesuai dengan dinamika lapangannya. Namun demikian, mengingat tingginya persentase kemiskinan di ketiga kabupaten tersebut perlu

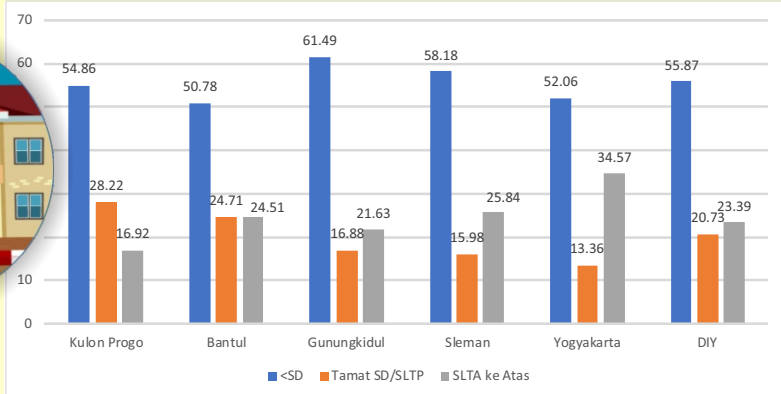
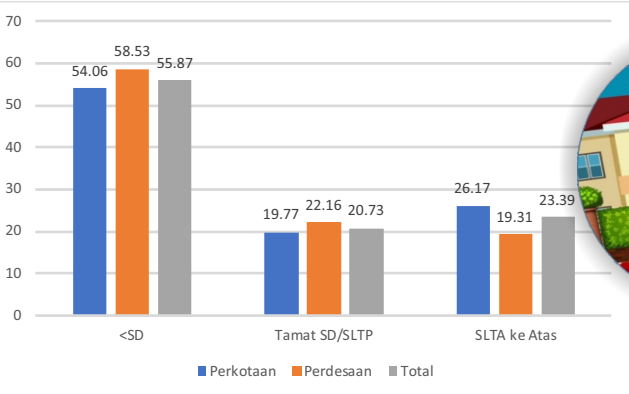
dilakukan upaya akselerasi agar laju penurunan tingkat kemiskinan dapat ditingkatkan.

PROFIL KEMISKINAN D.I YOGYAKARTA TAHUN 2019

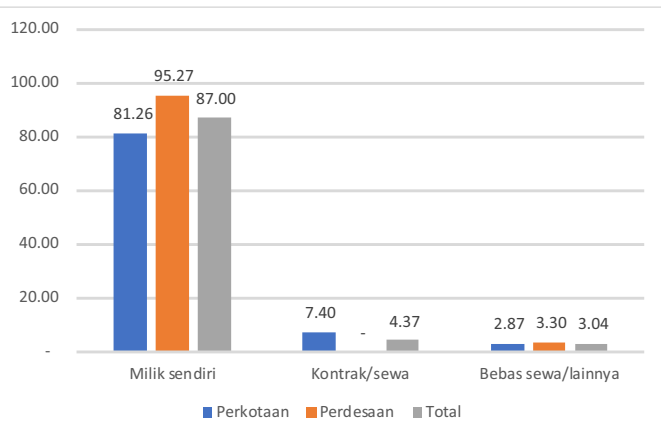
Rata-Rata Jumlah Anggota Rumah Tangga



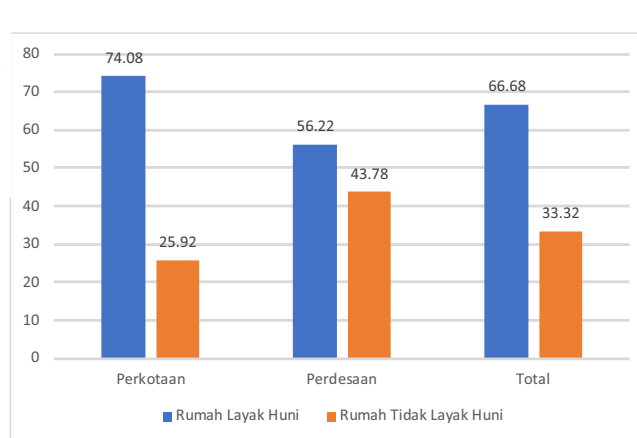
Pendidikan Yang Ditamatkan Kepala Rumah Tangga Miskin



Persentase Rumah Tangga Miskin Menurut Status Kepemilikan Bangunan



Persentase Penduduk Miskin Menurut Rumah layak huni

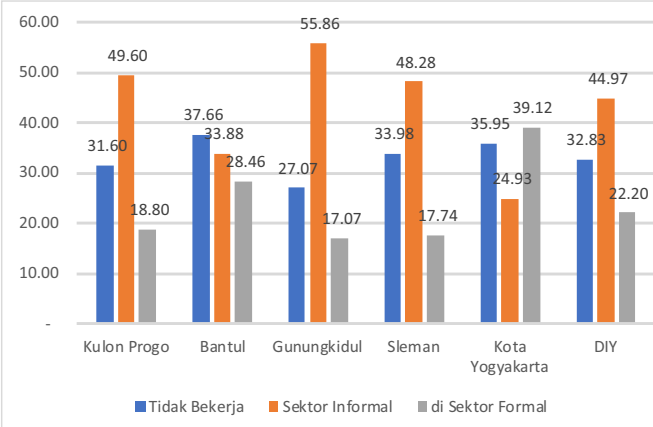


Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Sektor Bekerja

Sektor Formal 22,20 %



Sektor Informal 44,97 %





BAB IV

PROFIL KEMISKINAN

4.1. Karakteristik Wilayah dan Fasilitas Dasar

Faktor-faktor penyebab kemiskinan dapat berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal. Houghton dan Khandker (2012) menjelaskan kemiskinan terdiri dari faktor-faktor penentu utama yang meliputi karakteristik wilayah, karakteristik masyarakat, karakteristik rumah tangga dan individu. Hubungan karakteristik wilayah dengan kemiskinan akan berbeda-beda di setiap wilayah. Secara umum, kemiskinan tinggi berada di daerah-daerah yang mempunyai sifat terisolasi secara geografis, basis sumber daya yang rendah, curah hujan yang rendah, serta keadaan iklim yang tidak ramah. Selain itu, ketersediaan fasilitas dasar baik pendidikan maupun kesehatan merupakan investasi jangka panjang dalam kesejahteraan masyarakat.

Karakteristik Wilayah

Informasi terkait potensi suatu wilayah salah satunya berasal dari data potensi desa (Podes). Berdasarkan data Podes 2019, tercatat bahwa topografi wilayah DIY sebagian besar merupakan wilayah daratan yaitu 350 desa (79,91 persen) dan 88 desa (20,09 persen) merupakan wilayah lereng/puncak. Keberadaan desa yang berada di wilayah lereng/puncak ada di empat kabupaten. Sedangkan Kota Yogyakarta seluruh wilayahnya berada di daerah dataran.

Tabel 4.1.1 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Topografi Wilayah di DIY, Tahun 2019

Kabupaten/Kota	Lereng/puncak	Dataran	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Kulon Progo	22	66	88
Bantul	13	62	75
Gunungkidul	40	104	144
Sleman	13	73	86
Yogyakarta	0	45	45
DIY	88	350	438

Sumber: Updating Podes 2019

Selain informasi topografi wilayah, karakteristik wilayah lainnya yaitu terkait keberadaan wilayah yang berbatasan dengan laut atau disebut wilayah pesisir maupun nonpesisir. Bagian selatan wilayah DIY berbatasan langsung dengan laut. Wilayah yang berbatasan dengan Samudera Hindia tersebut terdapat di tiga kabupaten yaitu Kabupaten Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul. Posisi wilayah tersebut tentunya memberikan keuntungan geografis tersendiri dengan pemanfaatan sumber daya laut bagi kesejahteraan masyarakat. Studi yang dilakukan Bank Dunia (2019) menunjukkan bahwa pemanfaatan laut dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk di wilayah pesisir. Pengembangan potensi sumber daya laut masih sangat terbuka yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat sekitar.

Jumlah desa di DIY yang berbatasan dengan laut sebanyak 33 desa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 10 desa berada di Kabupaten Kulon Progo, 5 desa di Kabupaten Bantul, dan 18 desa di Kabupaten Gunungkidul. Sedangkan Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta tidak memiliki wilayah yang berbatasan dengan laut.

Tabel 4.1.2 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Lokasi Desa Terhadap Laut di DIY, Tahun 2019

Kabupaten/Kota	Tepi Laut	Bukan Tepi Laut
(1)	(2)	(3)
Kulon Progo	10	78
Bantul	5	70
Gunungkidul	18	126
Sleman	0	86
Yogyakarta	0	45
DIY	33	405

Sumber: Updating Podes 2019

Dalam melakukan pengembangan potensi sumber daya laut tidaklah mudah sehingga diperlukan sumber daya manusia yang handal. Namun, kendala yang dihadapi masyarakat pesisir saat ini terkait faktor internal maupun eksternal. Kajian kemiskinan di daerah pesisir oleh Natalia dan Alie (2014) menunjukkan bahwa kemiskinan yang terjadi di kampung nelayan disebabkan oleh faktor rendahnya

kualitas sumber daya manusia, minimnya kepemilikan sumber daya manusia, minimnya kepemilikan modal usaha dan teknologi, serta gaya hidup masyarakat. Rendahnya kualitas sumber daya manusia diukur dari tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki sehingga mengakibatkan tidak memiliki kesempatan bekerja secara luas. Selain itu, pekerjaan nelayan sangat tergantung dengan musim sehingga harus mempunyai pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Wilayah pesisir dengan kondisi sarana dan prasarana pelayanan publik yang tidak sebaik maupun selengkap daerah nonpesisir akan menghambat perekonomian di wilayah tersebut. Dari total PDRB DIY, gabungan PDRB ketiga kabupaten di wilayah selatan yaitu Kabupaten Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul hanya sebesar 40,58 persen. Angka tersebut jauh lebih kecil dari gabungan PDRB Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Ditinjau dari tingkat kemiskinannya, wilayah yang berbatasan dengan laut tersebut memiliki persentase penduduk miskin yang lebih besar dibandingkan dengan wilayah yang tidak berbatasan dengan laut. Ketiga kabupaten yang berbatasan dengan pantai selatan dengan persentase kemiskinan untuk Kabupaten Kulon Progo sebesar 17,39 persen, Bantul sebesar 12,92 persen, dan Gunungkidul 16,61 persen. Berbeda dengan tingkat kemiskinan di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta masing-masing sebesar 7,41 persen dan 6,84 persen. Kesenjangan tingkat kemiskinan dan perekonomian inilah yang memerlukan penanganan khusus.

Latar belakang pendidikan yang rendah, keterbatasan keterampilan, dan kesempatan kerja yang dipengaruhi oleh musim pada wilayah pesisir merupakan hambatan besar untuk keluar dari kemiskinan. Pengembangan kawasan pesisir pantai selatan DIY memerlukan penanganan khusus dibandingkan kawasan lainnya. Hal ini karena kawasan pesisir pantai memiliki kekhasan baik dari aspek geografi, maupun aspek sosial dan ekonomi. Kondisi alam yang lebih ekstrim dibandingkan kawasan nonpesisir pantai juga mendorong masyarakat melakukan aktivitas ekonomi dengan tingkat risiko yang lebih besar. Meskipun masyarakat pesisir identik dengan kehidupan nelayan, namun kegiatan tersebut memberikan kontribusi yang cukup baik bagi kesejahteraan nelayan dan pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat DIY.

Fasilitas Pendidikan

Selain faktor alam, ketersediaan sarana prasarana dasar sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Ketersediaan fasilitas dasar pendidikan maupun kesehatan sangat penting dalam upaya pengembangan potensi masyarakat. Harapannya, fasilitas pendidikan dasar yang memadai dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga jangka panjangnya dapat keluar dari lingkaran kemiskinan.

Tabel 4.1.3 Jumlah dan Persentase Desa menurut Keberadaan Fasilitas Pendidikan dan Kabupaten/Kota di DIY, Tahun 2019

Kabupaten/Kota	SD		SLTP		SLTA	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kulon Progo	88	100.00	51	57.95	33	37.50
Bantul	75	100.00	61	81.33	44	58.67
Gunungkidul	144	100.00	100	69.44	44	30.56
Sleman	86	100.00	71	82.56	54	62.79
Yogyakarta	44	97.78	33	73.33	33	73.33
DIY	437	99.77	316	72.15	208	47.49

Sumber: Updating Podes 2019

Terbatasnya akses terhadap fasilitas pendidikan dasar dapat menghambat kualitas sumber daya manusia. Begitu juga dengan ketersediaan fasilitas pendidikan namun biaya pendidikan tinggi. Berdasarkan data Podes 2019, tercatat bahwa 437 desa/kelurahan telah memiliki fasilitas pendidikan SD atau sederajat. Hanya terdapat satu kelurahan di Kota Yogyakarta yang tidak memiliki fasilitas SD atau sederajat.

Semakin tinggi jenjang pendidikan, keberadaan fasilitas pendidikan semakin sedikit. Keberadaan fasilitas pendidikan SLTP sederajat ada di 316 desa/kelurahan atau 72,15 persen. Persentase terbesar keberadaan fasilitas pendidikan SLTP ada di Kabupaten Sleman (82,56 persen) diikuti Kabupaten Bantul (81,33 persen). Sementara itu, untuk keberadaan fasilitas pendidikan menengah atas, lebih dari separuh desa di DIY tidak memiliki fasilitas pendidikan

SLTA. Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul hanya sekitar 30 persen desa yang memiliki fasilitas pendidikan SLTA. Persentase fasilitas pendidikan SLTA terbesar ada di Kota Yogyakarta (73,33 persen) diikuti Kabupaten Sleman (62,79 persen).

Fasilitas Kesehatan

Faktor kesehatan merupakan salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pembangunan sumber daya manusia. Salah satu upaya yang dilakukan untuk memotong rantai kemiskinan adalah dengan meningkatkan derajat kesehatan. Derajat kesehatan yang tinggi dapat meningkatkan produktivitas masyarakat sehingga mampu meningkatkan upah yang diterima. Berdasarkan data Podes 2019, keberadaan rumah sakit terdapat di 63 desa sedangkan keberadaan rumah sakit bersalin hanya ada di 13 desa di DIY. Rumah sakit bersalin hanya ada di Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta. Keberadaan rumah sakit di Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul masih sedikit.

Tabel 4.1.4 Jumlah Desa menurut Keberadaan Fasilitas Pendidikan dan Kabupaten/Kota di DIY, Tahun 2019

Kabupaten/Kota	Rumah Sakit	Rumah Sakit Bersalin	Puskesmas		Puskesmas Pembantu
			ranap	tidak ranap	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kulon Progo	7	-	7	14	58
Bantul	16	4	16	13	51
Gunungkidul	6	-	14	16	106
Sleman	21	-	11	16	58
Kota Yogyakarta	13	9	2	14	8
DIY	63	13	50	73	281

Sumber: Updating Podes 2019

Keberadaan Puskesmas maupun Puskesmas Pembantu sangat membantu dalam menyediakan pelayanan kesehatan dasar. Puskesmas rawat inap terdapat di 50 desa/kelurahan sedangkan Puskesmas tidak rawat inap terdapat di 73 desa/kelurahan. untuk rawat inap. Sementara itu untuk Puskesmas Pembantu terdapat di 281 desa/kelurahan di DIY.

Fasilitas kesehatan lainnya juga banyak tersebar di desa/kelurahan. Keberadaan praktek bidan paling banyak tersebar di desa/kelurahan yaitu berada di 242 desa/kelurahan, diikuti dengan praktek dokter terdapat di 242 desa/kelurahan. Sementara itu untuk keberadaan Poliklinik ada di 144 desa/kelurahan. Fasilitas kesehatan apotek dan toko obat juga sangat diperlukan dalam pemenuhan kesehatan dasar. Apotek tersebar di 223 desa/kelurahan dan toko obat tersebar di 174 desa/kelurahan.

Tabel 4.1.5 Jumlah Desa menurut Keberadaan Fasilitas Kesehatan Lainnya dan Kabupaten/Kota di DIY, Tahun 2019

Kabupaten/Kota	Poliklinik	Praktek Dokter	Praktek bidan	Apotek	Toko Obat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kulon Progo	14	34	53	31	27
Bantul	43	55	60	60	43
Gunungkidul	26	42	59	28	20
Sleman	35	70	66	62	56
Yogyakarta	26	41	14	42	28
DIY	144	242	252	223	174

Sumber: Updating Podes 2019

4.2. Karakteristik Penduduk Miskin

4.2.1. Demografi

Karakteristik sosial demografi yang disajikan meliputi rata-rata jumlah anggota rumah tangga (ART), persentase perempuan sebagai kepala rumah tangga (KRT), rata-rata usia kepala rumah tangga, dan tingkat pendidikan kepala rumah tangga (dilihat dari indikator rata-rata lamanya bersekolah kepala rumah tangga). Keempat karakteristik sosial demografi tersebut dibandingkan dengan melihat proporsi rumah tangga yang dikategorikan sebagai rumah tangga miskin dan tidak miskin. Selanjutnya juga disajikan profil rumah tangga miskin menurut kabupaten/kota untuk melihat keterbandingan antar wilayah.

Tabel 4.2.1 Karakteristik Sosial Demografi Rumah Tangga Miskin dan Rumah Tangga Tidak Miskin di DIY, 2019

Karakteristik Rumah Tangga	Kota	Desa	Kota+Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Rata-Rata Jumlah ART			
- Tidak Miskin	3,97	4,09	4,00
- Miskin	4,88	4,82	4,86
2. Persentase Perempuan Sebagai KRT			
- Tidak Miskin	22,83	14,87	20,91
- Miskin	14,92	15,12	14,99
3. Rata-Rata Umur KRT (tahun)			
- Tidak Miskin	45,86	54,19	47,87
- Miskin	56,44	56,52	56,47
4. Rata-rata lama sekolah KRT (tahun)			
- Tidak Miskin	10,75	7,11	9,87
- Miskin	6,69	6,08	6,49

Sumber: Susenas Maret 2019

Dilihat dari beban tanggungan, rumah tangga miskin di DIY cenderung mempunyai jumlah anggota rumah tangga lebih banyak dibandingkan rumah tangga tidak miskin. Rumah tangga miskin rata-rata memiliki jumlah anggota rumah tangga sekitar 4-5 orang (4,86 orang), sedangkan setiap rumah tangga tidak miskin rata-rata beranggotakan 4 orang. Jika dilihat menurut tipe daerah, rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin di perkotaan maupun perdesaan tidak jauh berbeda, yaitu berkisar 4-5 orang per rumah tangga.

Jika dilihat menurut jenis kelamin, persentase perempuan sebagai kepala rumah tangga miskin lebih sedikit dibandingkan rumah tangga tidak miskin. Pola serupa juga terjadi di perkotaan. Namun demikian berbeda dengan wilayah perdesaan, perempuan sebagai kepala rumah tangga miskin justru lebih banyak dibandingkan rumah tangga tidak miskin. Sejalan dengan pola profil rumah tangga miskin menurut tipe daerah, persentase perempuan sebagai kepala rumah tangga miskin juga lebih banyak ditemui di kabupaten/kota yang relatif perkotaan (Sleman, Bantul dan Kota Yogyakarta) dibandingkan Kabupaten Kulon Progo maupun Kabupaten Gunungkidul yang relatif perdesaan.

Tabel 4.2.2 Karakteristik Sosial Demografi Rumah Tangga Miskin menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2019

Karakteristik Rumah Tangga	Kulon Progo	Bantul	Gunung kidul	Sleman	Yogya-karta	DIY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Rata-Rata Jumlah ART	4,99	4,63	4,64	4,97	4,85	4,86
2. Persentase Perempuan Sebagai KRT	11,90	19,67	12,93	18,57	15,33	14,99
3. Rata-Rata Umur KRT (tahun)	55,70	58,23	55,68	59,98	53,16	56,47
4. Rata-rata lama sekolah KRT (tahun)	6,40	6,53	6,01	5,85	8,08	6,49

Sumber: Susenas Maret 2019

Sementara itu terkait dengan distribusi umur, rata-rata umur kepala rumah tangga miskin tercatat 56,47 tahun atau lebih tua dibanding rata-rata umur kepala rumah tangga tidak miskin yang mencapai 47,87 tahun. Pola yang sama juga terjadi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Jika dilihat perbandingan rata-rata umur kepala rumah tangga miskin, Kabupaten Sleman memiliki rata-rata umur perempuan sebagai kepala rumah tangga tertua, yaitu mencapai 59,98 tahun dan Kota Yogyakarta dengan rata-rata umur termuda (53,16 tahun).

Berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, rata-rata lama sekolah kepala rumah tangga miskin lebih rendah dibandingkan dengan kepala rumah tangga tidak miskin, yaitu 6,49 tahun (setara kelas 1 SLTP) banding 9,87 tahun (setara kelas 1 SLTA). Pola serupa juga terjadi di daerah perkotaan maupun di perdesaan, hanya saja pendidikan kepala rumah tangga di perkotaan lebih baik dibandingkan di perdesaan. Jika dibandingkan antar kabupaten/kota, kepala rumah tangga miskin di Kota Yogyakarta memiliki pendidikan paling baik, yaitu rata-rata lama sekolah mencapai 8,08 tahun atau setara belajar sampai dengan kelas 3 SLTP.

4.2.2. Pendidikan

Salah satu penyebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan asset (*lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, tingkat kesehatan dan pendidikan yang diterima (Bank Dunia, 2014). Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan akan mendorong produktifitas kerja yang dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi.

Kemiskinan muncul sebagai akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia (Kuncoro, 2004). Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah yang menyebabkan upah rendah. Taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan diri menjadi terbatas dan dapat menyebabkan sempitnya lapangan kerja yang dimasuki. Semakin rendah pendidikan dan produktifitas kerja dapat mempengaruhi tingkat upah yang diterima. Orang yang berpendidikan lebih tinggi biasanya akan mempunyai peluang yang lebih rendah untuk menjadi miskin.

Tabel 4.2.2.1 Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Pendidikan yang Ditamatkan, Tahun 2019

Kabupaten/Kota	<SD	Tamat SD/SLTP	SLTA ke Atas
(1)	(2)	(3)	(4)
Kulon Progo	28,77	44,97	26,26
Bantul	24,39	44,42	31,20
Gunungkidul	30,71	53,09	16,21
Sleman	35,18	32,51	32,31
Yogyakarta	13,14	46,58	40,28
DIY	28,33	44,71	26,96

Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan 2019, BPS

Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan, sebagian besar penduduk miskin di DIY memiliki tingkat pendidikan yang rendah yaitu SLTP ke bawah sebesar 73,04 persen. Persentase penduduk miskin yang tamat pendidikan SD atau SLTP sebesar 44,71 persen dan penduduk miskin yang tidak menamatkan SD

sebesar 28,33 persen. Sementara itu, penduduk miskin dengan tingkat pendidikan SLTA ke atas sebesar 26,96 persen. Hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga miskin lebih banyak dijumpai pada rumah tangga yang kepala rumah tangganya berpendidikan rendah. Semakin tinggi pendidikan yang ditamatkan seseorang akan berpengaruh terhadap tingkat upah yang diterima serta kesejahteraan hidupnya.

Secara umum apabila ditinjau menurut kabupaten/kota, sebagian besar penduduk miskin dengan tingkat pendidikan SLTP ke bawah. Berbeda dengan kabupaten lainnya di DIY, penduduk miskin di Kota Yogyakarta dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan SLTA ke atas cukup besar yaitu 40,28 persen, sedangkan penduduk miskin dengan tingkat pendidikan belum tamat SD hanya 13,14 persen. Ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai dan akses yang terjangkau di Kota Yogyakarta tidak menghalangi masyarakat dalam mengenyam pendidikan.

Selain tingkat pendidikan penduduk miskin, tingkat pendidikan kepala rumah tangga merupakan salah satu variabel penting dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan penduduk. Menurut Indahwati (2006) bahwa tingkat pendidikan kepala rumah tangga berpengaruh signifikan terhadap klasifikasi rumah tangga miskin. Tabel 4.2.2.2 menyajikan persentase penduduk miskin menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan kepala rumah tangga.

Sebagian besar penduduk miskin di kabupaten/kota se- DIY dengan tingkat pendidikan kepala rumah tangganya yaitu SD ke bawah. Hal ini menggambarkan bahwa pendidikan yang dimiliki kepala rumah tangga miskin di DIY tergolong rendah. Kepala rumah tangga yang hanya tamat SD ke bawah umumnya memiliki wawasan yang rendah sehingga dapat mempengaruhi pekerjaan dan tingkat upah yang diterimanya. Persentase terbesar penduduk miskin dengan kepala rumah tangga SD ke bawah adalah Kabupaten Gunungkidul yaitu 61,49 persen. Sedangkan persentase terbesar penduduk miskin dengan kepala rumah tangga SLTA ke atas adalah Kota Yogyakarta. Hal ini diduga terkait dengan akses fasilitas pendidikan di wilayah tersebut.

Tabel 4.2.2.2 Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota dan Pendidikan yang Ditamatkan Kepala Rumah Tangga, Tahun 2019

Kabupaten/Kota	SD ke bawah	SLTP	SLTA ke atas
(1)	(2)	(3)	(4)
Kulon Progo	54,86	28,22	16,92
Bantul	50,78	24,71	24,51
Gunungkidul	61,49	16,88	21,63
Sleman	58,18	15,98	25,84
Yogyakarta	52,06	13,36	34,57
DIY	55,87	20,73	23,39

Sumber: Susenas 2019 diolah, BPS DIY

Ditinjau dari tipe daerah, sebagian besar dengan tingkat pendidikan kepala rumah tangga penduduk miskin baik di perkotaan maupun di perdesaan adalah pendidikan rendah yaitu SD ke bawah. Baik di perkotaan maupun di perdesaan, tingkat pendidikan kepala rumah tangga diduga mempengaruhi tingkat kemiskinan rumah tangga. Di perkotaan, pendidikan yang ditamatkan kepala rumah tangga SLTA ke atas cukup banyak sekitar 26,17 persen. Sedangkan untuk perdesaan, persentase pendidikan kepala rumah tangga untuk SLTP lebih besar daripada SLTA ke atas. Hal ini karena akses pendidikan di perkotaan lebih baik dibandingkan perdesaan sehingga tingkat pendidikan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan. Tolok ukur kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan pangan dan tingkat pendapatan yang rendah, akan tetapi juga melihat tingkat kesehatan dan pendidikan (Adisasmita, 2005)

Tabel 4.2.2.3 Persentase Penduduk Miskin Menurut Tingkat Pendidikan Kepala Rumah Tangga dan Tipe Daerah di DIY, Tahun 2019

Tipe Daerah	SD ke bawah	SLTP	SLTA ke atas
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan	54,06	19,77	26,17
Perdesaan	58,53	22,16	19,31
Total	55,87	20,73	23,39

Sumber: Susenas 2019 diolah, BPS DIY

Pendidikan kepala rumah tangga dapat mempengaruhi cara berpikir ke depan terhadap keluarganya. Saat ini pemerintah sudah memberikan berbagai bantuan operasional sekolah pada jenjang pendidikan dasar hingga menengah. Sebagai kota pelajar, tidak ada kendala dalam hal ketersediaan fasilitas pendidikan tinggi di DIY. Namun, permasalahan yang masih dirasakan saat ini adalah kurangnya akses terhadap pendidikan tinggi. Mahalnya biaya pendidikan tinggi merupakan kendala yang dihadapi oleh masyarakat khususnya masyarakat miskin. Pendapatan yang diperoleh sebagian besar hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan. Padahal dalam jangka panjang, kualitas sumber daya manusia mampu mendorong untuk keluar dari belenggu kemiskinan dan hal ini sangat berkaitan dengan tingkat pendidikan yang ditempuh seseorang.

4.2.3. Kesehatan dan Perumahan

Profil kemiskinan dapat dilihat dari kondisi kesehatan penduduk. Penduduk miskin identik dengan terbatasnya akses dan mutu layanan kesehatan (Sahdan, 2005). Ketidakberdayaan penduduk miskin untuk mengakses sarana kesehatan, ketidakmampuan secara finansial untuk dapat hidup sehat sehingga penduduk miskin rentan terinfeksi berbagai penyakit. Beberapa indikator kesehatan untuk menggambarkan derajat kesehatan diantaranya adalah angka keluhan kesehatan, penggunaan fasilitas kesehatan dalam upaya pemulihan kesehatan serta kepemilikan jaminan kesehatan.

Angka keluhan kesehatan

Keluhan kesehatan penduduk miskin adalah apabila penduduk miskin mengalami keluhan kesehatan seperti batuk, pilek dan keluhan sakit lainnya. Keluhan kesehatan yang dialami tersebut dapat menyebabkan aktifitas pekerjaan sehari-hari terganggu sehingga mempengaruhi tingkat produktifitasnya (Lindawati, 2014). Produktifitas menjadi menurun dibandingkan bila penduduk tidak mengalami keluhan kesehatan. Dengan demikian, akan berdampak pada menurunnya pendapatan dan kualitas produksi.

Tabel 4.2.3.1 menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga penduduk miskin pada tahun 2019 mengalami keluhan kesehatan. Dengan demikian sebanyak dua pertiga

penduduk miskin tidak mengalami keluhan kesehatan. Bila di rinci menurut wilayah tempat tinggal, persentase penduduk di perdesaan yang mengalami keluhan kesehatan mencapai 36,71 persen, sedikit lebih tinggi daripada penduduk di perkotaan.

Analisis menurut kabupaten/kota memperlihatkan Penduduk miskin yang mengalami keluhan kesehatan pada periode yang sama dalam range 21,83 persen hingga 43,22 persen. Angka keluhan kesehatan penduduk miskin tertinggi yakni di Kabupaten Bantul dan terendah adalah di Kota Yogyakarta. Sementara itu 3 kabupaten lainnya, angka keluhan kesehatan masing-masing pada kisaran 30 persen. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa persentase penduduk miskin yang tidak mengalami kesehatan adalah di Kota Yogyakarta yakni sebesar 78,17 persen. Selanjutnya, jika dibandingkan dengan DIY, angka keluhan kesehatan penduduk miskin di Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Sleman telah melampaui angka kesehatan provinsi.

Tabel 4.2.3.1 Persentase Penduduk Miskin yang Mengalami Keluhan Kesehatan menurut Tipe Wilayah Tempat Tingal dan Kabupaten/Kota, 2019

Tipe Daerah/Kab/Kota		Ya	Tidak	Total
(1)		(2)	(3)	(4)
Tipe Daerah	Perkotaan	33,48	66,52	100,00
	Perdesaan	36,71	63,29	100,00
	Total	34,80	65,20	100,00
Kabupaten/ Kota	Kulonprogo	43,22	56,78	100,00
	Bantul	32,19	67,81	100,00
	Gunungkidul	33,68	66,32	100,00
	Sleman	37,39	62,61	100,00
	Yogyakarta	21,83	78,17	100,00
	DIY	34,80	65,20	100,00

Sumber: BPS(Susenas 2019)

Akses Pada Fasilitas Kesehatan

Indikator kesehatan berikutnya adalah fasilitas kesehatan yang digunakan penduduk miskin dalam upaya mengobati keluhan kesehatan yang dialami. Pengobatan keluhan kesehatan diantaranya dengan cara mengakses atau mengunjungi fasilitas kesehatan dengan rawat jalan atau rawat inap. Jenis fasilitas kesehatan meliputi rumah sakit, puskesmas, tempat praktek dokter/bidan, klinik/praktek kesehatan bersama hingga pengobatan tradisional. Tabel 4.2.3.2 menyajikan presentase penduduk miskin yang berobat jalan menurut fasilitas kesehatan yang digunakan pada tahun 2019.

Tabel 4.2.3.2 Persentase Penduduk Miskin yang Mengalami Keluhan Kesehatan Dan Berobat Jalan menurut Tipe Wilayah Tempat Tinggal dan Kabupaten/Kota, 2019

Tipe Daerah/Kab/Kota		RS Pemerintah	RS Swasta	Praktik Dokter/ Bidan	Klinik	Puskesmas	Lainnya
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tipe Daerah	Perkotaan	5,44	5,68	25,62	13,30	56,29	1,38
	Perdesaan	11,08	2,65	38,37	18,05	35,69	0,73
	Total	7,94	4,34	31,26	15,40	47,18	1,09
Kab/ Kota	Kulonprogo	13,35	2,72	45,77	4,74	39,20	0,00
	Bantul	4,10	6,38	27,21	15,83	53,83	1,97
	Gunungkidul	8,58	3,16	37,16	21,15	35,16	1,26
	Sleman	8,53	4,56	21,32	20,49	53,48	0,00
	Yogyakarta	2,73	4,14	0,00	9,38	80,17	3,58
	DIY	7,94	4,34	31,26	15,40	47,18	1,09

Sumber: BPS(Susenas 2019)

Pada tahun 2019, penduduk miskin paling banyak mengakses puskesmas sebagai sarana rawat jalan. Berikutnya adalah praktek dokter/bidan diikuti oleh tempat klinik/praktek dokter bersama. Masing masing mencapai 31.26 persen dan 15,40 persen. Namun demikian keterbatasan ekonomi yang dimiliki, sebanyak 1,09

persen penduduk miskin lebih memilih berobat jalan ke praktek pengobatan tradisional/UKBM.

Kondisi yang tak jauh berbeda antara penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Puskesmas, praktek dokter/bidan serta klinik/pratek dokter bersama menjadi tujuan utama penduduk miskin untuk berobat jalan. Di lain pihak sebanyak 11,08 persen penduduk miskin di wilayah perdesaan telah mengakses RS pemerintah untuk keperluan berobat jalan. Angka ini hampir 2 kali lipat dari pada penduduk yang tinggal di perkotaan. Justru mereka lebih banyak mengakses RS Swasta.

Lebih rinci, pemanfaatan fasilitas kesehatan untuk berobat jalan bagi penduduk miskin, cukup beragam antar kabupaten kota. Penduduk miskin di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul paling banyak memanfaatkan Puskesmas, masing-masing sebanyak 80,17 persen, 53,48 persen dan 53,83 persen. Di sisi lain, dua kabupaten lainnya justru lebih memilih pergi ke praktek dokter/bidan, yakni 45,77 persen dan 37,16 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin yang mengakses RS pemerintah untuk keperluan berobat jalan di Kabupaten Kulonprogo mampu mencapai 13,35 persen. Persentase ini jauh lebih tinggi dari kabupaten/kota lainnya.

Akses penduduk miskin terhadap fasilitas kesehatan berikutnya adalah dalam upaya penanganan keluhan kesehatan lebih lanjut. Penduduk miskin akan menjalani perawatan dengan menginap di fasilitas kesehatan formal bila keluhan kesehatan tak dapat disembuhkan melalui rawat jalan. Pada Tabel 4.2.3.3 menunjukkan fasilitas kesehatan berupa RS Pemerintah, RS swasta dan Puskesmas paling banyak di akses penduduk miskin saat rawat inap. Pemanfaatan fasilitas kesehatan tersebut bagi penduduk miskin relatif sama baik penduduk perkotaan maupun penduduk perdesaan. Akan tetapi, bagi penduduk miskin di perdesaan sebanyak 13,82 persen lebih menentukan pilihan untuk rawat inap di praktek bidan/dokter. Sementara penduduk perkotaan yang rawat inap di fasilitas kesehatan tersebut hanya 2,58 persen.

Bila ditinjau secara spasial, pilihan penduduk miskin terhadap faskes yang tersedia juga cukup bervariasi. Bila sebanyak 82,67 persen penduduk miskin Kota Yogyakarta dan 45,41 persen penduduk miskin di Kabupaten Gunungkidul telah

menggunakan RS Sakin Swasta sebagai tempat rawat inap, fenomena yang berbeda untuk 3 kabupaten lainnya. Penduduk miskin yang tinggal Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman pada periode tahun 2019 ternyata paling banyak rawat inap di RS Pemerintah. Data ini mengindikasikan bahwa kemudahan akses fasilitas kesehatan turut menjadi pertimbangan pilihan menggunakan tempat rawat inap. Salah satunya adalah di dukung dengan keberadaan fasilitas kesehatan yang tersedia lebih banyak, mudah dijangkau dan dekat dengan tempat tinggal penduduk miskin. Daerah Dalam Angka DIY 2019 mencatat jumlah RS Swasta di Kota Yogyakarta telah mencapai 20 buah, sedangkan di Kabupaten Gunungkidul 10 buah.

Tabel 4.2.3.3 Persentase Penduduk Miskin yang Mengalami Keluhan Kesehatan Dan Rawat Inap menurut Tipe Wilayah Tempat Tinggal dan Kabupaten/Kota,2019

Tipe Daerah/Kab/Kota		RS Pemerintah	RS Swasta	Praktik Dokter/Bidan	Klinik	Puskesmas
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tipe Daerah	Perkotaan	42,28	39,48	2,56	8,05	11,37
	Perdesaan	36,28	34,22	13,82	4,60	13,06
	Total	39,64	37,16	7,52	6,53	12,11
Kab/Kota	Kulonprogo	50,43	20,83	9,28	5,73	13,72
	Bantul	48,48	34,53	3,06	0,00	20,74
	Gunungkidul	25,88	45,21	17,70	3,28	11,21
	Sleman	44,04	24,28	0,00	31,68	0,00
	Yogyakarta	17,33	82,67	0,00	0,00	0,00
	DIY	39,64	37,16	7,52	6,53	12,11

Sumber: BPS(Susenas 2019)

Jaminan Kesehatan Yang Dimiliki

Selain keberadaan fasilitas kesehatan yang mudah dijangkau dan memadai, faktor biaya berobat menjadi kendala yang cukup berarti bagi penduduk miskin untuk berobat baik rawat jalan maupun rawat inap. Saat ini, Pemerintah, maupun pihak swasta telah menyediakan jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan ini berupa perlindungan kesehatan agar siswa memperoleh manfaateliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Jaminan kesehatan meliputi BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (BPJS PBI), BPJS Kesehatan bukan Penerima Bantuan Iuran (BPJS Non-PBI), Jamkesda, Asuransi Swasta dan Jaminan persahaan/kantor. Bagi penduduk miskin, pemerintah telah menanggung biaya pembayaran iuran BPJS PBI. Ini bertujuan agar seluruh penduduk miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan yang optimal.

Data hasil Susenas 2019, memberikan informasi bahwa penduduk miskin yang telah memiliki jaminan kesehatan berupa BPJS PBI baru mencapai 71,28 persen. Sementara itu 9,61 persen mempunyai BPJS Non PBI dan 4,85 persen lainnya mempunyai jamkesda. Di lain pihak, perhatian pemerintah tertuju dengan keberadaan penduduk miskin yang belum mempunyai jaminan kesehatan yakni sebesar 16,83 persen.

Menurut tipe wilayah tempat tinggal, kepemilikan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin yakni BPJS PBI di pedesaan secara persentase sedikit lebih tinggi daripada penduduk miskin perkotaan. Sebaliknya persentase penduduk miskin perkotaan yang memiliki BPJS Non PBI hampir 7 kali lipat daripada penduduk miskin perdesaan yang hanya sebesar 2,59 persen.

Secara lebih detail kepemilikan jaminan kesehatan dapat dicermati menurut kabupaten/kota. Selain Kota Yogyakarta, jaminan kesehatan penduduk miskin di 4 kabupaten/kota paling banyak adalah BPJS PBI. BPJS Non PBI terbanyak dimiliki penduduk miskin di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta yakni 22,45 persen dan 16,54 persen. Sementara itu, pada tabel 4.3.2.3. mencatat sebanyak 67,22 penduduk miskin Kota Yogyakarta masih memiliki Jamkesda, sementara beberapa kabupaten lainnya sudah tidak ada lagi Jamkesda. Namun demikian, penduduk miskin di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta telah memiliki BPJS Non PBI, masing-masing sebanyak 22,45 persen dan 16,54 persen.

Tabel 4.2.3.4 Persentase Penduduk Miskin Menurut Kepemilikan Jaminan Kesehatan, Tipe Wilayah Tempat Tinggal dan Kabupaten/Kota, 2019

Tipe Daerah/Kab/Kota		BPJS PBI	BPJS Non_PBI	Jamkesda/Asuransi kesehatan Swasta	Jamkes perusahaan/kantor	Tidak Memiliki
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tipe Daerah	Perkotaan	65,41	14,49	8,19	2,63	16,58
	Perdesaan	79,72	2,59	0,20	0,48	17,19
	Total	71,28	9,61	4,92	1,75	16,83
Kab/Kota	Kulonprogo	72,28	4,86	0,43	1,26	22,49
	Bantul	72,31	9,18	1,20	1,74	16,45
	Gunungkidul	82,84	1,89	0,30	0,22	14,74
	Sleman	55,06	22,45	0,00	3,97	18,52
	Yogyakarta	65,41	16,54	67,22	2,62	7,77
	DIY	71,28	9,61	4,92	1,75	16,83

Sumber: BPS(Susenas 2019)

Karakteristik Perumahan

Perumahan merupakan satu dari tiga kebutuhan dasar penduduk selain makanan dan pakaian. Bahkan, Word Bank Institute(2002) menjelaskan tempat tinggal/perumahan merupakan salah satu penyebab kemiskinan. Rendahnya kemampuan secara ekonomi menyebabkan penduduk miskin akan menempati rumah tidak layak huni bahkan tidak memiliki rumah. Selain itu, penduduk miskin juga akan tinggal di rumah dengan fasilitas kesehatan yang tidak layak.

Pesatnya pertumbuhan penduduk mendorong pemerintah berupaya untuk menyediakan perumahan yang layak bagi seluruh penduduk. Berbagai program pengadaan rumah yang terjangkau hingga ekonomi kelas bawah telah di canangkan. Diantaranya adalah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Tapera ini diwajibkan untuk PNS/TNI/Polri, karyawan BUMN/BUMD/BUMDes dan pekerja swasta dengan penghasilan di atas UMR. Tapera sifatnya gotong royong dengan pembiayaan rumah hanya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Semua program penyediaan rumah layak huni adalah sebagai upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals-SDGs*), pada tujuan yang ke-11 yaitu: kota dan permukiman yang berkelanjutan dengan penyediaan perumahan dan permukiman. Penyediaan akses perumahan dan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau masih menjadi kendala bagi pemerintah. Salah satunya adalah ketersediaan data tentang perumahan bagi penduduk miskin. Indikator dasar karakteristik kemiskinan bagi penduduk miskin antara lain adalah kepemilikan rumah, air layak, jamban sendiri, sanitasi layak dan rumah layak huni.

Kepemilikan rumah

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Idealnya rumah harus dimiliki oleh setiap rumah tangga terutama bagi rumah tangga miskin. Namun, tantangannya adalah minimnya daya beli rumah tangga miskin sehingga mereka sulit memiliki rumah yang layak dan terjangkau. Kondisi ini menyebabkan terdapat rumah tangga miskin akan menempati rumah dengan sistem kontrak atau sewa. Informasi mengenai kepemilikan tempat tinggal dapat diperoleh melalui survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

Pada tahun 2019, sebanyak 87,00 persen rumah tangga miskin menempati rumah milik sendiri. Sementara 13 persen lainnya tinggal di bangunan tempat tinggal dengan sisten kontrak/sewa, bebas sewa atau lainnya. Menurut kategori wilayah tempat tinggal, rumah tangga miskin yang tinggal di perdesaan menempati rumah milik sendiri sudah mencapai 95,27 persen atau hampir 14 persen lebih tinggi bagi rumah tangga miskin di perkotaan. Di sisi lain, persentase rumah tangga miskin yang memilih menempati rumah dengan sistem kontrak/sewa sebesar 7,40 persen. Hal ini disinyalir mereka lebih mengutamakan tempat tinggal yang lebih dekat dengan tempat kerja atau belum memiliki rumah terkendala harga rumah diperkotaan tak terjangkau.

Tabel 4.2.3.5 Persentase Rumah Tangga Miskin Menurut Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal, Tipe Wilayah Tempat Tinggal dan Kabupaten/Kota, 2019

Tipe Daerah/Kab/Kota		Milik sendiri	Kontrak/ sewa	Bebas sewa/lainnya
<i>(1)</i>		<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
Tipe Daerah	Perkotaan	81.26	7.40	2.87
	Perdesaan	95.27	0.00	3.30
	Total	87.00	4.37	3.04
Kab/ Kota	Kulonprogo	96.07	0.00	3.93
	Bantul	86.77	4.36	2.87
	Gunungkidul	95.03	0.00	2.87
	Sleman	88.41	5.56	2.87
	Yogyakarta	27.20	30.04	2.87
	DIY	87.00	4.37	3.04

Sumber: BPS(Susenas 2019)

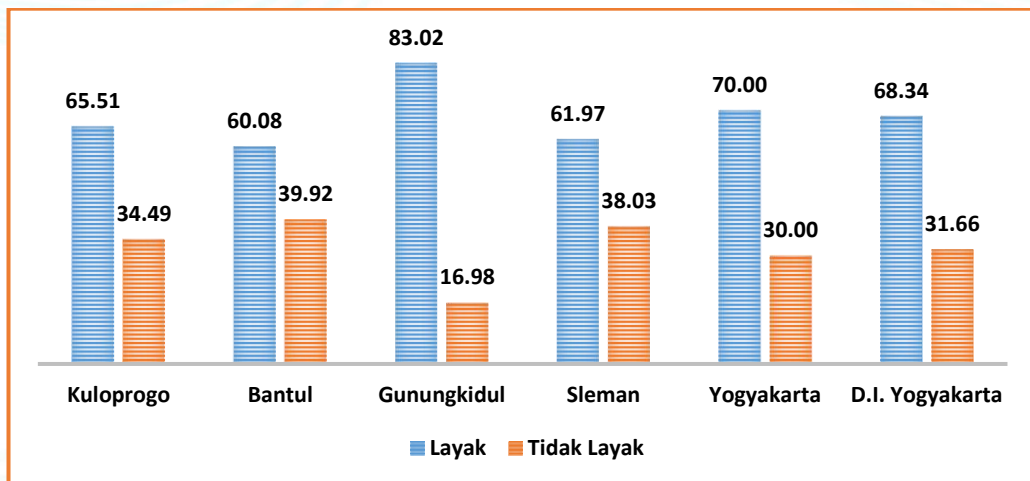
Selanjutnya, kepemilikan tempat tinggal bagi rumah tangga miskin dilihat dari wilayah kabupaten/kota menunjukkan gambaran yang cukup menarik. Rumah tangga miskin di Kota Yogyakarta dengan porsi yang hampir merata menempati bangunan tempat tinggal dengan sistem bebas sewa, kontrak/sewa serta bangunan tempat tinggal milik sendiri. Rumah tangga miskin di Kota Yogyakarta terbanyak menempati bangunan tempat tinggal dengan system bebas sewa yakni 42,75 persen kemudian 30,04 persen tinggal di rumah dengan system sewa dan sisanya 27,20 persen sudah tinggal di rumah milik sendiri.

Sementara hal yang kontradiksi terjadi pada 4 kabupaten/kota lainnya. Rumah tangga miskin pada kabupaten/kota tersebut mayoritas lebih memilih tinggal di rumah milik sendiri. Secara umum sebanyak 86 persen hingga 96 persen rumah tangga miskin pada 4 kabupaten tersebut telah menempati rumah milik sendiri. Arti rumah tangga miskin yang menempati bukan rumah milik sendiri berkisar antara 4 hingga 14 persen. Rumah tangga tersebut menempati tempat tinggal dengan sistem sewa/kontrak atau bebas sewa. Fenomena ini mengindikasikan ketersediaan bangunan tempat tinggal bagi rumah tangga miskin di wilayah Kota Yogyakarta perlu mendapatkan perhatian oleh semua pihak khususnya pemerintah daerah.

Air Layak

Ketersediaan air layak sebagai sumber air minum merupakan indikator perumahan yang mencirikan derajat kesehatan bagi anggota rumah tangga. Fasilitas air minum layak bagi suatu rumah tangga merupakan salah satu indikasi kemiskinan. Rumah tangga menggunakan air minum layak bila rumah tangga menggunakan sumber utama air minum dari air tidak layak (air hujan), air terlindung maupun air tidak terlindung dengan syarat sumber mandi/cuci/ dan lain-lain yang digunakan berasal dari air terlindung.

Gambar 4.3.2.1 Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Akses Kelayakan Air Minum, Tipe Wilayah dan Kabupaten/Kota



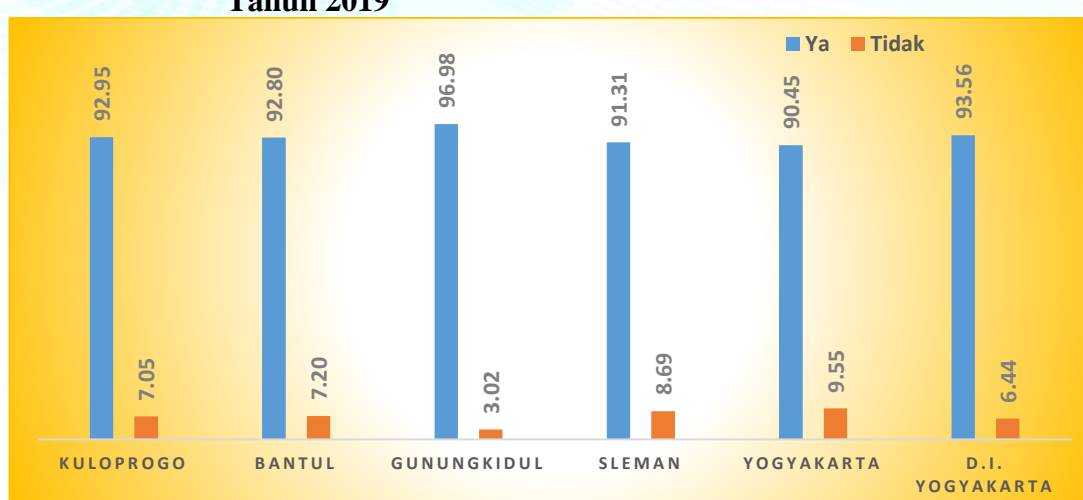
Sumber: BPS(Susenas 2019)

Gambar 4.3.2.1 menunjukkan persentase rumah tangga miskin DIY yang telah mengakses air layak pada tahun 2019 sebesar 68,34 persen. Artinya masih terdapat lebih dari 31 persen penduduk miskin belum mampu menggunakan air layak untuk keperluan sehari-hari. Sementara menurut kabupaten/kota, penduduk miskin yang paling banyak belum memanfaatkan air layak adalah di Kabupaten Bantul sebesar 39,92 persen. Sementara penduduk miskin di Kabupaten Sleman sebanyak 38,03 persen yang menggunakan air tidak layak. Dengan demikian hampir sepertiga penduduk miskin di wilayah tersebut masih memakai air tidak layak untuk mencukupi aktifitas sehari-hari.

Karakteristik perumahan berikutnya adalah jamban sendiri/bersama. Rumah tangga miskin dikatakan menggunakan jamban sendiri/bersama jika rumah

tangga miskin menggunakan fasilitas tempat buang air besar yang digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga tertentu. Hampir sama dengan indikator air layak, jamban sendiri/bersama juga berkaitan dengan derajat kesehatan rumah tangga miskin. Ini terkait dengan faktor resiko penyebaran penyakit khususnya water borne disease yakni penyakit yang disebabkan oleh kontak air yang telah terkontaminasi mikroorganisme pathogen (BPS, 2019).

Gambar 4.3.2.2 Persentase Rumah Tangga Miskin Menurut Penggunaan Jamban Sendiri/Bersama Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2019



Sumber: BPS(Susenas 2019)

Gambar 4.3.2.2 memperlihatkan bahwa pada tahun 2019 rumah tangga miskin di DIY yang belum menggunakan fasilitas jamban sendiri/bersama sebesar 6,44 persen. Penggunaan jamban bukan sendiri atau bersama di semua kabupaten/kota oleh rumah tangga miskin secara persentase dibawah 9 persen. Akan tetapi sebanyak 9,55 persen rumah tangga miskin di Kota Yogyakarta masih belum menggunakan jamban sendiri/bersama. Sebaliknya, rumah tangga miskin di Kabupaten Gunungkidul yang memakai jamban bukan sendiri/bersama hanya sebesar 3,02 persen.

Rumah tidak layak huni

Salah satu indikator dari TPB ke-11 adalah proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Mengacu pada definisi

nasional dan global, hunian layak memiliki 4 (empat) kriteria, meliputi: 4 (empat) kriteria, meliputi: kecukupan luas tempat tinggal (*sufficient living space*) minimal 7,2 m per kapita, memiliki akses air minum (*access to improved water*), memiliki akses sanitasi layak (*access to adequate sanitation*), dan memenuhi syarat ketahanan bangunan (*durable housing*) serta berkelanjutan.

Rumah tangga miskin cenderung untuk menempati tempat tinggal dekat dengan tempat bekerja. Keterbatasan ekonomi disertai finansial yang rendah sehingga mereka lebih memilih bermukim di rumah tidak layak huni. Dengan demikian, rumah tidak layak huni menjadi salah satu karakteristik rumah tangga miskin.

Persentase rumah tangga miskin yang menempati rumah tidak layak huni pada tahun 2019 sebesar 33,32 persen. Pada tabel 4.2.3.6, tampak bahwa rumah tangga miskin di wilayah perdesaan yang bertempat tinggal di rumah tidak layak huni mencapai 43,78 persen atau 17,86 persen poin lebih tinggi dibandingkan penduduk miskin di perkotaan.

Bila dianalisis pada level Kabupaten/kota, lebih dari 50 persen penduduk miskin di Kota Yogyakarta masih menghuni rumah tidak layak huni. Demikian juga, penduduk miskin di Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunungkidul masih cukup tinggi yakni diatas 40 persen. Sementara 2 kabupaten lainnya, persentase rumah tangga miskin yang bertempat tinggal di rumah tidak layak huni masing-masing sebesar 22,98 persen dan 18,37 persen.

Sementara program pemerintah untuk menyediakan rumah yang layak, aman dan terjangkau untuk penduduk strata ekonomi terbawah mengalami keterbatasan yakni terkait keterbatasan anggaran yang tersedia. Kebijakan dalam mewujudkan rumah layak huni dilakukan melalui program pembenahan rumah tidak layak huni. Kementerian PUPR telah merilis program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program BSPS diharapkan dapat meningkatkan kegotongroyongan warga untuk meningkatkan kualitas hunian di lingkungan sekitar, dengan cara pembangunan rumah baru dan peningkatan kualitas rumah tak layak huni (BPS:2019).

Tabel 4.2.3.6 Persentase Penduduk Miskin Menurut Rumah Layak Huni, Tipe Wilayah Tempat Tinggal dan Kabupaten/Kota, 2019

Tipe Daerah/ Kab/Kota		Rumah Layak Huni	Rumah Tidak Layak Huni
(1)		(2)	(3)
Tipe Daerah	Perkotaan	74,08	25,92
	Perdesaan	56,22	43,78
	Total	66,68	33,32
Kab/ Kota	Kulonprogo	51,90	48,10
	Bantul	77,02	22,98
	Gunungkidul	58,11	41,89
	Sleman	81,63	18,37
	Yogyakarta	45,86	54,14
	DIY	66,68	33,32

Sumber: BPS(Susenas 2019)

4.2.4. Ekonomi

Sektor informal sering dikaitkan dengan rendahnya tingkat penghasilan yang menyebabkan rumah tangga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan yang layak bagi mereka dan berdampak juga pada kerentanan terhadap insiden kemiskinan (Taufiq, 2017). International Labour Organization (ILO) dalam laporannya menyatakan bahwa rendahnya tingkat pendapatan pekerja yang miskin seringkali dihubungkan dengan lapangan usaha informal dimana mereka bekerja. Selain itu, pekerja informal juga dihubungkan dengan tidak adanya perlindungan sosial yang dapat berakibat fatal bagi keuangan mereka (ILO, 2016).

Tabel 4.2.4.1 Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Status Bekerja di DIY, Tahun 2019

Kabupaten/Kota	Tidak Bekerja	Bekerja di Sektor Informal	Bekerja di Sektor Formal
(1)	(2)	(3)	(4)
Kulon Progo	31,60	49,60	18,80
Bantul	37,66	33,88	28,46
Gunungkidul	27,07	55,86	17,07
Sleman	33,98	48,28	17,74
Kota Yogyakarta	35,95	24,93	39,12
DIY	32,83	44,97	22,20

Sumber : BPS, 2019

Tabel 4.2.4.1 menunjukkan persentase penduduk miskin menurut status pekerjaan di DIY pada tahun 2019. Secara umum terlihat bahwa sebagian besar penduduk miskin bekerja di sektor informal. Di kabupaten Gunungkidul jumlah penduduk miskin yang bekerja di sektor informal bahkan mencapai lebih dari setengahnya (55,86 persen). Selain itu, persentase penduduk miskin yang bekerja di sektor informal di Kabupaten Kulon Progo dan Sleman juga tercatat relatif tinggi, dimana jumlahnya masing-masing sebanyak 49% dan 48%. Kondisi yang sedikit berbeda ditunjukkan oleh kabupaten Bantul Bantul. Persentase penduduk miskin yang tidak bekerja di Bantul justru terlihat mendominasi. Sebanyak 37,66% penduduk miskin di Bantul dikategorikan sebagai yang tidak bekerja. Adapun jumlah penduduk miskin yang bekerja di sektor informal dan sektor formal di Kabupaten Bantul masing-masing tercatat sebanyak 33,88 % dan 28,46 %.

Kondisi yang berbeda juga ditemui di kota Yogyakarta. Pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin yang bekerja di sektor formal merupakan yang tertinggi di mana sebanyak 39,12% penduduk miskin di kota Yogyakarta bekerja di sektor ini. Namun demikian persentase penduduk miskin yang tidak bekerja masih lebih banyak dibandingkan penduduk miskin yang bekerja di sektor informal. Penduduk

miskin yang tidak bekerja tercatat sebanyak 35,95% sementara Penduduk miskin yang bekerja di sektor informal sebanyak 24,93%.

Tabel 4.2.4.2 Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Sektor Bekerja di DIY, Tahun 2019

Kabupaten/Kota	Tidak Bekerja	Bekerja di Sektor Pertanian	Bekerja Bukan di Sektor Pertanian
(1)	(2)	(3)	(4)
Kulon Progo	31,60	22,91	45,49
Bantul	37,66	16,79	45,55
Gunungkidul	27,07	48,86	24,06
Sleman	33,98	24,47	41,56
Kota Yogyakarta	35,95	0,00	64,05
DIY	32,83	27,30	39,87

Sumber : BPS, 2019

Tabel 4.2.4.2 menunjukkan persentase penduduk miskin yang bekerja menurut lapangan usaha di DIY pada tahun 2019. Terlihat bahwa lapangan usaha penduduk miskin cukup bervariasi antara kabupaten/kota di Yogyakarta. Di kabupaten Gunungkidul, sebagian besar penduduk miskin bekerja di sektor pertanian. Persentase penduduk miskin yang bekerja di sektor ini sebanyak 48,86 persen. Adapun penduduk miskin di Kulon Progo, Bantul, dan Sleman menjadikan lapangan usaha di luar pertanian sebagai pekerjaan utamanya. Persentase penduduk miskin yang bekerja di luar pertanian di Kabupaten Kulon Progo, Bantul, dan Sleman secara berturut-turut adalah 45,49 persen 45,55 persen, dan 41,56 persen.

Sementara itu, penduduk miskin di Kota Yogyakarta tidak ada yang bekerja sebagai petani. Hal ini mengingat kondisi di perkotaan dimana hampir tidak tersedia lahan yang memadai untuk melakukan kegiatan usaha di sektor pertanian. Pilihan pekerjaan bagi penduduk miskin di wilayah ini adalah bekerja di luar sektor pertanian (64,05 %) atau tidak bekerja (35,95 %).

Meskipun pekerja miskin yang terlibat di sektor pertanian DIY hanya sebanyak 27,30 persen, namun sektor ini memainkan peran penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Pembangunan pertanian dapat berperan langsung dan tidak langsung dalam pengentasan kemiskinan perdesaan (FAO, 1995). Secara langsung, sektor pertanian merupakan sumber utama pendapatan dan pekerjaan bagi sebagian penduduk miskin di perdesaan. Secara tidak langsung, kemiskinan yang berakar pada masalah kelaparan dan kekurangan gizi menjadikan pembangunan pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam upaya perbaikan gizi melalui peningkatan kuantitas, kualitas dan variasi persediaan pangan.

Walaupun demikian, besarnya dampak pembangunan sektor pertanian terhadap pengentasan kemiskinan tergantung pada struktur ekonomi (Christiaensen dkk dalam FAO, 2019). Pertumbuhan pertanian tidak secara otomatis menguntungkan masyarakat miskin, terutama di mana terdapat ketidaksetaraan yang lebih besar dalam akses ke sumber daya. Pada kondisi tersebut, pekerjaan di luar pertanian merupakan elemen penting untuk mengakhiri kemiskinan ekstrim (FAO, 2019).

4.2.5. Akses Terhadap Makanan

Berbicara masalah pangan selalu menarik untuk dibahas karena pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama. Pemenuhan pangan merupakan bagian dari hak asasi yang dijamin dalam Undang-Undang (UU) Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas seperti tercakup dalam Undang-Undang Pangan No. 18 tahun 2012.

Sementara itu, ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi wilayah sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Pada tingkat rumah tangga terdapat enam indikator akses pangan yang harus dipertimbangkan yaitu: 1) Akses pangan rumah tangga untuk melihat tingkat

individu dalam rumah tangga tersebut, karena rumah tangga sebagai kelembagaan sosial berkaitan dengan akses pangan individu; 2) Akses pangan adalah kebutuhan akan tetapi kondisi ini tidak cukup untuk menentukan penggunaan/konsumsi pangan oleh semua anggota rumah tangga. Hal ini terkait dengan aspek pemeliharaan kesehatan. Jika rumah tangga mempunyai sumber daya yang cukup untuk pangan semua anggota rumah tangga, namun belum tentu setiap anggota tersebut secara aktual akan menerima dan menggunakan sesuai dengan kecukupannya. Makanan yang didistribusikan secara kuantitas dan kualitas pangan harus berdampak pada kesehatan anggota tersebut; 3) Akses pangan tergantung dari pendapatan yang diperoleh oleh rumah tangga secara relatif dengan harga pangan (daya beli); 4) Rumah tangga memiliki berbagai strategi untuk memperoleh pendapatan. Rumah tangga memiliki akses berbagai sumber daya seperti tenaga kerja, lahan, ternak, dan modal. Beberapa rumah tangga juga dapat memperoleh atau menggunakan sumber daya lain melalui interaksi dengan rumah tangga, organisasi dan institusi pemerintah lain dan 5) Terdapat dimensi waktu pada akses pangan. Banyak rumah tangga menghadapi fluktuasi pendapatan baik tahunan maupun dari tahun ke tahun. Apalagi pada rumah tangga pertanian yang menghadapi perubahan musim terkait dengan siklus tanaman pangan.

Tabel 4.2.5.1 Persentase Rumah Tangga Miskin yang Merasa Mengalami Permasalahan Akses Konsumsi Pangan Setahun Terakhir, Maret 2019

Uraian	Tipe daerah		Total
	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Khawatir tidak akan memiliki cukup makanan	15.78	19.97	17.51
Ada saat dimana tidak dapat menyantap makanan sehat dan bergizi	15.04	7.97	12.11
Hanya menyantap sedikit jenis makanan	14.46	8.12	11.83
Pernah melewatkan satu waktu makan pada suatu hari tertentu	7.32	2.14	5.18
Makan lebih sedikit daripada seharusnya	12.78	5.78	9.88

Sumber: BPS(Susenas, 2019)

Tabel 4.2.5.1 menunjukkan persentase rumah tangga miskin yang merasa mengalami permasalahan akses konsumsi pangan setahun terakhir di DIY pada Maret 2019, yaitu merasa khawatir tidak akan memiliki cukup makanan setahun

terakhir mencapai 17,51 persen. Kondisi ini terlihat lebih tinggi di daerah perdesaan yang mencapai hampir 20 persen, sedangkan di perkotaan sekitar 15,78 persen. Terdapat rumah tangga miskin merasa ada saat dimana tidak dapat menyantap makanan sehat dan bergizi yang terdapat 12,11 persen. Hanya menyantap sedikit jenis makanan mencapai 11,83 persen, kemudian pernah melewatkan satu waktu makan pada suatu hari tertentu sebesar 5,18 persen, dan makan lebih sedikit daripada seharusnya selama setahun terakhir hampir mencapai 10 persen rumah tangga miskin. Keempat hal terakhir tampak menonjol di daerah perkotaan dibandingkan di perdesaan.



PENYEBAB KEMISKINAN D.I YOGYAKARTA TAHUN 2019

Dampak Bencana
dan Perubahan
Iklim terhadap
Kemiskinan

Ketidakberdayaan

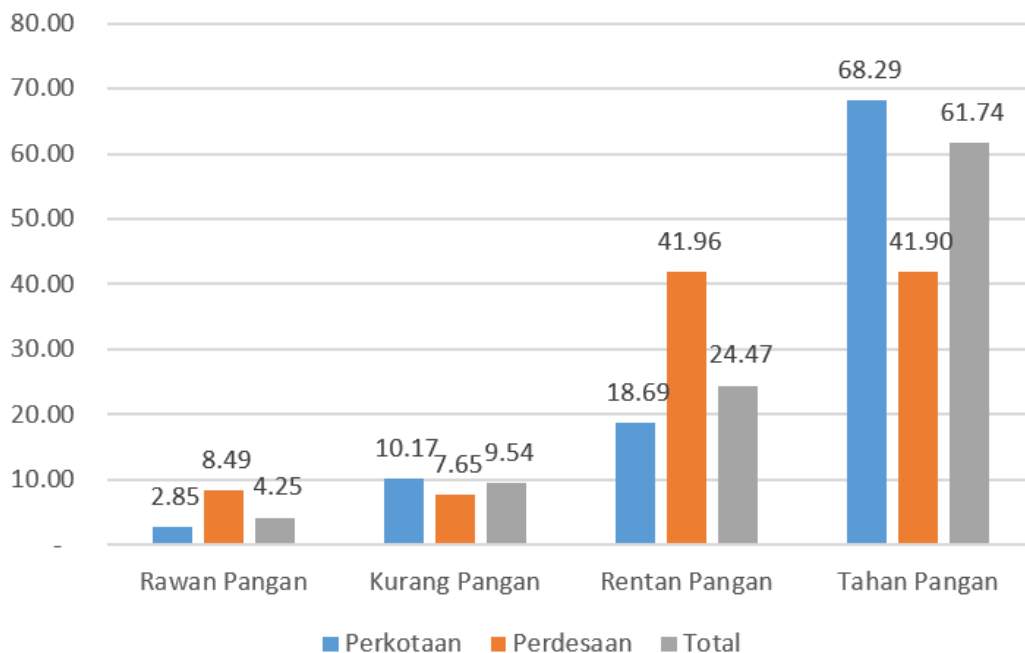
Kelemahan Fisik



Kelemahan Materi
karena Rendah
nya Investasi

Kerentanan

Keterisolasian



Persentase
Rumah Tangga
Menurut
Derajat Ketahanan
Pangan





BAB V

PENYEBAB KEMISKINAN

Berdasarkan kajian literatur yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, kemiskinan dapat ditinjau dari beberapa faktor, diantaranya: 1. Keterisolasian sebagai dampak dari kondisi topografi dan aksesibilitas; 2. Kerentanan dari akses layanan dasar; 3. Ketidakberdayaan dari kondisi perekonomian dan ketenagakerjaan; 4. Kelemahan fisik dari rendahnya kualitas SDM; 5. Kemiskinan materi dikarenakan oleh rendahnya investasi yang masuk; 6. Faktor bencana alam seperti perubahan iklim yang akan memberikan dampak pada kehidupan manusia.

Secara makro kondisi perekonomian, perkembangan harga, dan pengangguran termasuk di dalamnya setengah pengangguran juga berpengaruh terhadap kemiskinan. Namun faktor-faktor ini dipengaruhi juga dengan faktor lainnya. Hanya saja terdapat wilayah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi, ternyata tidak serta merta memiliki tingkat kemiskinan yang rendah. Begitu juga wilayah yang tingkat penganggurannya relatif rendah, ternyata juga tidak serta merta memiliki tingkat kemiskinan yang rendah. Oleh karena itu, perlu kehati-hatian dalam menganalisis masalah kemiskinan serta membuat kesimpulan tentang faktor-faktor penyebab kemiskinan.

5.1. Keterisolasian: Dampak dari Kondisi Topografi dan Aksesibilitas

Keterisolasian sebagai dampak dari kondisi topografi yang kurang menguntungkan merupakan salah satu penyebab utama kemiskinan. Beberapa wilayah di DIY memiliki tingkat aksesibilitas yang masih sangat terbatas. Hasil Podes 2018 menunjukkan bahwa terdapat kondisi wilayah yang dipisahkan oleh pegunungan dan lembah yang relative sulit dijangkau secara langsung. Terdapat 40 desa (38,46%) di Kabupaten Gunungkidul terletak di lereng/puncak pegunungan. Selanjutnya di Kabupaten Kulonprogo 22 desa (25%) dari seluruh desa terletak di lereng/puncak pegunungan. Selanjutnya di Kabupaten Bantul terdapat 20,97 persen atau 13 desa di lereng/puncak pegunungan, dan di Kabupaten Sleman sebesar 17,81 persen atau 13 desa. Sementara desa/kelurahan yang lain se-Daerah Istimewa

Yogyakarta berada pada wilayah dataran, yaitu sebanyak 350 desa/kelurahan (79,91 persen dari total 438 desa/kelurahan).

Kondisi geografis di DIY yang diperkirakan kurang terdapat pada 2 wilayah yaitu dataran tinggi/pegunungan (88 desa) dan wilayah tepi laut (33 desa). Kesulitan akses di kedua wilayah tersebut di DIY hampir merata kecuali di sebagian wilayah pegunungan. Tiga kabupaten dengan tingkat kemiskinan tinggi di DIY, memiliki kontur wilayah pegunungan dan tepi laut, dengan kondisi geografis yang cukup bervariasi. Hampir 329 ribu orang (73,33 persen) penduduk miskin di DIY terkonsentrasi di tiga kabupaten yaitu Kabupaten Kulonprogo, Bantul, dan Gunungkidul (BPS, 2019).

Kesulitan akses air merupakan kendala utama bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi ekonomi wilayah seperti pertanian, peternakan dan perkebunan. Kondisi alam dan geografis untuk Kabupaten Kulonprogo relatif lebih subur bila dibandingkan dengan Kabupaten Gunungkidul, karena tersedia saluran irigasi teknis dari Sungai Progo. Namun, penduduk di lereng/puncak pegunungan dihadapkan pada seringnya terjadi bencana alam berupa banjir dan tanah longsor yang terjadi saat musim penghujan. Terdapat 44 desa di Gunungkidul dan 26 desa di Kulonprogo yang mengaku mengalami bencana tanah longsor dalam periode 2015-2017.

Kondisi dan topografi yang terbatas menyebabkan pengembangan potensi ekonomi memiliki banyak tantangan. Pola permukiman penduduk yang cenderung berpencar di kawasan pegunungan dan lembah juga menjadi tantangan. Hal ini mengakibatkan keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar dan bantuan. Kehidupan masyarakat tetap terbelakang sehingga sulit keluar dari kemiskinan.

Dari sisi telekomunikasi dan transportasi, Kabupaten Kulonprogo, Bantul, dan Gunungkidul juga mengalami keterbatasan jika dibandingkan dengan wilayah lain. Hasil update Podes 2019, terlihat kondisi sinyal telepon seluler di ketiga kabupaten tersebut sudah cukup baik, tetapi masih ada 13 desa (14,77%) di Kabupaten Kulonprogo, 36 desa (25,00%) di Kabupaten Gunungkidul, dan 6 desa (8%) di Kabupaten Bantul yang kekuatan sinyalnya masih lemah. Bila sebagian penduduk ada yang bergantung pada sektor pertanian, maka pemanfaatan kecanggihan teknologi maka kemudahan akses produksi pertanian dapat tercipta

sehingga bisa meningkatkan pendapatan. Namun, diperlukan juga modal investasi yang cukup besar karena secara keseluruhan baru sekitar 51 persen desa/kelurahan di DIY yang sudah ada sinyal 4G/ LTE/3G/H/H+. Sarana dan prasarana angkutan seperti angkutan umum tersedia namun dari sisi jadwal dan kualitas belum memadai. Terdapat 61 desa (42,36%) di Gunungkidul dan 30 desa (34,09%) di Kulonprogo tidak tersedia angkutan umum.

5.2. Kerentanan: Terbatasnya Akses Layanan Dasar

Keterisolasian yang disebabkan oleh kondisi dan topografi wilayah yang bergunung dan berlembah, selain rentan menghambat pergerakan penduduk, barang dan jasa serta upaya pelayanan dasar kepada masyarakat juga menghambat upaya pemerataan hasil pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Artinya, pertumbuhan ekonomi yang terjadi hanya dinikmati oleh sebagian orang di pusat kota atau dekat dengan kota, yang memiliki akses lebih besar dibandingkan dengan daerah yang lebih jauh.

Dari laporan indeks pembangunan desa 2018 (BPS, 2019) menunjukkan bahwa indeks pelayanan dasar yang diukur dari ketersediaan dan kemudahan akses pelayanan pendidikan (TK-SLTA) dan pelayanan kesehatan (rumah sakit, rumah sakit bersalin, puskesmas, poliklinik/balai pengobatan, praktek dokter, praktek bidan, poskesdes/polindes, dan apotek) terendah di Kabupaten Kulonprogo dengan skor 75,66 diikuti Kabupaten Gunungkidul dengan skor 75,84. Sementara tiga kabupaten/kota lain secara berurutan Kota Yogyakarta 76,69; Sleman 77,70; dan Bantul 78,36.

Daerah relatif terisolasi dan akses layanan terbatas identik dengan rendahnya taraf pendidikan. Penyebab rendahnya taraf pendidikan diantaranya sebagai berikut: 1) kurangnya tenaga pengajar yang kompeten; 2) kurangnya partisipasi sekolah dari masyarakat; 3) banyak guru rangkap kelas terutama di daerah pegunungan; dan 4) rendahnya pendapatan guru menyebabkan guru sekolah (honorar) mencari uang tambahan lain. Pada bidang pendidikan, diketahui bahwa 437 desa/kelurahan di DIY telah mempunyai SD/MI. Lebih lanjut terdapat 316 desa/kelurahan yang telah terdapat SMP/MTs dan 140 desa/kelurahan yang telah terdapat SMA/MA/SMK. Lebih dari 60 persen desa di Kulonprogo dan

Gunungkidul belum memiliki SMA/MA/SMK. BPS (2019) menyebutkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Kulonprogo dan Gunungkidul yang lulus SLTA atau perguruan tinggi masing-masing secara berurutan hanya sekitar 26,26 dan 16,21 persen.

Faktor kerentanan lain yang menyebabkan penduduk mudah terjerumus ke dalam kemiskinan adalah rendahnya kualitas lingkungan. Banyak masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni, seperti lantai rumah berupa tanah (Kulonprogo 6,36%, Gunungkidul 8,12 persen), dinding terbuat dari kayu papan biasa/bambu (Kulonprogo 8,53%, Gunungkidul 14 persen), sulit menjangkau air bersih (selain air kemasan/isi ulang, ledeng, pompa, sumur dan mata air terlindung (Kulonprogo 15,26%, Gunungkidul 27,89 persen), dan sanitasi dasar jauh dari memadai. Berdasarkan Susenas 2019, di Kulonprogo dan Gunungkidul secara berurutan masih terdapat 2,51 dan 1,47 persen rumah tangga tidak memiliki fasilitas buang air besar, ataupun walaupun menggunakan fasilitas buang air besar masih menggunakan fasilitas bersama/umum/komunal yang masih sekitar 20,47 persen di DIY.

Untuk infrastruktur kesehatan, hasil Podes 2018 menunjukkan bahwa 126 desa/kelurahan telah memiliki puskesmas, baik puskesmas dengan rawat inap maupun tanpa rawat inap. Selain itu terdapat 300 desa/kelurahan yang terdapat puskesmas pembantu (pustu). Terkait ketersediaan tenaga kesehatan yang tinggal di desa, telah terdapat 200 desa/kelurahan yang terdapat dokter umum/spesialis pria dan 179 desa/kelurahan yang terdapat dokter umum/ spesialis wanita yang tinggal di desa.

5.3. Ketidakberdayaan: Kondisi Perekonomian dan Ketenagakerjaan

5.3.1 Kondisi Perekonomian

Perbedaan luas wilayah, potensi sumber daya alam, dan sumber daya manusia, serta ketersediaan teknologi yang dimiliki, menjadi salah satu penyebab perbedaan nilai perekonomian (PDRB) antar kabupaten/kota di DIY. Kabupaten Gunungkidul dengan luas wilayah hampir setengah dari luas wilayah DIY (46,63 persen), menciptakan nilai PDRB sebesar 18,89 triliun rupiah di tahun 2018 atau 13,36 persen dari total PDRB DIY. Kulon Progo yang luas wilayahnya kurang dari

seperlima bagian dari luas wilayah DIY (sebesar 18,40 persen) mampu meraih total PDRB sebesar 12,02 triliun rupiah, dengan persentase terhadap total PDRB DIY terendah yaitu 8,50 persen. Luas wilayah Kabupaten Sleman hampir sama dengan Kulon Progo, sekitar 18,04 persen dari luas wilayah DIY menghasilkan total PDRB sebesar 47,58 triliun rupiah atau sekitar 33,65 persen dari total PDRB DIY. Kabupaten Bantul memberikan sumbangan terhadap PDRB DIY sebesar 26,35 triliun rupiah atau sekitar 18,63 persen. Sementara itu Kota Yogyakarta dengan luas wilayah hanya 1,02 persen dari luas wilayah DIY, memberikan sumbangan sebesar 36,60 triliun rupiah atau sekitar 25,88 persen terhadap total PDRB DIY. Kota Yogyakarta merupakan pusat kegiatan ekonomi nonpertanian dan non penggalian.

Kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan mempunyai kontribusi besar dalam pembentukan PDRB DIY dan laju perkembangannya termasuk lambat baik menurut atas dasar harga berlaku maupun perkembangan riil atas dasar harga konstan. Bahkan, indeks perkembangan riil lapangan usaha pertanian ini paling rendah di antara semua lapangan usaha. Oleh karenanya untuk meningkatkan nilai tambah aktivitas ekonomi dalam lingkup pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan maka pemanfaatan perkembangan teknologi dalam pengelolaan usaha pertanian akan menghasilkan peningkatan output.

Sebagai daerah penyanggah utama perkembangan Kota Yogyakarta, ternyata Kabupaten Sleman menghasilkan nilai PDRB terbesar "secara relatif" dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Kabupaten Sleman masih memiliki potensi untuk terus berkembang lebih cepat, sementara potensi perkembangan Kota Yogyakarta diduga sudah mengarah ke titik jenuh. Kabupaten Bantul sebagai penyanggah kedua wilayah perkotaan juga berkembang relatif cepat. Sementara itu, Kabupaten Kulon Progo yang diharapkan akan melejit perkembangan ekonominya seiring dengan pembangunan mega proyek Bandara Internasional Yogyakarta (BIY), secara absolut laju pertumbuhannya sudah melesat paling tinggi walaupun nilainya masih paling kecil. Sementara itu Kabupaten Gunungkidul masih mengandalkan sektor pertanian dan kepariwisataan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Meskipun pertumbuhan ekonomi Gunungkidul sudah menembus angka 5 persen sejak tahun 2017, namun untuk memacu perkembangan

ekonominya, Gunungkidul masih membutuhkan suntikan investasi yang lebih tinggi.

Dengan luas wilayah hampir setengah wilayah DIY, nilai PDRB Kabupaten Gunungkidul menempati urutan keempat sampai dengan tahun 2019. Kegiatan perekonomian Kabupaten Gunungkidul masih bertumpu pada lapangan usaha pertanian. Lahan pertanian yang diusahakan di Gunungkidul sebagian besar merupakan lahan pegunungan berbatu sehingga sulit untuk memacu produktivitas pertanian terutama untuk komoditas padi dan sayuran yang memerlukan tanah yang subur dan banyak air. Sebaliknya, Kota Yogyakarta dengan luas wilayah dan jumlah penduduk terkecil, mampu mencapai nilai PDRB yang jauh lebih besar, yakni menempati urutan kedua. Hal ini sangat wajar, karena selain merupakan pusat pemerintahan ibu kota DIY, juga sekaligus pusat aktivitas ekonomi nonpertanian. Ketersediaan sarana dan prasarana serta teknologi yang lebih maju, mendukung semua aktivitas ekonomi yang ada di Kota Yogyakarta, kecuali pertanian dan penggalian.

Komposisi struktur ekonomi masing-masing daerah menurut kategori menarik untuk dicermati karena dapat mencerminkan kemampuan daya saing ekonomi antar kabupaten/kota. Struktur dan kontribusi kategori PDRB menurut lapangan usaha di kabupaten/kota di tahun 2019 bervariasi. Di Kabupaten Kulonprogo, lapangan usaha konstruksi tampak lebih unggul. Nilai tambah lapangan usaha ini mencapai sekitar Rp2,40 triliun atau sekitar 19,95 persen dari nilai PDRB Kulonprogo. Selanjutnya, lapangan usaha pertanian dan perdagangan, masing-masing menduduki peringkat kedua dan ketiga dengan kontribusi 15,86 persen dan 12,36 persen.

Kabupaten Bantul dan Sleman memiliki struktur yang sama untuk kontributor PDRB peringkat 1 dan 3, yaitu lapangan usaha industri pengolahan menduduki peringkat pertama dan penyediaan akomodasi dan makan minum menempati peringkat ketiga. Selain merupakan pusat bisnis seperti supermarket, *hipermart*, rumah pertokoan, hotel, dan bisnis hiburan, kedua kabupaten tersebut juga menjadi sentra industri baik usaha mikro-kecil maupun usaha menengah-besar. Perbedaanannya, pertanian masih menjadi andalan kedua di Kabupaten Bantul sedangkan konstruksi menjadi andalan kedua di Kabupaten Sleman. Sementara itu,

Kabupaten Gunungkidul masih mengandalkan lapangan usaha pertanian dalam menopang pertumbuhan ekonominya. Lapangan usaha ini mampu menciptakan nilai tambah sebesar 4,43 triliun atau sekitar 23,48 persen dari PDRB Gunungkidul. Kabupaten Gunungkidul merupakan penghasil komoditas utama pertanian DIY, yaitu padi dan jagung. Bersama dengan Kabupaten Sleman, Gunungkidul merupakan penghasil terbesar padi di DIY. Namun untuk komoditas jagung, 85 persen jagung DIY dihasilkan oleh Gunungkidul. Sementara itu, penopang utama perekonomian di Kota Yogyakarta adalah sektor penyediaan akomodasi dan makan minum.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kenaikan pendapatan per kapita yang terjadi belum sepenuhnya dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan penduduk khususnya kelompok miskin. Pembangunan ekonomi masih belum inklusif karena hanya melihat laju pertumbuhan tanpa memperhatikan penurunan tingkat kemiskinan. Belum semua penduduk miskin memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Pembangunan yang sudah berlangsung selama ini belum menyentuh sektor-sektor yang berkaitan dengan kelompok miskin. Menurut Balisacan (2003), strategi pertumbuhan yang berpihak pada orang miskin (*pro poor growth*) dapat dilakukan dengan menerapkan kebijakankebijakan di bidang infrastruktur, pertanian, pengembangan modal manusia, dan akses teknologi. Artinya, distribusi pendapatan masih kurang merata, kualitas SDM masih rendah, dan ketersediaan infrastruktur masih terbatas.

Faktor lain penyebab rendahnya produktivitas ekonomi kelompok miskin dan rentan adalah belum optimalnya skala usaha dan keterhubungan dengan pasar yang lebih luas. Di satu sisi, masyarakat miskin dan rentan terlibat dalam sektor ekonomi yang produktivitasnya rendah serta komoditas yang belum terhubung dengan pasar yang lebih luas. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya pengembangan skema kerjasama antara swasta dan kelompok masyarakat serta adopsi teknologi dan inovasi yang masih rendah. Akumulasi dari kondisi tersebut membuat sektor ekonomi produktif di wilayah tersebut terjebak pada skema *business as usual* dan berkuat pada sektor-sektor usaha yang sudah jenuh.

Jika dianalisis lebih lanjut berdasarkan struktur PDRB menurut penggunaan, memiliki struktur ekonomi yang unik. PDRB DIY masih dominan

ditopang oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Kecenderungan menurunnya ekspor dan impor luar negeri di satu sisi mengurangi atau menambah cadangan devisa yang tersedia, namun di sisi lain mencerminkan adanya geliat peningkatan produksi dalam negeri. Net ekspor antar daerah cenderung menurun, artinya nilai arus barang dan jasa yang masuk lebih besar dibandingkan dengan yang keluar. Sisi positifnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa permintaan untuk konsumsi akhir maupun konsumsi antara meningkat karena menggeliatnya ekonomi DIY.

Penurunan porsi net ekspor antar daerah juga bisa bermakna terbatasnya penyediaan untuk memenuhi konsumsi internal daerah. Kondisi ini dapat menjadi pendorong bagi unit-unit produksi untuk mengoptimalkan kapasitas produksi atau meningkatkan kualitas produksi sehingga memiliki daya saing lebih terhadap produk luar daerah. Demikian pula seharusnya juga menjadi ruang untuk optimalisasi peran pemerintah dengan akurasi kebijakan perencanaan maupun terobosan implementasinya untuk menyiapkan berbagai insentif investasi yang mudah dalam birokrasinya. Sasaran lebih jauh dari kebijakan tersebut adalah untuk dapat mendorong pembangunan industri berorientasi ekspor dan pabrikan yang menghasilkan produk kebutuhan di wilayah domestik.

Terdapat beberapa kemungkinan penyebab tingginya ketergantungan terhadap barang dan jasa dari daerah lain. Kemungkinan pertama, daerah atau provinsi memang tidak memiliki potensi atau potensi yang tersedia tidak mendukung untuk menghasilkan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan mayoritas masyarakat di wilayah tersebut. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat didatangkan dari luar daerah. Kemungkinan kedua, daerah atau provinsi tersebut memiliki potensi yang cukup untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan penduduknya, tetapi barang dan jasa tersebut sangat sulit untuk diakses oleh masyarakat karena keterisolasian wilayah dan lebih mudah untuk mendapatkan barang melalui perdagangan antar pulau atau daerah lain.

5.3.2 Kondisi Ketenagakerjaan

Dari sisi ketenagakerjaan, tenaga kerja merupakan faktor yang sangat penting bagi kemajuan ekonomi suatu wilayah. Terdapat beberapa hal yang memiliki dampak terhadap masalah kemiskinan dan menarik untuk disoroti seperti pekerjaan menurut lapangan pekerjaan utama, status bekerja dari pekerja (pekerja formal atau informal), tingkat pengangguran terbuka, dan setengah pengangguran.

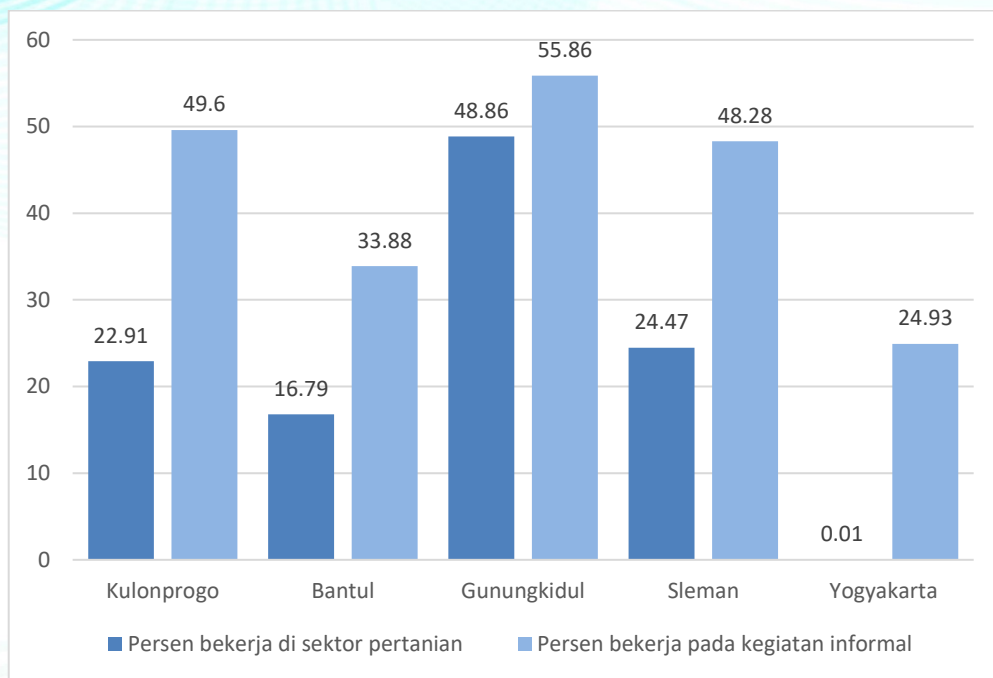
Lapangan pekerjaan utama dan status bekerja.

Berdasarkan data BPS, pada Agustus 2019, sebanyak 19,01 persen penduduk DIY usia 15 tahun ke atas bekerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, baik berusaha sendiri maupun sebagai buruh atau karyawan. Kemudian yang cukup besar pula porsinya menyerap tenaga kerja di DIY adalah di perdagangan yang mencapai 18,96 persen. Sisanya bekerja pada kegiatan di sektor lainnya seperti industri, transportasi, konstruksi, dan lain-lain. Dengan demikian kegiatan di sektor pertanian merupakan lapangan kerja utama bagi sebagian besar angkatan kerja. Persentase angkatan kerja yang bekerja di sektor pertanian masih cukup tinggi terutama di Kabupaten Kulonprogo dan Gunungkidul. Di Kabupaten Kulonprogo misalnya, pada tahun 2019 persentase angkatan kerja yang bekerja di sektor pertanian mencapai 25,95 persen, sedangkan di Gunungkidul yang bekerja pada sektor tersebut terdapat 42,21 persen, jauh di atas rata-rata di DIY.

Jika dianalisis lebih lanjut berdasarkan status bekerja penduduk usia 15 tahun ke atas, lebih dari 51 persen tenaga kerja di DIY bekerja di kegiatan informal. Penduduk Kabupaten Gunungkidul secara relatif paling banyak yang bekerja di sektor informal. Pada bulan Agustus 2019, persentase pekerja sektor informal di Kabupaten Gunungkidul mencapai 69,15 persen disusul Kulonprogo (59,74 persen), Bantul (49,25 persen), Sleman (42,97 persen), dan Kota Yogyakarta (39,91 persen). Tingkat upah tenaga kerja di sektor pertanian dan biasanya bersifat informal, nilainya lebih rendah apabila dibandingkan dengan sektor lainnya, maka dapat dipastikan pendapatan dari pekerja di sektor pertanian (1,1 juta per bulan Agustus 2019) belum memadai untuk mendukung kehidupan ekonomi rumah tangga.

Khusus untuk penduduk miskin, persentase penduduk miskin yang bekerja di kegiatan informal di Kabupaten Kulonprogo dan Gunungkidul relatif lebih tinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya di DIY, pada tahun 2019 berkisar antara 49 – 56 persen, dan yang bekerja di sektor pertanian di kedua kabupaten tersebut berkisar antara 23 – 49 persen.

Gambar 5.3.2.1 Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten/kota dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2019

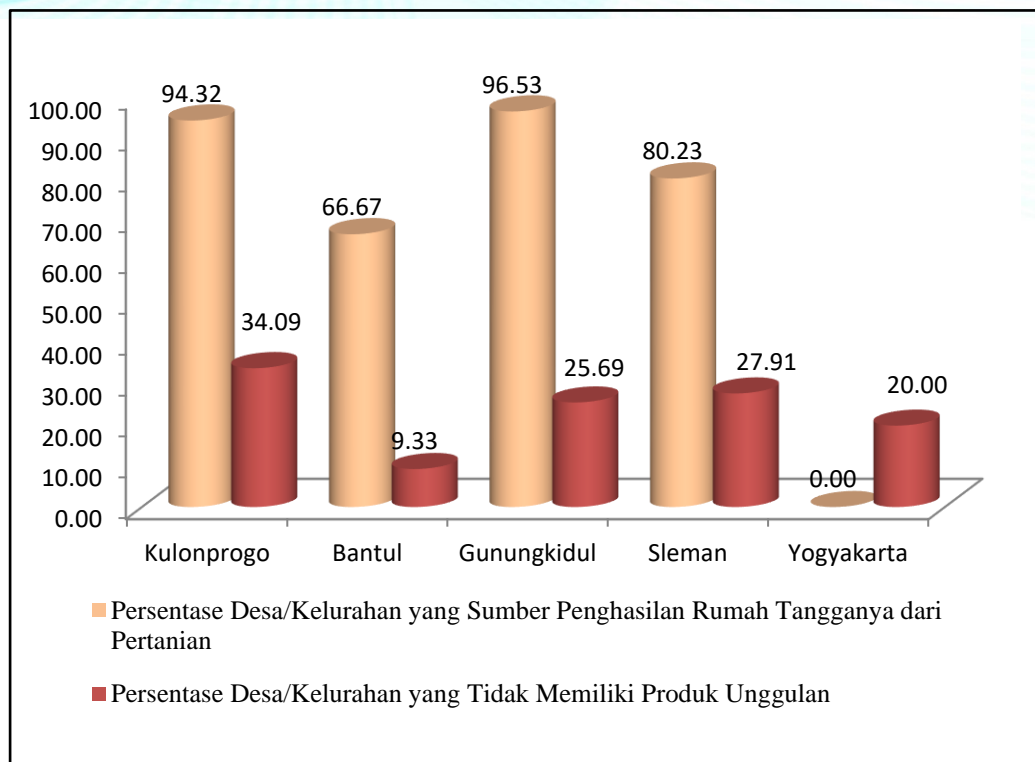


Catatan: **Bekerja di sektor informal** adalah penduduk miskin yang mempunyai status/kedudukan dalam pekerjaan utamanya adalah berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, atau pekerja keluarga/tidak dibayar.

Berdasarkan data Podes 2018, mayoritas desa-desa di DIY sebagian besar rumahtangganya mengandalkan sumber penghasilannya dari lapangan pekerjaan pertanian, khususnya dari pertanian padi. Sektor ini akan sulit tumbuh jika tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang dapat menghubungkannya dengan pasar. Hanya sebagian kecil saja desa-desa di DIY yang terhubung dengan jalan aspal/beton dari/ke lokasi sentra produksi pertanian, terutama di Kabupaten Gunungkidul yang sekitar 70 persen desa jalannya masih tanah atau baru diperkeras. Selain itu penyebab perekonomian desa-desa di wilayah tersebut tidak berkembang karena berbeda dengan desa-desa lainnya yang memiliki produk

unggulan sehingga dapat meningkatkan pendapatan penduduknya. Di Kabupaten Kulonprogo misalnya, masih terdapat 34,09 persen desa yang belum memiliki produk unggulan. Dengan perkataan lain, terdapat korelasi antara struktur ekonomi dan lapangan kerja yang dominan pada sektor pertanian dan sektor informal dengan tingkat kemiskinan.

Gambar 5.3.2.2 Persentase Desa/Kelurahan yang Sumber Penghasilan Utama Penduduk dari Pertanian atau yang Tidak Memiliki Produk Unggulan, Podes 2018



Sumber: BPS(Podes,2018)

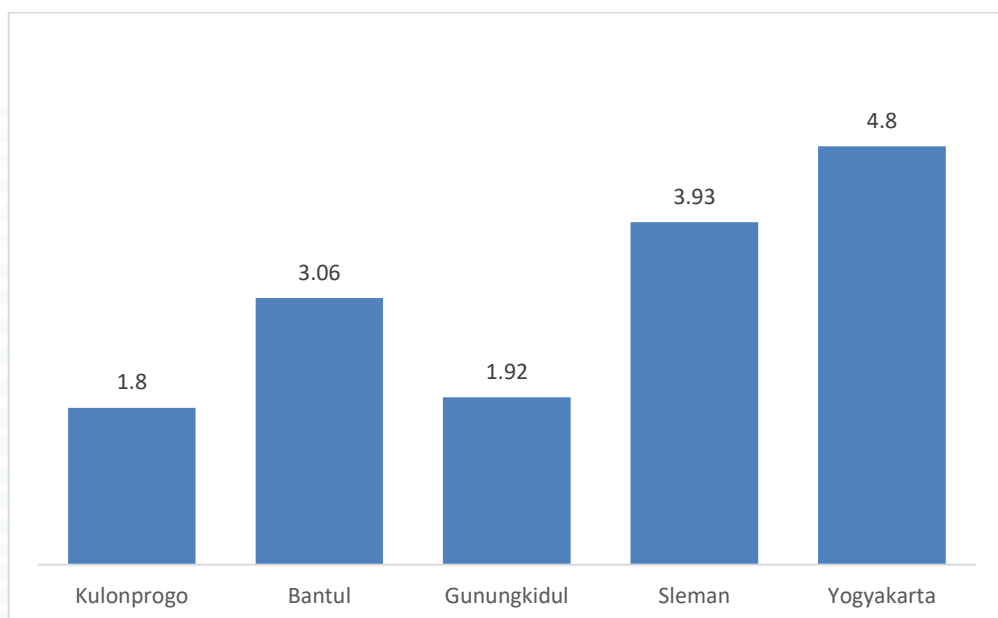
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Setengah Pengangguran.

Secara umum, berdasarkan klasifikasi wilayah perdesaan dan perkotaan, TPT di daerah perdesaan lebih rendah dibandingkan dengan daerah perkotaan. TPT perdesaan dan perkotaan di DIY tahun 2019 masing-masing sebesar 1,52 persen dan 3,78 persen. Artinya persentase angkatan kerja yang terserap pada pasar kerja di perdesaan lebih tinggi dibanding di perkotaan. Jumlah pengangguran lebih banyak di perkotaan daripada di perdesaan, terutama untuk yang berpendidikan SMA ke atas.

Lapangan usaha di daerah perdesaan didominasi oleh pertanian, sehingga penyerapan tenaga kerja relatif lebih tinggi. Selain itu, penduduk desa yang telah selesai sekolah dan merasa cukup pendidikannya sebagian besar memilih merantau ke perkotaan untuk mencari pekerjaan. Bahkan, sebagian angkatan kerja di perdesaan sudah terbiasa menjadi pekerja keluarga dalam rumah tangga meskipun belum mempunyai pekerjaan tetap.

Menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan, tingkat pengangguran cenderung tinggi untuk mereka yang berpendidikan SMA ke atas dan cenderung rendah untuk mereka yang berpendidikan rendah (SLTP ke bawah). Pada tahun 2019, TPT tertinggi tercatat pada kelompok berpendidikan Sarjana yaitu sebesar 4,56 persen, disusul kelompok berpendidikan SMK sebesar 4,20 persen. Sementara untuk kelompok pendidikan SMP ke bawah, nilai TPT-nya kurang dari 3 persen. Dilihat menurut jenis kelamin, secara umum TPT penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan, masing-masing sebesar 3,18 persen dan 3,09 persen.

Gambar 5.3.2.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Kabupaten/kota, Agustus 2019



Sumber : Sakernas Agustus 2020

Untuk jenjang pendidikan hingga SMP dan SMA Umum TPT penduduk laki-laki lebih tinggi. Namun, untuk jenjang pendidikan SMA Kejuruan hingga Sarjana, TPT penduduk perempuan lebih tinggi. Bila kita perhatikan berdasarkan kabupaten/kota tampak bahwa TPT di Kulonprogo dan Gunungkidul cenderung lebih rendah dibanding kabupaten lainnya di DIY.

Akan tetapi bila kita lihat persentase penduduk bekerja menurut jam kerja, terlihat bahwa penduduk yang bekerja kurang dari 35 jam terindikasi sebagai setengah pengangguran yang mencapai 33,02 persen. Pada lapangan kerja pertanian, kehutanan, dan perikanan masih sekitar 66 persen bekerja di bawah 35 jam. Dari penduduk yang bekerja kurang dari 35 jam tersebut, yang tergolong setengah pengangguran (terpaksa kurang jam bekerja) mencapai 14,78 persen.

5.4 Kelemahan Fisik: Kualitas SDM Rendah

Ketahanan Pangan

World Bank (2002:112) mengkategorikan karakteristik penduduk miskin menurut komunitas, wilayah, rumah tangga dan individu. Karakteristik rumah tangga dan individu diantaranya adalah Karakteristik sosial meliputi pendidikan, kesehatan dan tempat tinggal rumah tangga. Bila SDM rendah akan berkaitan dengan produktitas kerja yang tidak optimal dan tidak berkualitas. Dengan demikian, akan berdampak menurunnya pendapatan.

Asupan pangan akan menjadi salah satu input pembentuk modal manusia yang mempengaruhi kesehatan dan capaian pendidikan di masa depan (Lindawati dan Subhechanis Saptanto, 2014). Kemudahan akses akan asupan pangan bergizi dan berkualitas dapat diamati dari tingkat ketahanan pangan. UU No.18/2012 mengenai pangan menjelaskan bahwa individu dan masyarakat dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan apabila Ketahanan Pangan dan Keamanan Pangan Nasional tercipta.

Indikator ketahanan pangan akan mengelompokkan rumah tangga menjadi 4 bagian yakni tahan pangan, rentan pangan, kurang pangan dan rawan pangan. Klasifikasi ini berdasarkan kecukupan energi dan pangsa pengeluaran pangan. Berdasarkan hasil penelitian Jonsson dan Toole (1991) yang diadopsi oleh Maxwell

et al (2000) seperti yang dikutip oleh Suharyanto(2014), Untuk mengukur tingkat ketahanan pangan tingkat rumah tangga, digunakan klasifikasi silang dua indikator ketahanan pangan, yaitu pangsa pengeluaran pangan dan kecukupan konsumsi energi (Kkal) seperti yang ditunjukkan pada Tabel 5.4.1.

Menurut tabel tersebut, ketercukupan pangan diidentifikasi dari indikator ketercukupan kalori yang dikonsumsi dan mencerminkan produktivitas suatu sumber daya manusia. Batas 100% ketercukupan kalori adalah 2.150 kkal/kapita/hari. Rumah tangga dikatakan cukup kalori jika konsumsi kalori per kapita rumah tangga lebih dari 80%(1.600kkal/kapita/hari). Rumah tangga dikatakan kurang kalori jika konsumsi kalori per kapita rumah tangga kurang dari atau sama dengan 80%(1.720 kkal/kapita/hari). Pangsa pengeluaran pangan adalah rasio pengeluaran untuk belanja pangan dan pengeluaran total rumah tangga selama sebulan.

Tabel 5.4.1 Indikator Ketahanan Pangan dengan Menggunakan Klasifikasi Silang Kecukupan Energi dan Pangsa Pengeluaran Pangan

Konsumsi energi per ekuivalen dewasa	Pangsa Pengeluaran Pangan	
	Rendah (< 60% pengeluaran total)	Tinggi (≥ 60% pengeluaran total)
Cukup (> 80% syarat kecukupan energi)	Tahan Pangan (4)	Rentan Pangan (3)
Kurang (≤ 80% syarat kecukupan energi)	Kurang Tahan (2)	Rawan Tahan (1)

Sumber : Jonsson and Tole, 1991 dalam Suharyanto dll, 2014

Pangsa pengeluaran pangan mencerminkan kemampuan daya beli. Pangsa pengeluaran pangan dikatakan rendah jika kurang dari 60% dan dikatakan tinggi jika lebih dari sama dengan 60%. Kedua kategori dari masing-masing indikator tersebut disilangkan sehingga meng-hasilkan empat kategori derajat ketahanan pangan rumah tangga yaitu rumah tangga tahan pangan, rentan pangan, kurang pangan, dan rawan pangan.

Pada rumah tangga miskin identik dengan tingkat produktifitas dan daya beli rendah. Rendahnya pendapatan yang dimiliki menyebabkan alokasi untuk pengeluaran pangan tidak dapat memenuhi kecukupan energinya. Sehingga

pendapatan dan pengetahuan gizi merupakan faktor yang menentukan kelompok rumah tangga ini untuk mencapai ketahanan pangan. Dalam kategori ketahanan pangan masuk dalam kelompok rawan pangan. Rumah tangga dikatakan rawan pangan apabila ketercukupan kalori kurang dan pangsa pengeluaran pangan tinggi. Pendapatan dan pengetahuan gizi merupakan faktor yang menentukan kelompok rumah tangga ini untuk mencapai ketahanan pangan. Pendapatan yang meningkat disertai dengan pengetahuan tentang gizi, diharapkan dapat menjadikan kelompok rumahtangga ini mencapai tahan pangan.

Tabel 5.4.2 Persentase Rumah Tangga Miskin Menurut Kerawanan Pangan, Tipe Wilayah Tempat Tingal dan Kabupaten/Kota, 2019

Tipe Daerah/ Kab/Kota		Rawan Pangan	Kurang Pangan	Rentan Pangan	Tahan Pangan
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
Tipe Daerah	Perkotaan	2,85	10,17	18,69	68,29
	Perdesaan	8,49	7,65	41,96	41,90
	Total	4,25	9,54	24,47	61,74
Kab/ Kota	Kulonprogo	8,66	13,40	29,01	48,93
	Bantul	5,88	17,89	18,40	57,83
	Gunungkidul	7,13	5,92	49,03	37,92
	Sleman	0,58	1,90	18,28	79,24
	Yogyakarta	3,23	15,63	14,44	66,70
	DIY	4,25	9,54	24,47	61,74

Sumber: BPS(Susenas 2019)

Rumah tangga dikatakan kurang pangan apabila ketercukupan kalori kurang tetapi pangsa pengeluaran pangan rendah. Rumah tangga ini meng-indikasikan produktivitas yang rendah tetapi tidak bermasalah dalam hal daya beli. Rumah tangga ini dapat dibantu dengan penyuluhan gizi. Rumah tangga dikatakan rentan pangan apabila pangsa pengeluaran pangan tinggi tetapi cukup kalori. Rumah tangga ini mengindikasikan daya beli yang rendah tetapi tidak bermasalah dalam hal produktivitas. Rumah tangga ini dapat dibantu dengan bantuan penguatan daya

beli di mana salah satunya melalui program Raskin. Rumah tangga tahan pangan adalah rumah tangga yang paling baik kondisi ketahanan pangannya di mana pangsa pengeluaran pangan rendah dan cukup kalori. Rumah tangga ini menjadi rumah tangga ideal yang diinginkan dalam hal ketahanan pangan. Ketahanan pangan rumah tangga miskin dapat dilihat dari data hasil Susenas.

Hasil Pendataan Susenas Maret 2019, proporsi rumah tangga masuk dalam kategori rawan pangan sebesar 4,25 persen. Proporsi tersebut semakin besar seiring meningkatnya tingkat ketahanan pangan. Banyaknya rumah tangga tahan pangan mencapai 61,74 persen. Hal yang sama terlihat baik di wilayah perkotaan maupun di wilayah perdesaan.

Tabel 5.4.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Derajat Ketahanan Pangan dan Desil Pengeluaran, 2019

Desil/ Kelompok Pengeluaran	Rawan Pangan	Kurang Pangan	Rentan Pangan	Tahan Pangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Desil 1	32,14	23,49	40,00	4,36
Desil 2	10,32	16,86	62,01	10,80
Desil 3	3,15	14,84	52,03	29,98
Desil 4	2,46	8,60	43,62	45,33
Desil 5	1,20	10,85	29,62	58,33
Desil 6	0,00	6,46	26,40	67,14
Desil 7	0,68	8,39	16,79	74,14
Desil 8	1,74	6,83	8,57	82,86
Desil 9	0,00	5,17	2,32	92,51
Desil 10	0,00	3,55	0,68	95,76
Total	4,25	9,54	24,47	61,74

Sumber: BPS(Susenas 2019)

Bila dianalisis menurut kabupaten/kota, proporsi rumah tangga meningkat sejalan dengan meningkatnya derajat ketahanan pangan. Rumah tangga yang tinggal di Kabupaten Kulonprogo, Bantul, Sleman dan Kota Yogyakarta terbanyak masuk dalam kategori tahan pangan yakni antara 48 persen hingga 79 persen. Sementara untuk rumah tangga Kabupaten Gunungkidul didominasi oleh rumah tangga kategori rentan Pangan. Selanjutnya, kategori rumah tangga rawan pangan

masih ditemukan di semua kabupaten/kota. Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul menjadi 2 kabupaten dengan persentase rumah tangga rawan pangan tertinggi, masing-masing sebesar 8,66 persen dan 7,13 persen.

Jika ditinjau menurut persentil pengeluaran tampak jelas adanya ketimpangan persentase rumah tangga pada masing-masing derajat ketahanan pangan. Tabel 5.4.3 menunjukkan semakin tinggi persentil pengeluaran maka persentase rumah tangga tahan pangan semakin besar. Sebaliknya semakin kecil persentil pengeluaran semakin besar persentase rumah tangga rawan pangan. Seperti terlihat bahwa pada rumah tangga dengan pengeluaran 10 persen teratas, 95,76 persen rumah tangga masuk kategori tahan pangan. Sementara tidak ada rumah tangga yang tergolong rawan pangan.

Sebaliknya, rumah tangga dengan rata-rata pengeluaran 10 persen terbawah, persentase rumah tangga tahan pangan hanya mencapai 4,36 persen, sedangkan 32,14 persen rumah tangga masuk kategori rawan pangan. Rumah tangga strata 10 persen terbawah kedua juga menunjukkan kondisi ketahanan pangan hampir sama. Tercatat 10,32 persen rumah tangga pada kelompok ini berkategori rawan pangan dan hanya 10,80 persen diantaranya tahan pangan. Kategori ketahanan pangan terlihat bahwa rumah tangga di persentil 1 dan 2 sangat perlu untuk ditingkatkan daya beli dan pengetahuan tentang kualitas gizi makanan. Fakta lain juga memperlihatkan bahwa sebanyak 40,00 persen rumah tangga di persentil 1 dan 62,01 persen rumah tangga di persentil 2 rentan pangan. Mereka secara ekonomi kurang namun kecukupan kalori cukup. Upaya pengentasan dari rentan pangan adalah dengan peningkatan pendapatan disamping penyuluhan gizi agar dapat memenuhi konsumsi protein, vitamin selain kalori.

Proporsi rumah tangga tergolong rawan pangan mayoritas adalah rumah tangga pada rumah tangga di desil 1 dan desil 2 (Tabel 5.4.4). Artinya bahwa rumah tangga dengan ketercukupan kalori kurang dan pangsa pengeluaran pangan tinggi mayoritas berasal dari rumah tangga pada kelompok 20 persen terbawah. Ini terjadi di semua Kabupaten/kota. Seperti di Kota Yogyakarta, proporsi rumah tangga masuk dalam kategori rawan pangan berasal dari rumah tangga di desil 1 mencapai 74,95 persen dan besaran angka tersebut terus menurun seiring meningkatkan desil rumah tangga.

Tabel 5.4.4. Proporsi Rumah Tangga Rawan Pangan Menurut Desil Pengeluaran dan Kabupaten/Kota, 2019

Desil/ Kelompok Pengeluaran	Kprogo	Bantul	GKIdul	Sleman	Ykarta	DIY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Desil 1	53,32	51,01	48,91	100,00	74,95	61,09
Desil 2	28,47	15,20	28,86	0,00	12,71	21,84
Desil 3	9,35	10,21	15,13	0,00	6,90	6,41
Desil 4	3,74	1,81	4,96	0,00	0,00	4,33
Desil 5	1,35	9,83	0,37	0,00	5,44	2,31
Desil 6	3,77	0,63	1,77	0,00	0,00	0,00
Desil 7	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	1,09
Desil 8	0,00	9,33	0,00	0,00	0,00	2,92
Desil 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desil 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS(Susenas 2019)

Pola Pangan Harapan(PPH)

Upaya penduduk untuk menjaga kesehatan selain kemudahan akan akses mendapatkan makanan yang bergizi, tetapi juga ditopan oleh kualitas serta kuantitas konsumsi pangan. Kedua hal tersebut dalam jangka pendek dapat berpengaruh terhadap produktifitas kerja dan dalam jangka panjang dapat berimbas terhadap status gizi dan kesehatan masyarakat. Dengan demikian, upaya meningkatkan status kualitas sumberdaya manusia salah satu hal yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh. Penduduk perlu mengkonsumsi Makanan sehat yakni makanan yang mengandung beraneka ragam nutrisi. Keragaman tersebut meliputi pola konsumsi pangan yang cukup dalam jumlah dan mutu gizi, aman, beragam dan terjangkau.

Keanekaragaman pangan diinilai dengan menggunakan pendekatan Pola Pangan Harapan (PPH). FAO-RAPA(1989) mendefinisikan **PPH sebagai “komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya”**. Dengan demikian PPH

merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi baik dalam jumlah, maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. Mutu konsumsi pangan penduduk dapat dilihat dari skor pangan (*dietary score*) dan dikenal sebagai skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan seimbang.

Angka kecukupan energi mengadopsi pada hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIII tahun 2004 dan IX tahun 2008, telah menetapkan 2000 kilokalori perkapita perhari pada tingkat konsumsi energi dan 2200 kilokalori perkapita perhari pada tingkat ketersediaan sebagai Angka Kecukupan Energi (AKE) tingkat Nasional.

Tabel 5.4.5 Skor PPH Menurut Tipe Wilayah,2019

No	Kelompok Pangan	Skor PPH			
		PPH Maksimal	Kota	Desa	Kota+desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Padi-padian	25,0	25,00	25,00	25,00
2	Umbi-umbian	2,50	0,85	0,95	0,88
3	Pangan Hewani	24,0	24,00	22,26	24,00
4	Minyak dan Lemak	5,0	5,00	5,00	5,00
5	Buah/Biji Berminyak	1,0	0,09	0,12	0,10
6	Kacang-kacangan	10,0	6,04	7,47	6,42
7	Gula	2,50	2,50	2,50	2,50
8	Sayur dan Buah	30,0	30,00	28,64	30,00
9	Lain-lain	0,0	0,00	0,00	0,00
	Total	100	93,48	91,94	93,90

Sumber: BPS(Susenas 2019)

PPH akan mengelompokkan pangan menjadi 9 kelompok komodite makanan. Masing-masing kelompok akan diberikan penimbang menurut pengelompokan zat nutrisi makanan yakni kelompok pangan sumber karbohidrat dan energi, kelompok pangan sumber protein/lauk pauk dan kelompok pangan sumber vitamin dan mineral. Sementara skor PPH dihitung dengan mempertimbangkan penimbang, nilai kandungan energi aktual, angka kecukupan eneri serta batas maksimal skor PPH.

Berdasarkan data hasil Susenas Maret 2019, skor PPH menurut tipe wilayah seperti pada tabel 5.4.5. Skor PPH di D.I. Yogyakarta tahun 2019 baru mencapai 93,90. Artinya pola pangan tahun 2019 belum mencapai ideal yakni 100. Skor PPH di perkotaan (93,48) lebih tinggi daripada di perdesaan (91,94). Hal ini menunjukkan mutu keragaman konsumsi pangan di perkotaan lebih beragam daripada di perdesaan.

Pola konsumsi di D.I. Yogyakarta tahun 2019, menurut kelompok makanan memberikan keanekaragaman yang sama antara kota dan perdesaan. Sumber karbohidrat didominasi oleh kelompok padi-padian. Ini terjadi baik di perkotaan maupun di perdesaan. Sementara pola pangan bersumber dari protein bersumber dari protein hewani. ini terjadi baik di perkotaan maupun di perdesaan. Di lain pihak komoditas kacang-kacangan, buah/biji berminyak dan umbi-umbian belum mencukupi nilai ideal PPH.

Tabel 5.4.6 Skor PPH Menurut Kabupaten/kota,2019

No	Kelompok Pangan	Skor AKE						
		Mak	KP	BTL	GK	SLM	YK	DIY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Padi-padian	25,00	29,98	29,01	32,29	33,21	30,34	31,24
2	Umbi-umbian	2,50	1,07	0,69	1,02	0,96	0,63	0,88
3	Pangan Hewani	24,00	21,72	31,28	21,39	38,50	35,74	31,09
4	Minyak dan Lemak	5,00	5,59	5,60	7,01	6,29	5,51	6,08
5	Buah/Biji Berminyak	1,00	0,08	0,16	0,08	0,09	0,03	0,10
6	Kacang-kacangan	10,00	6,28	5,79	8,24	6,02	6,08	6,42
7	Gula	2,50	2,60	3,33	2,50	2,91	1,86	2,79
8	Sayur dan Buah	30,00	34,58	32,76	27,19	36,34	33,41	33,10
9	Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Energi (KKal)	2,000	2,034	2,105	2,164	2,383	2,141	2,201
	PPH	100	91,65	93,14	90,43	93,57	92,61	93,90

Sumber: BPS(Susenas 2019)

Tingkat konsumsi energi baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sudah mencapai angka kecukupan energi (AKE) yang telah ditetapkan dalam

Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIII tahun 2004 yaitu sebesar 2000 kkal/hari. Tingkat konsumsi energi di D.I. Yogyakarta mencapai 110 persen. Tingkat konsumsi energi kabupaten/kota tertinggi adalah Kabupaten Sleman(119,15%), diikuti oleh Kabupaten Gunungkidul(108,21%), Kota Yogyakarta(107,03%), Kabupaten Bantul(105,25%) dan yang terkecil adalah Kabupaten Kulonprogo(101,69%).

Keberagaman pola pangan menurut kabupaten kota memperlihatkan bahwa skor PPH tahun 2019 berkisar antara 90,43 sampai dengan 93,57. Semua Skor PPH kabupaten/kota belum mencapai nilai ideal. Skor PPH tertinggi adalah Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunungkidul adalah yang terendah. Dibandingkan dengan Skor PPH DIY, semua Kabupaten/kota lebih rendah dari skor PPH D.I. Yogyakarta.

Pola pangan menurut kelompok komodite makanan, tampak bahwa komposisi PPH pada pola pangan penduduk disemua kabupaten/kota masih didominasi oleh kelompok padi-padian. Lebih dari 55 persen kalori berasal dari komodite padi-padian. Sumber energi berikutnya adalah komodite pangan hewani serta minyak dan lemak. Hal ini, mengindikasikan bahwa keseimbangan pola pangan masih perlu ditingkatkan dengan mengurangi konsumsi padi-padian dialihkan dengan konsumsi komodite lainnya.

Keseimbangan konsumsi nutrisi dengan membandingkan angka kecukupan energi dan batas maksimal konsumsi energi tiap kabupaten/kota mempunyai gambaran yang berbeda beda. Sumber energi dari padi-padian, sayur dan buah, minyak dan lemak di semua kabupaten/kota telah melebihi dari batas maksimum. Di lain pihak, semua angka kecukupan energi untuk komodite umbi-umbian, buah/biji berminyak serta kacang-kacangan masih dibawah batas maksimum. Sumber energi dari kelompok hewani hanya Kabupaten Kulonprogo(21,72%) dan kabupaten Gunungkidul(21,39%) masih dibawah angka maksimum. Sementara konsumsi komodite gula untuk penduduk di Kota Yogyakarta(1,86) saja yang belum melebihi angka maksimal.

Tabel 5.4.7 menampilkan skor PPH menurut desil pengeluaran rata-rata perkapita. Skor PPH mengindikasikan bahwa skor PPH semakin besar seiring dengan meningkatnya desil. Skor PPH di desil 1 hanya mencapai 71,93, desil 2 sebesar 82,30 dan menunjukkan tren meningkat hingga skor PPH desil6 mencapai

94,82. Namun demikian, skor PPH pada desil berikutnya terus menurun hingga skor PPH di desil 10 sebesar 92,79. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin meningkat kelompok desil rumah tangga cenderung semakin beragam jenis komodite makanan yang dikonsumsi. Tingkat pendapatan keluarga mempunyai hubungan yang erat terhadap perubahan konsumsi pangan, walaupun terdapat kenaikan pendapatan, namun tidak selalu diikuti oleh perubahan konsumsi pangannya (Sanjur 1982)

Tabel 5.4.7 Skor PPH Menurut Desil Pengeluaran perkapita/bulan,2019

No	Kelompok Pangan	Desil/Kelompok Pengeluaran Perkapita/bulan									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Padi-padian	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
2	Umbi-umbian	0,71	0,89	1,04	1,09	0,87	0,96	0,94	0,77	0,74	0,75
3	Pangan Hewani	12,01	17,09	22,05	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
4	Minyak dan Lemak	4,87	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
5	Buah/Biji Berminyak	0,08	0,07	0,11	0,11	0,09	0,10	0,10	0,16	0,09	0,07
6	Kacang-kacangan	5,51	6,39	6,35	6,78	6,82	7,25	7,00	6,52	6,15	5,47
7	Gula	2,16	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
8	Sayur dan Buah	21,58	25,37	27,23	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
9	Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	71,93	82,30	89,29	94,47	94,29	94,82	94,54	93,95	93,48	92,79

Sumber: BPS(Susenas 2019)

Skor PPH menurut kelompok pangan memperlihatkan ketimangan yang cukup berarti antara rumah tangga kelompok ekonomi bawah dan kelompok ekonomi atas. Bila secara umum semua kelompok rumah tangga telah mengkonsumsi komodite padi-padian melampaui batas maksimal, gambaran berbeda untuk komodite lainnya. Rumah tangga pada desil 1 masih mengkonsumsi komodite gula dan komodite minyak dan lemak dengan kandungan energi dibawah

batas maksimal. Semetara, rumah tangga di desil 1 hingga desil 3, asupan gizi pada komodite pangan hewani serta sayuran dan buah juga masih jauh dibawah batas maksimal asupan gizi yang dianjurkan. Pola konsumsi pangan rumah tangga dipengaruhi oleh pola makan sebagian besar penduduk, ketersediaan bahan pangan, dan tingkat pendapatan (Suhardjo 1989). Skor PPH memperlihatkan rumah tangga kelas ekonomi bawah, pola konsumsi masih didominasi oleh padi-padian, sedangkan sumber protein dan vitamin masih jauh dari standar ideal.

5.5 Kelemahan Materi: Rendahnya Investasi

Investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu wilayah. Investasi dalam bidang perekonomian berpengaruh terhadap tingkat perekonomian suatu wilayah. Kondisi ini terjadi karena investasi mampu meningkatkan produksi dan kesempatan kerja. Semakin meningkat kesempatan kerja akan diikuti dengan banyaknya tenaga kerja yang terserap di pasar kerja sehingga berpotensi meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan menurunkan jumlah penduduk miskin.

Tabel 5.5.1 Struktur Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) di D. I Yogyakarta, 2015-2019

Struktur PMTB	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Bangunan	80,53	80,04	80,64	81,53	80,89
b. Non Bangunan	19,47	19,96	19,36	18,47	19,11
Total	100	100	100	100	100

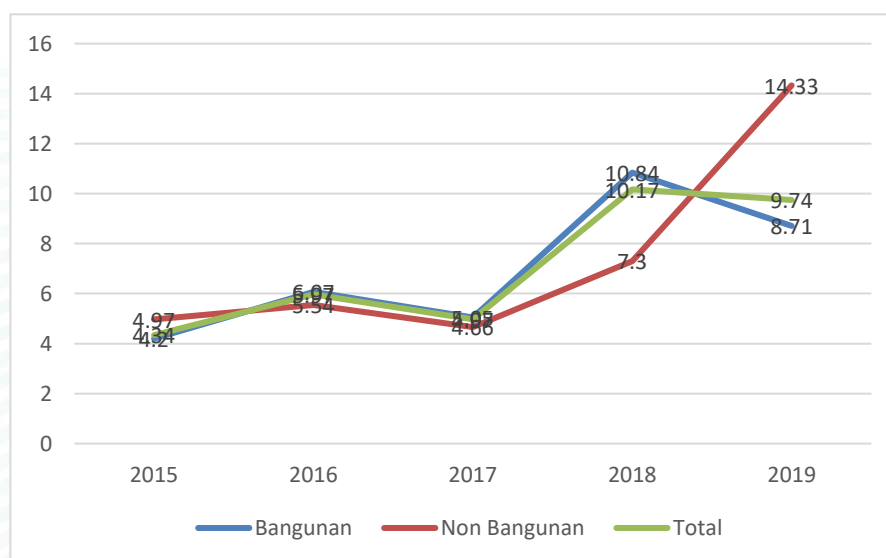
Sumber: PDRB Pengeluaran DIY, 2015-2019

Investasi dapat berupa investasi fisik maupun investasi finansial. Pada publikasi ini investasi yang disajikan berupa investasi fisik dan biasa digunakan dalam konteks Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Aktivitas investasi fisik tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Komponen PMTB pada PDRB lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*)

yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal, yaitu bangunan dan non bangunan. Penghitungan nilai investasi bangunan dilakukan dengan pendekatan pembangunan prasarana fisik (konstruksi). Selanjutnya aset non bangunan dinilai dari pengadaan barang modal seperti mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

Berdasarkan pendataan Penyusunan Disagregasi PMTB yang dilakukan BPS, nilai PMTB DIY pada tahun 2019 mencapai 49.519 miliar rupiah, yang terdiri dari investasi bangunan dan non bangunan. Pada tabel 5.5.1 terlihat bahwa PMTB DIY utamanya ditopang oleh investasi fisik dari komponen bangunan. Kontribusi investasi bangunan pada periode 2015-2019 terhadap PMTB mencapai lebih dari 80 persen dan pada tahun 2019 kontribusinya sebesar 80,89 persen. Sedangkan investasi non bangunan pada tahun 2019 hanya mencapai 19,11 persen. Tingginya investasi bangunan menjadi daya dorong peningkatan kesempatan kerja utamanya pada Sektor Konstruksi.

Tabel 5.5.1 Perkembangan PMTB Menurut Komponennya di D. I Yogyakarta, 2015-2019



Sumber: PDRB Pengeluaran DIY, 2015-2019

Pada gambar 5.5.1 disajikan perkembangan PMTB menurut komponen di DIY pada periode 2015-2019. Dalam kurun waktu 2015-2019, pertumbuhan PMTB cukup fluktuatif. Walaupun PMTB pada tahun 2019 mengalami perlambatan, tetapi

dibandingkan tahun 2018 investasi masih mampu tumbuh sebesar 9,74 persen. Perlambatan PMTB akibat melambatnya investasi bangunan sebagai komponen dominan, yaitu turun 2,13 poin persen. Sebaliknya investasi non bangunan pada tahun 2019 tumbuh hampir dua kali lipat dibandingkan 2018. Pertumbuhan investasi DIY tentunya memberikan andil terhadap pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesempatan kerja sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau menurunkan tingkat kemiskinan.

5.6 Dampak Bencana dan Perubahan Iklim terhadap Kemiskinan

Secara geografis, Indonesia berada pada lingkaran cincin api Pasifik. Tidak terkecuali dengan DIY. Hal tersebut membawa konsekuensi bahwa wilayah DIY rentan terhadap berbagai macam bencana alam. Terlebih lagi bagi DIY yang mempunyai bentang alam mulai dari pegunungan (Gunung Merapi di Utara) hingga wilayah pantai (daerah pesisir di selatan).

Bencana alam yang terjadi dapat mengakibatkan kematian, kerusakan aset, kehancuran, dan secara umum disrupsi ekonomi. *Asian Development Bank* (ADB) (2014) mengungkapkan bahwa bencana alam cenderung memberikan dampak yang lebih parah kepada penduduk miskin dan golongan yang terpinggirkan. Hal ini karena bencana alam mengakibatkan kerusakan infrastruktur dan mengakibatkan kehilangan pekerjaan. Bencana alam juga mengakibatkan gangguan produksi dan distribusi pangan yang berakibat pada meningkatnya harga bahan pangan. Keseluruhan hal tersebut baik langsung maupun tidak langsung berdampak buruk bagi penduduk miskin. Selain itu, bencana alam juga mengakibatkan hilangnya barang dan aset penduduk. Lebih lanjut, hasil studi ADB (2014) juga menunjukkan bahwa bencana alam berpotensi untuk menambah angka kemiskinan terutama jika bencana alam tersebut menimpa penduduk berpendapatan rendah.

Sejalan dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Rentschler (2013) menunjukkan bahwa penduduk miskin merupakan kelompok yang paling rentan dan paling menderita akibat bencana alam. Dalam jangka panjang bencana alam mengakibatkan turunnya standar hidup kelompok ini dan pada gilirannya berpotensi menjadi perangkap kemiskinan.

Pendataan Potensi Desa pada tahun 2019 mengumpulkan data mengenai bencana alam yang terjadi di seluruh desa/kelurahan di DIY. Terdapat sepuluh macam bencana yang ditanyakan pada pendataan Podes 2019 baik mengakibatkan kerugian materi maupun non-materi. Namun demikian, hasil pendataan Podes 2019 menunjukkan bahwa hanya terdapat 7 bencana alam yang terjadi di DIY. Tabel 5.6.1 memberikan informasi mengenai banyaknya desa menurut jenis bencana alam yang terjadi pada tahun 2019.

Berdasarkan data Podes 2019, berbagai macam bencana alam pernah terjadi di wilayah DIY. Bencana alam yang paling sering terjadi pada tahun tersebut adalah bencana banjir yang melanda di 60 desa/kelurahan dari 438 desa/kelurahan di DIY. Selain itu, bencana tanah longsor juga kerap terjadi dan melanda 39 desa/kelurahan pada tahun 2019. Selanjutnya, bencana yang sering menimpa DIY adalah kekeringan yang terjadi di 35 desa di wilayah ini. Selain ketiga jenis bencana alam tersebut, bencana yang pernah terjadi di DIY pada tahun 2019 adalah banjir bandang (3 desa), gempa bumi (1 desa), gelombang pasang laut (8 desa), angin puyuh (18 desa),

Tabel 5.6.1 Banyaknya Desa Menurut Jenis Bencana Alam pada Tahun 2019

Kabupaten/ Kota	Banjir	Tanah Longsor	Keker- ingan Lahan	Banjir Banda ng	Gempa Bumi	Gelom- bang Pasang Laut	Angin Pu- yuh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kulon Progo	16	6	5	2	0	3	0
Bantul	25	15	2	1	0	2	1
Gunungkidul	12	16	28	0	1	3	3
Sleman	5	2	0	0	0	0	13
Yogyakarta	2	0	0	0	0	0	1
DIY	60	39	35	3	1	8	18

Sumber : Hasil Pengolahan Updating Data Podes 2019

Pada tahun 2019, Kabupaten Gunungkidul merupakan wilayah yang paling sering dilanda bencana alam di DIY. Sebanyak 63 desa tercatat pernah mengalami

berbagai macam bencana alam di Gunungkidul pada tahun tersebut. Selanjutnya, Bantul juga merupakan wilayah yang relatif rawan bencana alam, dimana 46 desa tercatat pernah mengalami berbagai macam bencana alam. Adapun wilayah yang relatif aman dari bencana alam adalah Kota Yogyakarta. Sepanjang tahun 2019, hanya terdapat tiga desa yang melaporkan pernah mengalami bencana alam.

Berdasarkan data Podes 2019, berbagai macam bencana alam pernah terjadi di wilayah DIY. Bencana alam yang paling sering terjadi pada tahun tersebut adalah bencana banjir yang melanda di 60 desa/kelurahan dari 438 desa/kelurahan di DIY. Selain itu, bencana tanah longsor juga kerap terjadi dan melanda 39 desa/kelurahan pada tahun 2019. Selanjutnya, bencana yang sering menimpa DIY adalah kekeringan yang terjadi di 35 desa di wilayah ini. Selain ketiga jenis bencana alam tersebut, bencana yang pernah terjadi di DIY pada tahun 2019 adalah banjir bandang (3 desa), gempa bumi (1 desa), gelombang pasang laut (8 desa), anjing puyuh (18 desa).

Pada tahun 2019, Kabupaten Gunungkidul merupakan wilayah yang paling sering dilanda bencana alam di DIY. Sebanyak 63 desa tercatat pernah mengalami berbagai macam bencana alam di Gunungkidul pada tahun tersebut. Selanjutnya, Bantul juga merupakan wilayah yang relatif rawan bencana alam, dimana 46 desa tercatat pernah mengalami berbagai macam bencana alam. Adapun wilayah yang relatif aman dari bencana alam adalah Kota Yogyakarta. Sepanjang tahun 2019, hanya terdapat tiga kelurahan yang melaporkan kejadian bencana alam di kota ini.

Untuk mengatasi kerawanan dampak bencana alam, pemetaan dan pengidentifikasian resiko mutlak diperlukan. Selain itu juga diperlukan inventarisasi sumber daya yang tersedia yang dapat digunakan untuk menanggapi kejadian bencana alam. Selain itu, ADB juga menyarankan upaya pengurangan risiko bencana melalui pembangunan infrastruktur yang cukup tangguh untuk bertahan dari bencana, sistem peringatan dini, menyediakan stok persediaan bantuan, melatih tim tanggap bencana lokal, dan sejenisnya.

Tabel 5.6.2 Banyaknya Desa Menurut Upaya Antisipasi/Mitigasi Bencana Alam pada Tahun 2019

Kabupaten/ Kota	Sistem Peringat -an Dini Bencana Alam	Sistem Peringatan Dini Khusus Tsunami	Perlengkapan keselamatan (perahu karet, tenda, masker, dll.)	Rambu- rambu dan jalur evakuasi bencana	Pembuatan, perawatan, atau normalisasi sungai, kanal, tanggul, parit, drainase, waduk, pantai, dll.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kulon Progo	35	4	35	55	62
Bantul	33	6	17	38	57
Gunungkidul	40	6	24	37	69
Sleman	57	0	63	48	65
Yogyakarta	42	0	44	42	39
DIY	207	16	183	220	292

Sumber : Hasil Pengolahan Updating Data Podes 2019

Tabel 5.6.2 memberikan informasi mengenai banyaknya desa yang telah menyiapkan upaya antisipasi/mitigasi bencana alam pada tahun 2019. Dari 438 desa/kelurahan di DIY, hanya kurang dari setengahnya atau sebanyak 207 desa diantaranya yang telah menyediakan sistem peringatan dini bencana alam. Selain itu, dari 33 desa pantai yang ada di DIY (BPS Provinsi DIY, 2019) sebanyak 16 desa diantaranya telah memiliki fasilitas sistem peringatan dini khusus tsunami. Selain itu, sebanyak 183 desa di juga telah memiliki perlengkapan keselamatan bencana alam.

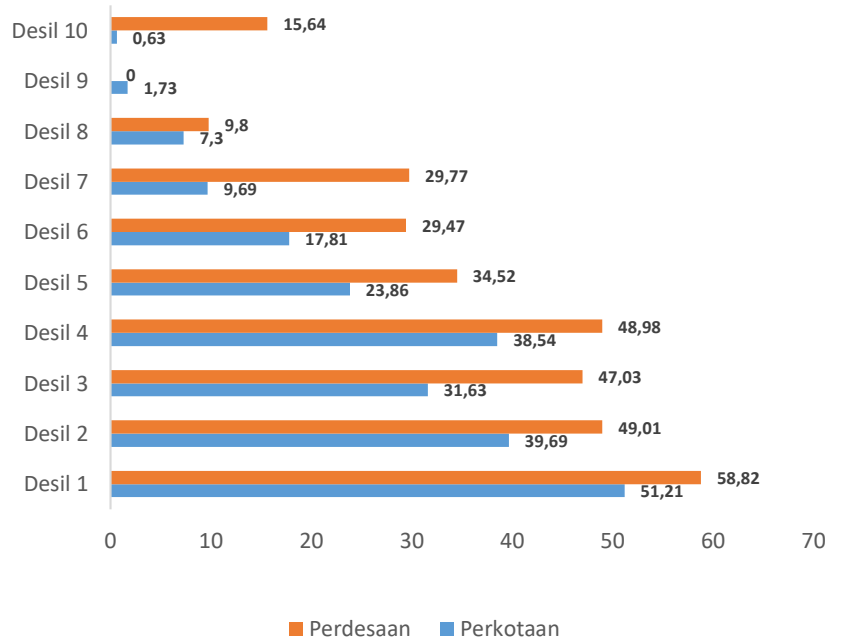
Dari tabel 5.6.2 terlihat bahwa Kota Yogyakarta terlihat telah memiliki kesiapan menghadapi bencana alam yang relatif memadai dibandingkan dengan wilayah lain di DIY. Dari 45 kelurahan yang ada, hampir semuanya telah memiliki sistem peringatan dini bencana alam (42 desa), perlengkapan keselamatan (44 desa), rambu-rambu dan jalur evakuasi (42 desa).

PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL D.I YOGYAKARTA TAHUN 2019



1. Bantuan Perlindungan Sosial (BPNT, PKH)
2. Kepemilikan Kartu Jamsos
3. Bantuan kredit dan Bantuan Pemda

Persentase Rumah Tangga Penerima PKH Menurut Desil Pengeluaran Perkapita dan Tipe Daerah





BAB VI

PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL 2019

Negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang layak serta terpenuhinya kebutuhan dasar. Bentuk pelayanan sosial antara lain meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Todaro dan Smith (2015) menyatakan bahwa transfer langsung dan subsidi sangat efektif untuk mengatasi kemiskinan dengan beberapa prasyarat. Pertama, karena sumber daya terbatas sehingga harus dipastikan bahwa transfer dan subsidi diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan. Kedua, penerima tidak tergantung pada bantuan, tetapi termotivasi untuk membangun aset seperti pendidikan dan kesehatan anak yang nantinya dapat mencegah anaknya tetap dalam kondisi miskin.

Program perlindungan sosial merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial salah satunya dilaksanakan melalui pemberian bantuan sosial dalam bentuk bantuan langsung, penyediaan aksesibilitas, dan penguatan kelembagaan.

6.1. Distribusi Bantuan Perlindungan Sosial (BPNT, PKH)

Dalam rangka penanganan masalah kemiskinan, pemerintah melakukan berbagai program perlindungan sosial. Salah satu program perlindungan sosial tersebut adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). BPNT merupakan program transformasi program beras sejahtera (Rastra) untuk memastikan program menjadi lebih tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Aturan mengenai penyaluran bantuan sosial nontunai

mengacu pada Perpres RI Nomor 63 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai.

Salah satu manfaat dari program BPNT adalah meningkatnya ketahanan pangan di tingkat keluarga penerima manfaat sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Program BPNT telah dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2017 dan terus diperluas ke wilayah-wilayah lainnya hingga saat ini. Program BPNT disalurkan dalam bentuk nontunai dari pemerintah kepada masing-masing keluarga penerima manfaat setiap bulan melalui mekanisme uang elektronik. Media penyaluran BPNT kepada keluarga penerima manfaat adalah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). KKS sebagai alat penanda keluarga penerima manfaat dan berfungsi sebagai kupon elektronik sehingga pada saat pemanfaatan BPNT wajib dibawa. Besaran manfaat BPNT adalah 110.000 rupiah per keluarga per bulan. Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai dan hanya dapat ditukarkan dengan beras dan atau telur sesuai kebutuhan di e-warong. Pemilihan komoditas dalam program BPNT tersebut berdasarkan tujuan untuk menjaga kecukupan gizi keluarga penerima manfaat.

Prosedur pembaharuan keluarga penerima manfaat dan pelaksanaan distribusi program BPNT tertuang dalam Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai. Pembaharuan keluarga penerima manfaat melalui prosedur yang telah ditetapkan. Pembaharuan daftar keluarga penerima manfaat dilakukan melalui musdes/muskel pada tahun pelaksanaan program BPNT dengan melibatkan Ketua RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat serta Tenaga Pelaksana BPNT. Pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan sering dihadapkan pada berbagai masalah antara lain tidak tepat waktu, salah sasaran, jumlah bantuan dibagi rata, dan ada beberapa pungutan atau biaya tambahan. Dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, harapannya bantuan tersebut dapat terlaksana dengan lancar dan tepat sasaran.

Menurut Allo (2016) bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara terintegrasi, karena jika dilakukan secara parsial maka dampak dari program tidak akan mencapai tujuannya. Program *in-kind transfer* (program raskin) dan *program cash-transfer* (program BLT) memiliki dampak yang berbeda

terhadap penanggulangan kemiskinan. Namun hasil interaksi antara kedua program tersebut mampu menurunkan tingkat kemiskinan.

Persentase rumah tangga penerima program BPNT disajikan pada Tabel 6.1.1. Pada Desil 1 tercatat sebesar 54,88 persen rumah tangga yang menerima program BPNT, sedangkan 45,12 persen tidak menerima bantuan. Penerima program BPNT dari Desil 2 dan 3 berturut-turut sebesar 43,45 persen dan 37,21 persen. Penerima program BPNT mulai dari Desil 1 hingga Desil 10 menunjukkan persentase yang semakin kecil. Semakin tinggi golongan pengeluaran perkapita maka semakin sedikit persentase rumah tangga penerima program BPNT. Hal ini berarti persebaran rumah tangga penerima BPNT didominasi oleh kelompok pendapatan bawah (Desil 1- Desil 4). Sementara itu, penerima program BPNT masih ditemukan pada beberapa rumah tangga di desil pengeluaran kelompok atas (Desil 9 dan Desil 10) walaupun persentasenya di bawah 2 persen.

Tabel 6.1.1 Persentase Rumah Tangga Penerima BPNT Menurut Desil Pengeluaran Perkapita dan Tipe Daerah di DIY, Tahun 2019

Desil Pengeluaran Perkapita/Bulan	Penerima BPNT		
	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Desil 1	51,21	58,82	54,88
Desil 2	39,69	49,01	43,45
Desil 3	31,63	47,03	37,21
Desil 4	38,54	48,98	41,73
Desil 5	23,86	34,52	26,99
Desil 6	17,81	29,47	20,57
Desil 7	9,69	29,77	17,05
Desil 8	7,30	9,80	7,94
Desil 9	1,73	0,00	1,65
Desil 10	0,63	15,64	0,89

Sumber: Susenas 2019 diolah, BPS

Berdasarkan tipe daerah, persentase penerima program BPNT di daerah perkotaan dari kelompok pengeluaran Desil 1 sebesar 51,21 persen sedangkan perdesaan sebesar 58,82 persen. Pola yang hampir sama terjadi baik di perkotaan

maupun di perdesaan bahwa semakin besar golongan pengeluarannya maka semakin kecil persentase rumah tangga yang menerima program BPNT. Hal ini terlihat pada Desil 1 hingga Desil 10 menunjukkan kecenderungan yang menurun. Di daerah perdesaan, pada Desil 9 sudah tidak ada rumah tangga yang menerima program BPNT. Namun, pada Desil 10 justru terdapat rumah tangga yang menerima program BPNT sebesar 15, 64 persen. Sedangkan di perkotaan terdapat 0,63 persen yang menerima program BPNT. Hasil kajian Rachman, *et.all* (2018) menunjukkan bahwa ketidaktepatan data sasaran Rastra/BPNT masih tinggi. Pada dasarnya keluarga penerima manfaat program BPNT merupakan peralihan dari program Rastra. Ketidaktepatan sasaran penerima manfaat inilah yang harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah daerah untuk diketahui penyebabnya sehingga penanganan kemiskinan dapat berjalan secara efektif dan lancar.

Tabel 6.1.2 Persentase Rumah Tangga Penerima BPNT Menurut Desil Pengeluaran Perkapita dan Kabupaten/Kota di DIY, Tahun 2019

Desil Pengeluaran Perkapita/Bulan	Kabupaten/Kota				
	Kulon Progo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Yogyakarta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Desil 1	59,23	47,09	54,01	41,88	25,88
Desil 2	60,36	46,30	52,30	32,17	35,38
Desil 3	49,62	49,54	48,86	36,11	18,13
Desil 4	50,11	39,27	42,29	5,72	18,85
Desil 5	35,96	36,21	54,09	17,97	2,71
Desil 6	33,13	22,18	45,10	10,03	2,59
Desil 7	31,19	15,42	34,09	4,54	0,00
Desil 8	22,21	9,63	32,25	3,83	0,00
Desil 9	22,31	2,34	30,97	0,00	0,61
Desil 10	2,68	0,85	11,18	1,09	0,00

Sumber: Susenas 2019 diolah, BPS

Secara umum, persentase penerima program BPNT di Kabupaten/Kota se-DIY dari Desil 1 hingga Desil 10 menunjukkan kecenderungan yang semakin kecil. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengeluaran perkapita maka semakin kecil penerima program BPNT. Pada empat desil pertama, persentase terbesar penerima program BPNT adalah Kabupaten Kulon Progo sekitar 50-60 persen. Sedangkan di Kota Yogyakarta, mulai Desil 5 hingga 10 persentase penerima

program BPNT sangat kecil dengan persentase di bawah 3 persen. Pada Desil 7 hingga 10 hampir tidak ada yang menerima program. Sementara itu, penerima program BPNT di Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul masih ditemukan pada rumah tangga dengan desil pengeluaran kelompok atas (Desil 9 dan Desil 10) dengan persentase yang cukup besar.

Program perlindungan sosial lainnya dalam penanganan kemiskinan yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). PKH merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat. Pemerintah telah melaksanakan PKH sejak tahun 2007 hingga sekarang. Program perlindungan sosial yang dikenal dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan terutama masalah kemiskinan kronis. PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik). Selain itu juga mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.

Sasaran PKH merupakan keluarga yang miskin dan rentan miskin serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Kriteria komponen kesehatan meliputi ibu hamil atau menyusui, anak usia 0 hingga enam tahun. Kriteria komponen pendidikan meliputi anak SD, SMP, SMA, atau usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Sedangkan komponen kesejahteraan sosial meliputi lanjut usia mulai 60 ke atas dan penyandang disabilitas berat. Seluruh anggota keluarga penerima manfaat harus memenuhi kewajiban kepesertaan PKH. Apabila tidak memenuhi kewajiban dikenakan penangguhan atau penghentian bantuan sosial. Prosedur pelaksanaan PKH diatur dalam pedoman pelaksanaan PKH. Manfaat yang besar dari PKH diharapkan dapat berjalan efektif dan efisien dalam penanganan kemiskinan.

Gambaran mengenai persentase rumah tangga penerima PKH disajikan pada Tabel 6.1.3. Pola yang sama terjadi pada penerima program PKH dan BPNT. Berdasarkan distribusi rumah tangga penerima PKH, semakin tinggi kelompok pengeluaran perkapita maka persentase rumah tangga penerima PKH semakin

kecil. Rumah tangga pada kelompok pengeluaran Desil 1 memiliki persentase penerima PKH paling tinggi meskipun kurang dari 50%, yaitu sebesar 44,95 persen, sedangkan 55,05 persen pada Desil 1 tidak menerima PKH.

Tabel 6.1.3 Persentase Rumah Tangga Penerima PKH Menurut Desil Pengeluaran Perkapita dan Tipe Daerah di DIY, Tahun 2019

Desil Pengeluaran Perkapita/ Bulan	Penerima PKH		
	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Desil 1	42,80	47,26	44,95
Desil 2	33,11	35,50	34,08
Desil 3	28,59	34,87	30,87
Desil 4	34,01	34,48	34,15
Desil 5	18,71	23,79	20,2
Desil 6	16,92	21,93	18,1
Desil 7	11,18	20,38	14,55
Desil 8	5,1	6,01	5,34
Desil 9	1,1	0,00	1,04
Desil 10	0,9	7,94	1,02

Sumber: Susenas 2019 diolah, BPS

Berdasarkan tipe daerah, persentase rumah tangga penerima PKH di perdesaan (47,26 persen) lebih besar daripada di perkotaan (42,80 persen). Baik perkotaan maupun perdesaan, semakin tinggi pengeluaran perkapita maka semakin sedikit rumah tangga yang menerima PKH. Pada rumah tangga kelompok pengeluaran atas, masih ada rumah tangga yang menerima program PKH meskipun jumlahnya cukup kecil. Di daerah perdesaan, pada Desil 9 sudah tidak ada lagi penerima PKH namun pada Desil 10 justru terdapat sekitar 7,94 persen yang menerima PKH. Tingkat efektifitas sebuah program dapat diukur dengan melihat tercapainya tujuan program. Dimana tujuan PKH adalah melaksanakan kewajiban di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

Menurut kabupaten/kota di DIY, persentase penerima PKH dari Desil 1 hingga Desil 10 menunjukkan kecenderungan yang semakin kecil. Pada Desil pertama, Persentase penerimaan bantuan PKH terbesar adalah Kabupaten Bantul sebesar 47,77 diikuti Kabupaten Gunungkidul (42,18) dan Kulon Progo (41,63 persen). Sedangkan Kota Yogyakarta memiliki persentase terkecil dibandingkan kabupaten lainnya pada Desil 1 yaitu sebesar 21,83 persen. Pada Desil 6 hingga 10 persentase, penerima PKH di Kota Yogyakarta sangat kecil yaitu berkisar 0 - 3,7 persen. Berbeda dengan Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo yang penerima PKH dari golongan pengeluaran atas masih tergolong cukup tinggi. Harapannya jaring pengaman sosial untuk masyarakat lapisan bawah ini tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok dan menjaga daya beli masyarakat. Beragamnya komoditas PKH yang diberikan sangat membantu dalam terpenuhinya gizi masyarakat.

Tabel 6.1.4 Persentase Rumah Tangga Penerima PKH Menurut Desil Pengeluaran Perkapita dan Kabupaten/Kota di DIY, Tahun 2019

Desil Pengeluaran Perkapita/ Bulan	Kabupaten/Kota				
	Kulon Progo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Yogyakarta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Desil 1	41.63	47.77	42.18	27.97	21.83
Desil 2	46.88	42.91	39.62	26.08	38.12
Desil 3	40.27	44.22	35.30	31.44	20.45
Desil 4	44.20	29.10	29.73	3.73	31.82
Desil 5	23.33	32.49	42.98	13.28	10.98
Desil 6	30.28	20.76	28.20	12.07	3.72
Desil 7	24.64	12.27	22.98	3.43	1.51
Desil 8	9.72	2.87	22.74	2.59	0.00
Desil 9	17.52	1.56	22.32	.56	0.00
Desil 10	1.95	.85	6.12	1.09	1.18

Sumber: Susenas 2019 diolah, BPS

6.2. Distribusi Kepemilikan Kartu Jamsos

Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan penyelenggara Jaminan Sosial menyebutkan bahwa jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang menjamini seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Badan penyelenggara program jaminan sosial adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Secara umum BPJS ada 2 yakni BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan sebagai badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, Jaminan hari tua, jaminan pension dan jaminan kematian.

BPJS Ketenagakerjaan menggantikan peran Jamsostek pada tahun 2015 akan memberikan dan melayani jaminan sosial khusus bagi para pekerja baik pekerja formal maupun informal. Dengan keikutsertaan dalam jaminan sosial tersebut diharapkan terdapat perlindungan kesejahteraan bagi para pekerja pada saat di hari tua, terjadi kecelakaan kerja hingga santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris.

Jaminan Pensiun/veteran

Jaminan Pensiun/Veteran adalah Jaminan pekerja/pegawai negeri sipil (PNS)/TNI/Polri yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib. Jaminan pensiun diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap (sumber UU No 40 Tahun 2004). Manfaat jaminan pensiun umumnya berwujud uang tunai yang diterima setiap bulan.

Persentase rumah tangga miskin yang telah memiliki/menerima jaminan pensiun sebanyak 10,46 persen. Ditinjau menurut tipe wilayah tempat tinggal persentase penduduk yang telah memiliki/menerima jaminan pensiun mencapai 11,92 persen, hampir 2 kali lipat bila dibandingkan dengan persentase kepemilikan atau penerima jaminan pensiun bagi penduduk perdesaan.

Bila dirinci menurut Kabupaten/kota, proporsi rumah tangga penerima jaminan pensiun memiliki pola yang hampir sama di semua kabupaten/kota.

Penerima/pemilik jaminan pensiun sebagian besar dari rumah tangga desil 6 hingga desil 10. Akan tetapi jika dicermati lebih detil menurut sebesar kuintil pengeluaran, gambaran penerima jaminan pensiun cukup beragam. Penerima pensiun di Kabupaten Gunungkidul mayoritas adalah rumah tangga pada kelompok 20 persen teratas yakni sebesar 72,22 persen. Sementara di 4 kabupaten/kota lainnya mengelompok ada rumah tangga kelompok 40 persen teratas.

Tabel 6.2.1 Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Atau Menerima Jaminan Pensiun/Veteran Menurut Desil Pengeluaran Dan Kabupaten/Kota

Desil Pengeluaran Perkapita/ Bulan	Kprogo	Bantul	Gkidul	Sleman	Ykarta	DIY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Desil 1	2,44	5,58	4,88	0,04	7,58	3,01
Desil 2	4,67	3,97	0,00	2,90	0,00	1,43
Desil 3	2,65	3,16	0,00	2,63	12,03	3,74
Desil 4	6,81	2,78	0,00	6,96	4,76	2,93
Desil 5	0,00	6,11	1,23	11,97	1,28	7,94
Desil 6	6,44	8,25	8,42	15,67	15,27	10,90
Desil 7	21,51	12,46	7,54	8,20	13,49	13,46
Desil 8	16,68	17,91	5,71	18,47	11,08	15,86
Desil 9	9,71	19,05	29,62	15,59	13,78	19,55
Desil 10	29,10	20,73	42,61	17,56	20,72	21,17
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS (Susenas 2019)

Asuransi Kecelakaan Kerja

Asuransi Kecelakaan Kerja adalah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat dimulai berangkat bekerja sampai tiba kembali dirumah atau menderita penyakit akibat hubungan kerja. karena kecelakaan kerja baik fisik Maupun mental. Kesehatan dan keselamatan tenaga kerja merupakan tanggung jawab pengusaha sehingga pengusaha memiliki kewajiban untuk membayar iuran

jaminan kecelakaan kerja yang berkisar antara 0,24% - 1,74% sesuai kelompok jenis usaha. (sumber: BPJS Ketenagakerjaan).

Tabel 6.2.2 Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki/Menerima Asuransi Kecelakaan Menurut Desil Pengeluaran Dan Kabupaten/Kota.2019

Desil Pengeluaran Perkapita/ Bulan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Desil 1	3,91	5,46	4,07
Desil 2	2,64	4,21	2,81
Desil 3	3,38	10,08	4,09
Desil 4	6,54	7,25	6,62
Desil 5	8,73	9,34	8,79
Desil 6	10,97	26,84	12,66
Desil 7	13,41	13,98	13,47
Desil 8	13,41	16,52	13,74
Desil 9	18,47	4,16	16,94
Desil 10	18,55	2,18	16,81
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS(Susenas 2019)

Tabel 6.2.2 menyajikan proporsi rumah tangga yang memiliki /menerima asuransi kecelakaan kerja menurut tipe wilayah pada tahun 2019. Sementara distribusi rumah yang memiliki/menerima asuransi kecelakaan kerja menurut Kabupaten/kota pada periode yang sama dapat dilihat di tabel 6.2.3. Terlihat bahwa sebanyak 9.92 rumah tangga telah memiliki/menerima asuransi kecelakaan kerja. Menurut wilayah tempat tinggal, presentase kepemilikan/penerima asuransi kecelakaan kerja bagi rumah tangga perkotaan mencapai 11,97 persen, sementara rumah tangga perdesaan baru mencapai 3,72 persen.

Pola persebaran rumah tangga yang memiliki/menerima asuransi kecelakaan menurut desil memperlihatkan bahwa semakin tinggi pengeluaran semakin tinggi persentase rumah tangga penerima asuransi kecelakaan. Hal ini berarti bahwa persebaran rumah tangga penerima asuransi kecelakaan di dominasi oleh kelompok pendapatan 40 persen menengah (D5-D8). Pola yang hampir sama juga tampak pada

distribusi rumah tangga penerima/memiliki asuransi kecelakaan, baik rumah tangga di perkotaan maupun perdesaan. Akan tetapi, terjadi gambaran yang cukup kontras bagi rumah tangga di kelas 20 persen teratas. Persentase rumah tangga pada kelompok 20 persen teratas yang memiliki/menerima asuransi kecelakaan kerja pada rumah tangga di perdesaan hanya sebesar 6,34 persen, sementara rumah tangga perkotaan mencapai 37,02 persen.

Tabel 6.2.3 Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Atau Menerima Asuransi Kecelakaan Menurut Desil Pengeluaran Dan Kabupaten/Kota

Desil Pengeluaran Perkapita/ Bulan	Kprogo	Bantul	Gkidul	Sleman	Ykarta	DIY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Desil 1	8,87	6,64	0,00	2,06	15,53	4,07
Desil 2	1,07	3,16	5,03	3,34	4,52	2,81
Desil 3	3,66	1,67	2,05	9,02	8,20	4,09
Desil 4	16,66	8,84	0,00	7,08	0,59	6,62
Desil 5	2,14	6,22	0,00	10,98	9,51	8,79
Desil 6	3,93	15,65	10,66	15,73	0,00	12,66
Desil 7	16,13	13,35	2,83	12,31	23,19	13,47
Desil 8	7,43	14,83	15,16	14,22	18,67	13,74
Desil 9	11,21	12,03	20,17	12,58	8,64	16,94
Desil 10	28,90	17,61	44,10	12,68	11,15	16,81
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS(Susenas 2019)

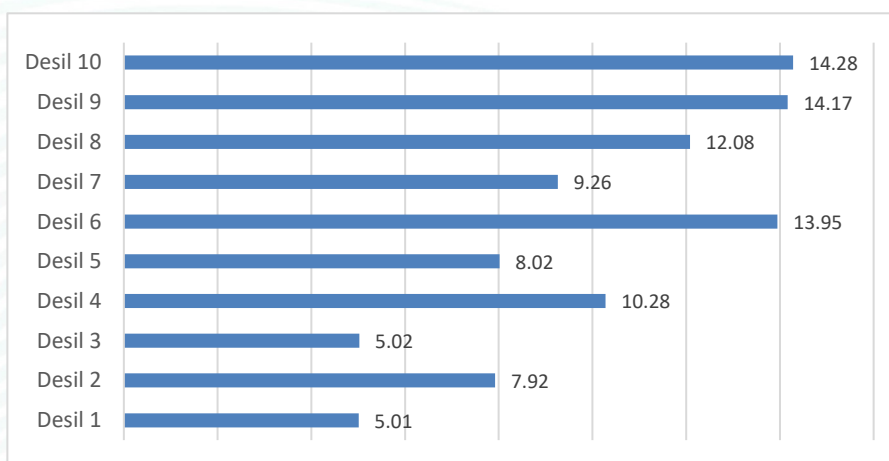
Tabel 6.2.3 juga menguraikan distribusi kepemilikan/penerimaan rumah tangga terhadap asuransi kecelakaan menurut kabupaten/kota dan kelompok pengeluaran rumah tangga perkapita(desil). Bila di kelompokkan menurut klasifikasi Bank Dunia yakni 40 persen pengeluaran terbawah, 40 persen pengeluaran menengah dan 20 persen pengeluaran tertinggi menunjukkan distribusi yang beragam. Kepemilikan/penerima asuransi kecelakaan untuk rumah tangga di Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta terkonsentrasi pada rumah tangga pada kelompok 40 persen pengeluaran menengah.

Sebaliknya, persentase rumah tangga di Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunungkidul paling banyak adalah rumah tangga di kelompok pengeluaran 20 persen teratas. Cukup ironis, persentase rumah tangga pada kelompok 40 persen terbawah di Kabupaten Gunungkidul yang menerima/ memiliki asuransi kecelakaan hanya sebesar 7,08 persen. Sementara 4 kabupaten lainnya telah lebih dari 20 persen untuk rumah tangga di kelompok pengeluaran yang sama.

6.3. Distribusi Bantuan kredit dan Bantuan Pemda

Program perlindungan sosial dalam upaya mengentaskan kemiskinan selain dilakukan melalui program jaminan sosial dan bantuan sosial dari pemerintah pusat, juga diberikan melalui stimulan kredit dan bantuan pemerintah daerah. Program bantuan kredit ditujukan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat sehingga mampu menciptakan lapangan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan tingkat kemiskinan. Kredit disalurkan melalui lembaga keuangan maupun pinjaman perseorangan. Selanjutnya bantuan kredit yang disajikan meliputi Kredit Usaha Rakyat (KUR), kredit dari bank umum selain KUR, kredit BPR dan kredit dari koperasi.

Gambar 6.3.1 Distribusi Rumah Tangga Penerima Kredit Menurut Desil Pengeluaran di DIY, 2019 (persen)



Sumber: BPS (Susenas 2019)

Bantuan kredit yang diberikan pemerintah melalui lembaga keuangan salah satunya adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR merupakan sebuah layanan

kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah melalui perbankan kepada para Usaha Mikro Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM) atau usaha yang *feasible* namun belum *bankable*. KUR diberikan untuk mendorong terciptanya wira usahawan dalam upaya pengentasan kemiskinan serta pemerataan ekonomi.

Tabel 6.3.1 Distribusi Rumah Tangga Penerima Kredit Menurut Desil Pengeluaran dan Tipe Daerah di DIY, 2019 (persen)

Desil Pengeluaran Perkapita/Bulan	Kota	Desa	Kota+Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
Desil 1	3,24	9,06	5,01
Desil 2	5,76	12,85	7,92
Desil 3	3,43	8,66	5,02
Desil 4	9,77	11,45	10,28
Desil 5	5,42	13,95	8,02
Desil 6	14,48	12,75	13,95
Desil 7	9,81	8,00	9,26
Desil 8	12,34	11,49	12,08
Desil 9	16,50	8,85	14,17
Desil 10	19,26	2,94	14,28
Seluruh Rumah Tangga	100,00	100,00	100,00

Sumber:BPS(Susenas, 2019)

Berdasarkan gambar 6.3.1 terlihat bahwa penerima bantuan kredit pada tahun 2019 lebih banyak dinikmati rumah tangga mampu (desil atas). Bantuan kredit paling banyak dinikmati oleh kelompok pengeluaran Desil 10, yaitu mencapai 14,28 persen dari seluruh rumah tangga penerima kredit dan rumah tangga dengan desil 1 (termiskin) justru menerima bantuan kredit paling sedikit (5,01 persen). Hal ini kemungkinan karena rumah tangga miskin memiliki tingkat kemampuan pengembalian kredit yang lebih rendah (kurang *bankable*) dibandingkan rumah tangga tidak miskin. Jika dilihat menurut tipe daerah, rumah tangga kelompok Desil

1 di kota yang menerima bantuan kredit hanya sebanyak 3,24 persen dan di desa jauh lebih banyak, yaitu mencapai 9,06 persen dari seluruh rumah tangga penerima bantuan kredit.

Seperti halnya pola rumah tangga penerima kredit pada umumnya, penerima bantuan kredit pada tingkat kabupaten/kota juga lebih banyak dinikmati rumah tangga pada desil atas dan rumah tangga penerima kredit pada desil 1 justru memiliki proporsinya relatif lebih sedikit. Penerima bantuan kredit terendah pada Desil 1 ada di Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul. Sedangkan penerima bantuan kredit paling sedikit di Kabupaten Sleman ada pada Desil 2 dan Desil 3 untuk Kota Yogyakarta.

Tabel 6.3.2 Distribusi Rumah Tangga Penerima Kredit Menurut Desil Pengeluaran dan Kabupaten/Kota di DIY, 2019 (persen)

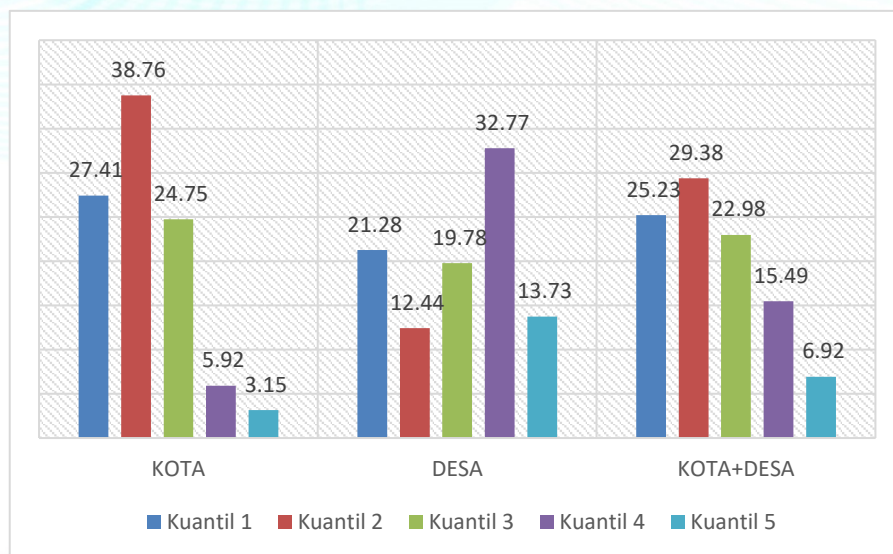
Desil Pengeluaran Perkapita/Bulan	Kulon Progo	Bantul	Gunung kidul	Sleman	Yogyakarta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Desil 1	6,67	5,44	3,08	4,04	1,70
Desil 2	10,46	5,97	9,90	2,32	11,16
Desil 3	8,57	7,86	6,95	8,68	2,48
Desil 4	6,33	5,68	7,86	7,22	15,46
Desil 5	8,78	8,64	9,82	14,89	21,46
Desil 6	10,30	10,86	14,91	12,12	14,71
Desil 7	9,97	5,84	13,41	7,06	9,35
Desil 8	6,14	11,33	13,02	16,17	11,13
Desil 9	14,89	23,19	9,01	9,11	4,37
Desil 10	17,89	15,18	12,05	18,39	8,19
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS (Susenas, 2019)

Penyelenggara program perlindungan sosial, selain dilakukan oleh pemerintah pusat juga diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Dalam

menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah daerah juga melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. Berbagai program bantuan diberikan pemerintah daerah, baik secara tunai maupun tidak tunai. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota memberikan bantuan pada masyarakat dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan.

Gambar 6.3.2 Distribusi Rumah Tangga Penerima Bantuan Pemerintah Daerah (Pemda) Menurut Kuantil Pengeluaran dan Tipe Daerah di DIY, 2019



Sumber: Susenas Maret 2019

Dibandingkan dengan penerima bantuan kredit, penerima bantuan pemerintah daerah pada tahun 2019 relatif cukup tepat sasaran. Hal ini terlihat dari distribusi penerima bantuan pemerintah daerah lebih banyak dinikmati rumah tangga pada kuantil bawah dan sedikit yang diterima rumah tangga pada kuantil atas. Penerima bantuan pemerintah daerah paling banyak diterima rumah tangga pada kuantil 2, yaitu mencapai 29,38 persen dan diikuti rumah tangga pada kuantil 1 yang mencapai 25,23 persen. Sedangkan rumah tangga penerima bantuan paling sedikit ada pada kuantil 5 (6,92 persen). Pola serupa juga terjadi pada rumah tangga yang tinggal di perkotaan. Sedangkan rumah tangga penerima bantuan wilayah desa relatif kurang tepat sasaran. Penerima bantuan pemerintah daerah di pedesaan paling banyak diterima rumah tangga pada kuantil 4 yang mencapai 32,77 persen, sedangkan rumah tangga pada kuantil 1 hanya mencapai 21,28 persen.

Tabel 6.3.3 Distribusi Rumah Tangga Penerima Bantuan Pemerintah Daerah (Pemda) Menurut Kuantil Pengeluaran dan Kabupaten/Kota di DIY, 2019

Kuantil Pengeluaran Perkapita/Bulan	Kulon Progo	Bantul	Gunung kidul	Sleman	Kota Yogyakarta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kuantil 1	19,64	26,59	16,66	38,64	46,32
Kuantil 2	45,15	42,49	6,96	36,04	23,68
Kuantil 3	21,61	23,64	21,52	12,14	26,95
Kuantil 4	9,63	7,27	32,92	13,18	3,04
Kuantil 5	3,97	-	21,95	-	-
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS (Susenas, 2019)

Jika dilihat menurut kabupaten/kota, distribusi penerima bantuan pemerintah daerah relatif tepat sasaran ada di Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Penerima bantuan di ketiga kabupaten/kota ini lebih banyak diterima rumah tangga pada kuantil bawah dan rumah tangga pada kuantil 5 bahkan tidak ada yang menerima sama sekali. Berbeda dengan Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul sebagai kabupaten dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, bantuan diterima oleh rumah tangga pada semua kuantil. Penerima bantuan pemda di Kabupaten Gunungkidul terbanyak justru diterima rumah tangga pada kuantil 4, yaitu mencapai 32,92 persen dan diikuti rumah tangga pada kuantil ke 5 yang mencapai 21,95 persen. Sedangkan rumah tangga penerima bantuan di Kabupaten Gunungkidul pada kuantil 1 hanya ada sebanyak 16,66 persen dari seluruh rumah tangga penerima bantuan. Berbeda dengan Kabupaten Kulon Progo, walaupun rumah tangga pada kuantil 5 ada yang menerima bantuan, akan tetapi distribusinya relatif tepat sasaran dibandingkan Kabupaten Gunungkidul.

IDENTIFIKASI KONDISI KEMISKINAN TERDAMPAK COVID-19

Perkembangan Kemiskinan DIY Pada Awal Covid-19

0,84 poin



Tingkat kemiskinan
September 2019 = 11,44 persen
Maret 2020 = 12,28 persen



Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)



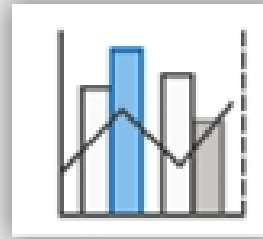
Maret 2019 = 1,741
September 2019 = 1,545.
Maret 2020 = 1,939

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)



Maret 2019 = 0,384
September 2019 = 0,301
Maret 2020 = 0,456

Perekonomian DIY:



Triwulan I tahun 2020

0,17 persen (y-on-y)

Triwulan II tahun 2020

6,74 persen (y-o-y).

Pelaku usaha di Indonesia Juli 2020
dampak Covid-19

- Perusahaan berhenti beroperasi (8,76 persen),
- Pemberlakukan *Work From Home* (7,5 persen),
- Pengurangan kapasitas (24,31 persen),
- Melebihi kapasitas (0,49 persen)
- Beroperasi seperti biasa (58,95 persen)

Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Terdampak Covid





BAB VII

IDENTIFIKASI KONDISI KEMISKINAN TERDAMPAK COVID-19

7.1. Perkembangan Kemiskinan DIY pada Awal Covid-19

Berdasarkan penghitungan hasil Susenas Maret 2020 terlihat adanya peningkatan penduduk miskin di DIY. Pada Maret 2020, jumlah penduduk miskin di wilayah ini mencapai 475,72 ribu orang. Jika dibandingkan dengan kondisi September 2019, terlihat adanya penambahan penduduk miskin sebanyak 34,83 ribu orang. Di samping itu, persentase penduduk miskin juga mengalami peningkatan dalam kurun waktu satu semester terakhir. Pada Maret 2020, persentase penduduk miskin DIY adalah 12,28 persen. Kondisi ini menunjukkan peningkatan sebesar 0,84 poin dibandingkan dengan September 2019.

Secara absolut, penduduk miskin DIY paling banyak terdapat di daerah perkotaan. Pada Maret 2020, jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan DIY tercatat sebanyak 326,13 ribu orang atau lebih dua kali lipat jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan yang banyaknya 149,59 ribu orang. Meskipun demikian, secara persentase jumlah penduduk miskin di perdesaan lebih banyak dibandingkan di perkotaan, dimana angkanya mencapai 14,31 persen. Pada saat yang sama, persentase penduduk miskin di perkotaan sebanyak 11,53 persen.

Selama periode Maret 2019 - Maret 2020, jumlah dan persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan menunjukkan fluktuasi. Pada Maret 2019, jumlah penduduk miskin perkotaan tercatat sebanyak 304,66 ribu orang. Selanjutnya, pada September 2019 jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 5,92 ribu orang menjadi 298,74 ribu orang. Namun demikian, pada Maret 2020, jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 326,13 ribu orang atau bertambah sebanyak 9,17 persen. Tingkat kemiskinan di perkotaan juga menunjukkan pola yang sama dengan pergerakan jumlah penduduk miskin secara absolut. Pada Maret 2019, persentase penduduk miskin di perkotaan sebanyak 10,89 persen. Pada September 2019, persentase penduduk miskin di perkotaan turun menjadi 10,62 persen. Pada Maret

2020, persentase penduduk miskin perkotaan mengalami peningkatan menjadi 11,53 persen dalam satu semester terakhir.

Pada periode yang sama, jumlah dan persentase kemiskinan di perdesaan menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif. Selama satu semester terakhir, jumlah penduduk miskin di perdesaan mengalami penurunan dari 143,81 ribu orang pada Maret 2019 menjadi 142,15 ribu orang pada September 2019, atau turun 1,15 persen. Pada Maret 2020, penduduk miskin perdesaan bertambah menjadi 149,59 ribu orang. Persentase penduduk miskin di perdesaan dari Maret 2019 sampai dengan Maret 2020 juga berfluktuasi. Meskipun sempat mengalami penurunan pada periode Maret 2019 - September 2019. Namun pada Maret 2020, tingkat kemiskinan di perdesaan kembali meningkat menjadi 14,31 persen.

Pada Maret 2020. Tingkat kemiskinan Maret 2020, meningkat menjadi 12,28 persen dibandingkan kondisi September 2019 yang tercatat sebesar 11,44 persen. Peningkatan kemiskinan di wilayah ini diduga terkait dengan kejadian pandemi covid19 yang menyebabkan terjadinya perlambatan perekonomian DIY. Perekonomian DIY pada triwulan I tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 5,48 persen (q to q) dan kontraksi sebesar 0,17 persen (y on y) (BPS DIY, 2020). Dari sisi lapangan usaha, kontraksi tersebut terjadi karena adanya penurunan kinerja pada 11 kategori lapangan usaha. Pada triwulan I 2020, penurunan tertinggi terjadi pada lapangan usaha konstruksi (-9,75 persen); Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (-8,92 persen); Jasa Perusahaan (-7,48 persen); Pertambangan dan Penggalan (-6,91 persen); dan Transportasi (-3,23 persen).

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor utama di DIY. Selama pandemi Covid19, sektor ini terkena imbasnya sebagai akibat adanya pembatasan aktivitas masyarakat. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada Januari 2020 tercatat sebanyak 8.371 orang. Kemudian pada Februari 2020, jumlahnya turun menjadi 7.100 dan pada Maret 2020 jumlahnya turun drastis menjadi 3.162 (BPS DIY, 2020). Selain itu, tekanan terhadap industri pariwisata di DIY juga dicerminkan oleh turunnya tingkat penghunian kamar hotel (TPK). Pada Maret 2020, TPK hotel bintang adalah 33,9 persen. Selain itu, perubahan iklim diduga juga turut memberikan andil pada kontraksi perekonomian di perdesaan sehingga mengakibatkan meningkatnya kemiskinan di wilayah tersebut. Musim kemarau

yang panjang pada tahun 2019 mengakibatkan mundurnya musim tanam dan musim panen di wilayah perdesaan DIY.

Terkait dengan kemiskinan, indikator lain yang perlu diperhatikan adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) digunakan untuk mengukur kesenjangan antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai P1 maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Adapun Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat homogenitas pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks P2 menunjukkan ketimpangan yang semakin melebar diantara penduduk miskin itu sendiri.

Dalam kurun waktu satu tahun terakhir nilai indeks P1 DIY menunjukkan kecenderungan yang berfluktuasi. Pada Maret 2019, indeks P1 tercatat sebesar 1,741. Kemudian, pada September 2019, indeks P1 turun menjadi 1,545. Namun demikian pada Maret 2020 indeks P1 meningkat menjadi 1,939. Peningkatan indeks P1 pada Maret 2020 tersebut menunjukkan kondisi kemiskinan yang memburuk. Meningkatnya indeks P1 memberikan gambaran bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan. Apabila dibandingkan antara wilayah perdesaan dan perkotaan, terlihat bahwa indeks kedalaman kemiskinan di perkotaan lebih rendah daripada di perdesaan. Selain itu, terlihat pula bahwa tingkat kedalaman kemiskinan di perkotaan menunjukkan kecenderungan yang berfluktuasi. Di perdesaan, tingkat kedalaman kemiskinannya lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan di perdesaan membutuhkan sumber daya yang lebih besar dibandingkan dengan upaya pengentasan kemiskinan di perkotaan.

Sejalan dengan indeks P1, indeks P2 juga menunjukkan adanya fluktuasi pada rentang waktu yang sama. Pada Maret 2019, nilai indeks P2 tercatat sebesar 0,384. Selanjutnya, pada September 2019, nilai indeks P2 turun menjadi 0,301. Dengan indeks P2 yang cenderung menurun, kondisi ini menunjukkan bahwa kesenjangan antara penduduk miskin semakin menyempit. Namun demikian pada Maret 2020, sejalan dengan bertambahnya penduduk miskin dan meningkatnya keparahan kemiskinan, indeks P2 juga mengalami peningkatan menjadi 0,456.

Situasi ini menunjukkan meningkatnya kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin.

Kondisi yang sama juga terjadi di wilayah perkotaan dan perdesaan dimana tingkat kesenjangan antara penduduk miskin menunjukkan adanya fluktuasi. Pada Maret 2019, indeks P2 tercatat sebesar 0,408. Kemudian, pada September 2019, indeks P2 turun menjadi 0,310. Namun, pada Maret 2020 indeks P2 meningkat signifikan menjadi 0,429. Di wilayah perdesaan, indeks P2 juga menunjukkan adanya fluktuasi. Bahkan pada Maret 2020, indeks keparahan kemiskinan di perdesaan meningkat melebihi indeks keparahan di perkotaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pengeluaran diantara penduduk miskin di perdesaan lebih heterogen dibandingkan dengan perkotaan.

7.2. Perkembangan Ketenagakerjaan Pada Masa Pandemi Covid-19

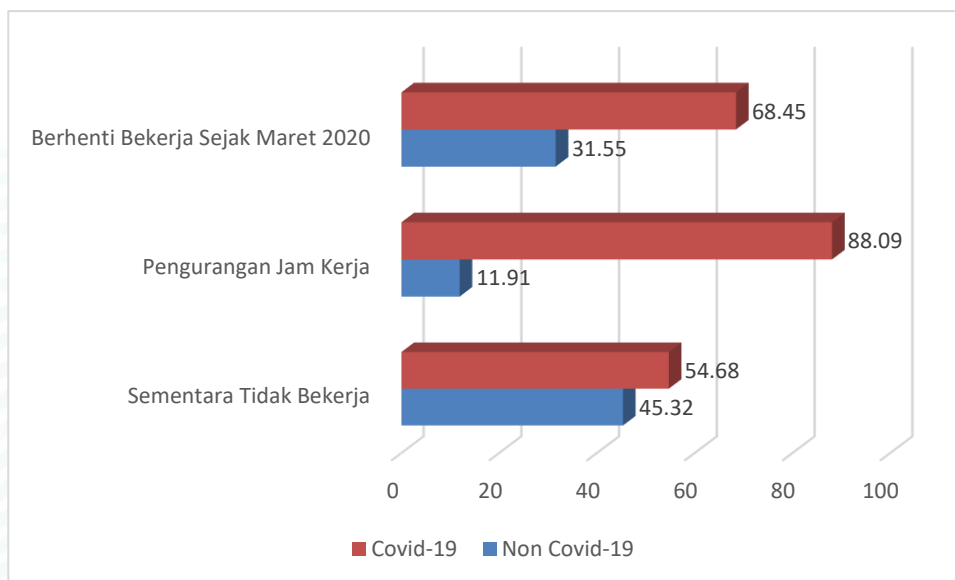
Pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak awal tahun 2020 telah berdampak pada perubahan tata kehidupan sosial dan hampir seluruh sektor ekonomi. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian dan secara langsung berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan maupun kondisi kemiskinan. Turunnya kinerja ekonomi Indonesia ini terjadi sejak triwulan I tahun 2020 yang tercermin dari laju pertumbuhan ekonomi triwulan yang hanya mencapai 2,97 persen (y-o-y). Pada triwulan II tahun 2020 pertumbuhan ekonomi kembali menurun signifikan, yaitu tumbuh minus 5,32 persen (y-o-y). Kondisi serupa juga terjadi di DIY. Perekonomian DIY pada triwulan I tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,17 persen (y-on-y) dan pada triwulan II tahun 2020 menurun signifikan sebesar 6,74 persen (y-o-y). Keadaan memburuknya perekonomian ini sebagai dampak Covid-19 terhadap pelaku usaha dan ketenagakerjaan.

Penurunan perekonomian sebagai dampak diberlakukannya *physical distancing* dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa wilayah akibat pandemi Covid-19. Berdasarkan survey dampak Covid-19 terhadap pelaku usaha di Indonesia yang dilakukan BPS pada Bulan Juli 2020 diperoleh informasi bahwa perusahaan berhenti beroperasi (8,76 persen), pemberlakuan *Work From Home* (7,5 persen), beroperasi dengan pengurangan kapasitas (24,31 persen),

beroperasi bahkan melebihi kapasitas sebelum Covid-19 (0,49 persen) dan sisanya masih beroperasi seperti biasa (58,95 persen). Kondisi dunia usaha yang demikian, disikapi perusahaan membuat kebijakan untuk tetap mempertahankan tenaga kerjanya meskipun aktivitas perusahaan sangat terdampak. Keputusan untuk melakukan PHK cenderung adalah langkah terakhir yang diambil terhadap tenaga kerjanya. Pengurangan jam kerja adalah langkah yang relatif lebih banyak diambil oleh perusahaan dibandingkan pilihan. Langkah selanjutnya yang dipilih perusahaan dengan merumahkan dan memberhentikan sementara tenaga kerja.

Pandemi Covid-19 telah berdampak pada seluruh sektor lapangan usaha. Kondisi tersebut secara langsung dapat mempengaruhi situasi ketenagakerjaan. Berikut adalah data tentang informasi dampak Covid-19 terhadap ketenagakerjaan. Dampak Covid-19 terhadap ketenagakerjaan di DIY yang disajikan antara lain penduduk 15 tahun ke atas yang berstatus sementara tidak bekerja, pengurangan jam kerja, dan berhenti bekerja.

Gambar 7.2.1 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Terdampak Covid-19 di DIY, 2020



Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Gambar 7.2.1 disajikan persentase penduduk 15 tahun ke atas berhenti bekerja, sementara tidak bekerja dan pengurangan jam kerja keterkaitannya dengan Covid-19. Sejalan dengan kebijakan pelaku usaha (hasil

survei dampak Covid-19 terhadap pelaku usaha), bahwa pengurangan jam kerja menjadi pilihan utama agar perusahaan tetap mampu beroperasi. Pada Sakernas Agustus 2020 juga dapat dijelaskan bahwa penduduk 15 tahun ke atas yang melakukan pengurangan jam kerja dengan alasan terkait Covid-19 mencapai 88,09 persen dan sisanya 11,91 persen tidak terkait Covid-19.

Covid-19 yang telah memasuki DIY pada Maret 2020 telah merubah tatanan hidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Penduduk 15 tahun ke atas yang berhenti bekerja mulai Maret 2020 terkait Covid-19 mencapai 68,45 persen dan sisanya 31,55 persen tidak terkait dengan Covid-19. Selanjutnya penduduk yang memilih status sementara tidak bekerja dengan alasan terkait Covid-19 mencapai lebih dari separuh (54,68 persen) dan sisanya sebanyak 45,32 persen dengan alasan tidak terkait Covid-19 (cuti, sakit, aturan waktu kerja, cuaca, dll). Jika kondisi ketenagakerjaan ini tidak segera ditangani dengan baik, maka akan berdampak terhadap menurunnya kesejahteraan masyarakat atau meningkatnya kemiskinan di DIY.

PENUTUP





BAB VIII

PENUTUP

8.1. KESIMPULAN

1. Pengelompokan penduduk menurut pengeluaran perkapita menunjukkan rasio pengeluaran kelompok 20 persen tertinggi terhadap 20 persen terendah pada periode 2018-2019 di Seluruh Kabupaten/kota Se-D.I. Yogyakarta menunjukkan tren yang menurun. Penurunan tertinggi terjadi di Kota Yogyakarta dari 9,35 pada tahun 2018 menjadi 6,72 pada tahun 2019, sementara itu Kabupaten Kulonprogo tidak mengalami penurunan. Angka *Growth Incidence Curve* (GIC) DIY selama periode tahun 2017-2018 menunjukkan pertumbuhan pengeluaran konsumsi per kapita (r_{expcap}) kelompok 20 persen terbawah jauh lebih rendah dibandingkan dengan kelompok menengah ke atas, serta berada di bawah rata-rata pertumbuhan Garis Kemiskinan (r_{GK}).
- 2.a. Rumah tangga miskin di DI Yogyakarta cenderung mempunyai jumlah anggota rumah tangga lebih banyak dibandingkan rumah tangga tidak miskin. Rumah tangga miskin rata-rata memiliki jumlah anggota rumah tangga sekitar 4-5 orang (4,86 orang).
- b. Berdasarkan distribusi umur, rata-rata umur kepala rumah tangga miskin tercatat 56,47 tahun atau lebih tua dibanding rata-rata umur kepala rumah tangga tidak miskin yang mencapai 47,87 tahun. Pola yang sama juga terjadi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Jika dilihat perbandingan rata-rata umur kepala rumah tangga miskin, Kabupaten Sleman memiliki rata-rata umur perempuan sebagai kepala rumah tangga tertua, yaitu mencapai 59,98 tahun dan Kota Yogyakarta dengan rata-rata umur termuda (53,16 tahun).
- c. Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan, sebagian besar penduduk miskin di DI Yogyakarta memiliki tingkat pendidikan yang rendah yaitu SLTP ke bawah sebesar 73,04 persen. Rumah tangga miskin lebih banyak dijumpai pada rumah tangga yang kepala rumah tangganya berpendidikan rendah.

- d. Penduduk miskin yang tinggal Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman pada periode tahun 2019 ternyata paling banyak rawat inap di RS Pemerintah. Sementara 2 kab lainnya banyak menggunakan RS Swasta. Informasi ini mengindikasikan bahwa kemudahan akses fasilitas kesehatan turut menjadi pertimbangan pilihan penggunaan tempat rawat inap
- 3. Jumlah penduduk miskin secara absolut lebih banyak berada di daerah perkotaan daripada di daerah perdesaan, namun untuk persentase penduduk miskin (P0) kondisinya menunjukkan perbedaan. Persentase penduduk miskin di wilayah perdesaan lebih tinggi dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di perkotaan.
- 4.a. Tingkat penurunan penduduk miskin terendah di D.I. Yogyakarta selama setahun terakhir berada di Kota Yogyakarta yang mencapai sekitar 300-an jiwa. Upaya pengurangan penduduk miskin secara absolut di Kota Yogyakarta membutuhkan sumberdaya yang besar karena diduga jumlah penduduk miskin yang ada sudah pada level *hardcore poverty*.
- b. Kulon Progo tercatat sebagai kabupaten dengan tingkat kemiskinan yang tertinggi di DIY, namun kabupaten ini juga mencatatkan prestasi yang cukup baik dalam hal pengentasan kemiskinan. Selama periode 2018 - 2019, terjadi pengurangan nilai P0 sebesar 0,81 poin persen. Pengurangan nilai P0 ini merupakan yang tertinggi di wilayah DIY pada periode tersebut. Kabupaten lain yang juga mencatatkan laju pengurangan P0 cukup tinggi di DIY
- c. Rumah tangga yang tinggal di Kabupaten Kulonprogo, Bantul, Sleman dan Kota Yogyakarta terbanyak masuk dalam kategori tahan pangan antara 48 persen hingga 79 persen. Sementara itu rumah tangga Kabupaten Gunungkidul didominasi rumah tangga kategori rentan Pangan. Kategori rumah tangga rawan pangan masih juga ditemukan di semua kabupaten/kota. Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul menjadi 2 kabupaten dengan persentase

rumah tangga rawan pangan tertinggi, masing-masing sebesar 8,66 persen dan 7,13 persen.

5. Pola pangan harapan (PPH) D.I. Yogyakarta tahun 2019 sebesar 93,90. Artinya pola pangan tahun 2019 belum mencapai ideal yakni 100. Skor PPH di perkotaan (93,48) lebih tinggi daripada di perdesaan (91,94). Hal ini menunjukkan mutu keragaman konsumsi pangan di perkotaan lebih beragam daripada di perdesaan. Disamping itu juga skor PPH juga terus meningkat seiring dengan meningkatnya level kelompok pengeluaran (desil)

5.a. Tingkat konsumsi energi di D.I. Yogyakarta mencapai 110 persen. Tingkat konsumsi energi kabupaten/kota tertinggi adalah Kabupaten Sleman(119,15%), diikuti oleh Kabupaten Gunungkidul(108,21%), Kota Yogyakarta(107,03%), Kabupaten Bantul(105,25%) dan yang terkecil adalah Kabupaten Kulonprogo(101,69%).

b. Perlambatan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) akibat melambatnya investasi bangunan sebagai komponen dominan, yaitu turun 2,13 poin persen. Sebaliknya investasi non bangunan pada tahun 2019 tumbuh hampir dua kali lipat dibandingkan 2018. Pertumbuhan investasi DIY tentunya memberikan andil terhadap pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesempatan kerja sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau menurunkan tingkat kemiskinan.

c. Berdasarkan survei dampak Covid-19 terhadap pelaku usaha di Indonesia yang dilakukan BPS pada Bulan Juli 2020 diperoleh informasi bahwa perusahaan berhenti beroperasi (8,76 persen), pemberlakukan Work From Home (7,5 persen), beroperasi dengan pengurangan kapasitas (24,31 persen), beroperasi bahkan melebihi kapasitas sebelum Covid-19 (0,49 persen) dan sisanya masih beroperasi seperti biasa (58,95 persen).

d. Secara umum terlihat bahwa sebagian besar penduduk miskin bekerja di sektor informal. Di kabupaten Gunungkidul jumlah penduduk miskin yang bekerja di sektor informal bahkan mencapai lebih dari setengahnya (55,86 persen). Selain

itu pula, persentase penduduk miskin yang bekerja di sektor informal di Kabupaten Kulon Progo dan Sleman juga tercatat relatif tinggi, yang jumlahnya mencapai 49 persen dan 48 persen. Kondisi yang sedikit berbeda ditunjukkan oleh kabupaten Bantul.

- e. Persentase penduduk miskin di DI Yogyakarta yang tidak bekerja sebesar 32,83 persen dan yang bekerja di sektor informal sebesar 44,97 persen serta bekerja di sektor formal sebesar 22,20 persen.
 - f. Lapangan usaha penduduk miskin yang bekerja cukup bervariasi antara kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta. Di kabupaten Gunungkidul, sebagian besar penduduk miskin bekerja di sektor pertanian (48,86 persen), Sementara itu penduduk miskin di Kulon Progo, Bantul, dan Sleman menjadikan lapangan usaha di luar pertanian sebagai pekerjaan utamanya dengan besaran masing-masing 45,49 persen 45,55 persen, dan 41,56 persen. Sementara itu, penduduk miskin Kota Yogyakarta bekerja luar sektor pertanian (64,05 %) dan yang tidak bekerja (35,95 %).
- 6.a. Penerima program BPNT mulai dari Desil 1 hingga Desil 10 menunjukkan persentase yang semakin kecil. Semakin tinggi golongan pengeluaran perkapita maka semakin sedikit persentase rumah tangga penerima program BPNT. Hal ini berarti persebaran rumah tangga penerima BPNT didominasi oleh kelompok pendapatan bawah (Desil 1- Desil 4).
- b. Berdasarkan distribusi rumah tangga penerima PKH, semakin tinggi kelompok pengeluaran perkapita maka persentase rumah tangga penerima PKH juga semakin kecil. Rumah tangga pada kelompok pengeluaran Desil 1 memiliki persentase penerima PKH paling tinggi meskipun kurang dari 50%, yaitu sebesar 44,95 persen, sedangkan 55,05 persen pada Desil 1 tidak menerima PKH.
 - c. Penerima bantuan kredit pada tahun 2019 lebih banyak dinikmati rumah tangga mampu (desil atas) yaitu kelompok pengeluaran Desil 10 yang mencapai 14,28

persen dari seluruh rumah tangga penerima kredit dan rumah tangga dengan desil 1 (termiskin) menerima bantuan kredit paling sedikit (5,01 persen). Hal ini diduga karena rumah tangga miskin memiliki tingkat kemampuan pengembalian kredit yang lebih rendah (kurang blankable) dibandingkan rumah tangga tidak miskin. Jika dilihat menurut tipe daerah, rumah tangga kelompok Desil 1 di kota yang menerima bantuan kredit hanya sebanyak 3,24 persen dan di desa jauh lebih banyak, yaitu mencapai 9,06 persen dari seluruh rumah tangga penerima bantuan kredit.

8.2. REKOMENDASI

Dalam upaya untuk menyeimbangkan program pengentasan kemiskinan antara yang bersifat makro dan mikro ada beberapa hal yang dapat ditindaklanjuti:

Pertama, dalam bidang pendidikan *affirmative action* yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten/kota sangatlah positif, dimana anak miskin dapat bersekolah di sekolah negeri favorit atau bermutu, perlu diikuti dengan pemenuhan kebutuhan penunjang pendidikan (masalah transportasi seragam, buku dan sebagainya), agar kemungkinan *drop out* anak miskin karena tidak memiliki seragam sekolah atau karena selalu telat masuk sekolah hanya gara-gara masalah akses menuju sekolah serta tidak mampu membayar uang transportasi dapat dihindari. Selain itu kiranya perlu juga diadakan pemantauan prestasi belajar anak miskin untuk diberi kesempatan sekolah hingga kuliah di Perguruan Tinggi, guna memperluas kesempatan bagi anak miskin untuk mencapai mobilitas vertikal sebagai kunci utama dalam mengubah perbaikan masa depan bagi dirinya sendiri dan seluruh keluarganya.

Kedua, dalam program kesehatan di samping tetap penting memelihara dan memertahankan prestasi keberhasilan program yang telah dijalankan, kiranya perlu dibuka ruang partisipasi publik. Sehingga Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan dapat mengintrodusir berbagai bentuk keswadayaan masyarakat dalam pemeliharaan kesehatan beserta pembiayaannya. Model *Citizen Charter* seperti yang dilakukan Pemkot Blitar, nampaknya perlu dipertimbangkan dalam rangka mensinergikan peran *market, state dan society* secara simultan.

Ketiga, dalam upaya menjamin keberlanjutan program dan menghindari tumpang-tindihnya program kebijakan pengentasan kemiskinan yang dikerjakan masing-masing SKPD, perlu adanya perencanaan yang sistematis yang didasarkan pada cetak biru yang komprehensif dari Pemerintah Daerah. Intinya semua program pengentasan kemiskinan harus memberikan kesempatan seluas-luasnya pada masyarakat miskin untuk terlibat dalam perencanaan, implementasi dan evaluasi, seperti lazimnya dalam model pendekatan *Participatory Poverty Assessment*.

Keempat, dalam rangka melakukan percepatan program kebijakan pengentasan kemiskinan, perlu adanya prinsip *merit system (reward and punishment)* bagi stakeholder berprestasi untuk merangsang percepatan penurunan angka-angka indikator *basic needs* seperti dalam bidang kesehatan (rendahnya kematian bayi-ibu, bebas penyakit endemik), pendidikan (rendahnya putus sekolah, banyak anak miskin yang lulus perguruan tinggi dan sebagainya) dan penguatan ekonomi (meningkatnya pendapatan), maupun upaya memandirikan orang miskin dari ketergantungan, dengan memberikan insentif bagi pemangku kepentingan yang berhasil menurunkan angka-angka itu secara signifikan (seperti di Bantul).

Kelima, untuk menciptakan kemandirian (sosial, budaya dan ekonomi) perlu adanya pendampingan yang terus-menerus, yang dimasukkan dalam satu paket program kebijakan pengentasan kemiskinan yang ditawarkan, sampai warga miskin dinilai mampu berdiri sendiri, membantu dirinya sendiri, dan mampu melahirkan kesadaran bersama atas pentingnya menolong diri sendiri untuk terlepas dari kemiskinan. Berbagai langkah pendampingan secara terus menerus yang dimasukkan kedalam satu paket program, selayaknya segera dimulai untuk program-program mendatang agar keberlanjutan program kebijakan pengentasan kemiskinan dapat lebih dijamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelman, Irma (1986) “*A Poverty-Focused Approach to Development Policy*”, in John P. Lewis & Valeriana Kallab (Editors), *Development Strategies Reconsidered*. Overseas Development Council, Washington, D. C
- Alkire, S. and Santos, M. E. (2010), *Acute Multidimensional Poverty: A New Index for Developing Countries*, Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) Working Paper No. 38.
- Anas Saidi (ed). (2010). Kemiskinan Berdimensi Sosial-Budaya: Upaya Mencari Model Pengentasan Kemiskinan Berbasis Participatory Poverty Assessment: Studi kasus Pemkot Solo, Pemkot Yogyakarta dan Kabupaten Bantul, LIPI.
- Artha, D. R. P. and Dartanto, T. (2014). *Multidimensional Approach to Poverty Measurement in Indonesia*. LPEMFUI Working Paper No. 002.
- Asian Development Bank, 2014. *Key Indicators For Asia And The Pacific 2014, 45th Edition, Special Chapter, Poverty In Asia: A Deeper Look*. Asian Development Bank, Mandaluyong City.
- Aspinall, edward and Fealy, Greg (eds), 2003. *Local Power and Politics in Indonesia: Decentralisation & Democratisation*. Indonesia Update Series Research School of Pasific and Asia Studies The Australian National University.
- Badan Pusat Statistik, 2018. *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2018*. BPS RI, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2019. *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2019*. BPS RI, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta, 2018. *Profil Kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta Maret 2018*. Berita Resmi Statistik No. 39/07/34/Th.XX, 16 Juli 2018. BPS DIY, Bantul.
- Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta, 2019. *Profil Kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta Maret 2019*. Berita Resmi Statistik No. 41/07/34/Th.XXI, 15 Juli 2019. BPS DIY, Bantul.
- Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta, 2020. *Pertumbuhan Ekonomi DIY Triwulan I-2020*. Berita Resmi Statistik No. 031/05/34/Th.XXII, 5 Mei 2020. BPS DIY, Bantul.
- Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta, 2020. *Profil Kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta Maret 2020*. Berita Resmi Statistik No. 43/07/34/Th.XXII, 15 Juli 2020. BPS DIY, Bantul.
- Chambers, Robert, 1996. *PRA (Participatory Rural Appraisal), Memahami Desa Secara Partisipatif*, Kanisius, Yogyakarta.
- _____, 1988. Rural development putting the last first, diterjemahkan oleh Pepep Sudrajat, Pembangun Desa Mulai dari Belakang. Jakarta : LP3ES.

- Day, Millissa, 2001. *Findings on Credit Impact, Participation, and Sustainability*, World Bank, April.
- Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Departemen Dalam Negeri. 2009. Profil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Provinsi DI Yogyakarta. Departemen Dalam Negeri. Jakarta.
- International Labour Organization, 2016. *World Employment Social Outlook 2016: Transforming jobs to end poverty*. ILO Office, Geneva.
- Food and Agriculture Organization, 1995. *World Agriculture: Towards 2010, An FAO Study*. FAO, Chichester.
- Food and Agriculture Organization, 2019. *The Role Of Agriculture And Rural Development In Achieving SDG 1.1*. <https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2019/03/FAO-ending-extreme-rural-poverty-1.pdf> (diakses pada 18 September 2020)
- Lipton, Michael (1977) “Why Poor People Stay Poor : Urban Bias in World Development”, dalam John Harris (Eds), *Rural Development : theories of peasant economy and agrarian change*. London : Hutchinson Group Ltd.
- Killick, Tony. (1981). *Policy economics : a textbook of applied economics on developing countries*. London ; Exeter, N.H. : Heinemann Educational. Mellor, John W. and Gunvant M. Desai (Eds) (1985), *Agricultural Change and Rural Poverty: Variation on a Theme by Dharm Narain*. Baltimore and London : The John Hopkins University Press.
- Mc Clelland, David. 1967. *The Achieving Society*. Princeton : Von Nostrand.
- Seers, Dudley, 1973. *The Meaning of Development*, in Charles K. Wilber (ed), *The Political Economy of Development and Underdevelopment*. New York : Random, House, Inc.
- Nafziger, E. Wayne (2005), *Economic Development*. Fourth Edition. Cambridge University Press. Cambridge.
- Quibria, M. G. (Eds), *Rural Poverty in Asia : Priority Issues and Policy Options*. Oxford : Oxford University Press.
- Osborne, David & Ted Gaebeler. 1992. *Mewirusaha Birokrasi: Mentransformasikan Semangat Wirausaha Ke Dalam Sektor Publik*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
- Sachs, Jeffrey D. (2005), *The Ends of Poverty: How We Can Make it Happen in Our Lifetime*. Penguin Books Ltd, England.
- Sadu Wasistiono. 2002. “Desentralisasi, Demokratisasi dan Pembentukan Good Governance, dalam Syamsuddin Haris (eds),” *Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*, AIPI and Partnership for Governance Reform in Indonesia.
- Sen, Amartya (1999), *Development As Freedom*. Oxford University Press.
- Taufik, Nuri, 2017. *Pengaruh Dinamika Sektor Pekerjaan Terhadap Dinamika Kemiskinan Di Indonesia*. Sosio Konsepsia Vol. 7, No. 01, September - Desember, Tahun 2017.

Todaro, Michael P. and Stephen C. Smith (2015), *Economic Development*. 12th, Edition. Pearson Ltd. New York.

Yunus, Muhammad (2007), *Creating a World Without Poverty: How Social Business Change Our World*.

DATA

Mencerdaskan Bangsa